



LAPORAN AKHIR

KAJIAN PENGUATAN CREATIVEPRENEUR DI KABUPATEN LAHAT

Kerjasama

Balitbang Kabupaten Lahat

Dengan

FISIP Universitas Airlangga Surabaya

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN PENGUATAN
CREATIVEPRENEUR
DI KABUPATEN LAHAT**



Kerjasama
Balitbang Kabupaten Lahat
Dengan
FISIP Universitas Airlangga Surabaya
2023

Kata Pengantar

Puji Syukur senantiasa terpajatkan kehadiran Allah SWT mengiringi Laporan Pengembangan Model Crativeprenuer di Kabupaten Lahat Tahun 2023. Laporan akhir ini menjadi pertanggungjawaban substansi kegiatan yang memberikan gambaran secara holistik, urgensi, serta mekanisme metologis yang mendasari kegiatan kajian ini. Relasi empiris dengan metodologis terus digabungkan untuk menghasilkan temuan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Program penguatan kewirausahaan atau secara teoretik dikenal dengan creativepreneur merupakan program yang ideal untuk diterapkan di Kabupaten Lahat yang memiliki status sebagai kabupaten yang sangat pesat berkembang dalam hal industri kreatif. Creativepreneur memiliki dua arti yaitu creative dan entrepreneur, artinya pelaku usaha yang kreatif. Seseorang yang tertarik dalam dunia bisnis dituntut untuk memiliki ide dan kreatifitas yang tinggi didukung dengan inovasi-inovasi terbaru sehingga penjualan dan hasilnya nyata. Kajian ini akan memetakan potensi berdasarkan survey lapangan, serta penjangingan ekspektasi masyarakat, dan analisis mendalam terhadap potensi yang dimiliki sesuai pengamatan peneliti. FISIP Universitas Airlangga (Unair) terus berkoordinasi dengan *stakeholder* maupun mitra Balitbang Kabupaten Lahat untuk menghasilkan kajian yang kredibel.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan dan staff Balitbang Kabupaten Lahat, seluruh *stakeholder*, masyarakat, serta semua pihak yang membantu kelancaran kegiatan ini. Saran dan masukan terus kami lakukan demi kebaikan kegiatan ini.

Surabaya, Oktober 2023

FISIP UNAIR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan	8
1.4. Sasaran	8
BAB II KERANGKA HUKUM DAN TEORI.....	9
2.1. Kerangka Hukum.....	9
2.2. Kerangka Teori	10
2.2.1. Teori Kreativitas.....	10
2.2.2. Definisi dan Penjabaran Industri Kreatif	19
2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Komunitas.....	29
2.2.4. Teori Karakteristik Kewirausahaan.....	32
2.2.5. Definisi Karakteristik Kewirausahaan	33
2.2.6. Motivasi.....	35
BAB III METODE KEGIATAN	42
3.1 Rancangan Pengembangan	42
3.2 Prosedur Pengembangan	42
3.3 Langkah-Langkah Pengembangan	44
3.3.1 Tahap <i>Define</i> (Pendefenisian).....	44
3.3.2 Tahap <i>Design</i> (Perancangan).....	45
3.3.3 Tahap <i>Develop</i> (Pengembangan).....	46
3.3.4 Tahap <i>Diseminate</i>	46
3.4 Penilaian Produk	46
3.5 Karakteristik Subjek.....	47
3.6 Jenis Data Penilaian.....	47

3.7 Analisis Data.....	48
3.7.1 Validitas	48
3.7.2 Reduksi Data	48
BAB IV GAMBARAN KABUPATEN LAHAT	50
4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	50
4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	50
4.2 Demografi	71
4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	72
4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	90
4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	93
4.5 FOKUS URUSAN DASAR	100
4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN	115
BAB V HASIL KEGIATAN	123
5.1 Sebaran Responden.....	123
5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan	123
5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur	128
5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin	129
5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku.....	131
5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir	135
5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama	137
5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan	138
5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan	142
5.2 Pilar Utama Model Pengembangan Ekonomi Kreatif	144
5.3 Aktor Utama Model Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	146
5.4 Potensi dan daya saing usaha kreatif di Lahat.....	149
5.5 Analisis strategi penguatan creativepreneur di Lahat	158
5.6 Kepentingan Stakeholders	177
5.7 Saran dan rekomendasi penguatan creativepreneur	179
BAB VI PENUTUP.....	187
DAFTAR PUSTAKA.....	189
LAMPIRAN.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat	51
Tabel 4. 2 Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut, dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan.....	53
Tabel 4. 3 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan Kabupaten Lahat	55
Tabel 4. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat	56
Tabel 4. 5 Luas Area Kecamatan di Kabupaten Lahat	58
Tabel 4. 6 Luas Kawasan Bahaya Bencana di Kabupaten Lahat	67
Tabel 4. 7 Laju Populasi Penduduk per Tahun.....	72
Tabel 4. 8 Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Lahat.....	76
Tabel 4. 9 PDRB Kabupaten Lahat menurut lapangan usaha.....	77
Tabel 4. 10 Indeks Gini Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021	78
Tabel 4. 11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021	80
Tabel 5. 1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan	123
Tabel 5. 2 Nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan	124
Tabel 5. 3 jumlah penduduk serta laju pertumbuhan menurut Kecamatan	126
Tabel 5. 4 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan	128
Tabel 5. 5 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur	128
Tabel 5. 6 Sebaran Responden Menurut Suku	131
Tabel 5. 7 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir	135
Tabel 5. 8 Sebaran Responden Menurut Agama	137
Tabel 5. 9 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan.....	142
Tabel 5. 10 perkapita masyarakat di Kabupaten Lahat	143
Tabel 5. 11 Profil Usaha Kreatif di Lahat	151
Tabel 5. 12 Identifikasi Dorongan Berusaha Kreatif	152
Tabel 5. 13 Efikasi Diri Creativepreneur.....	154
Tabel 5. 14 Dorongan Lingkungan Keluarga untuk Creativepreneur.....	155

Tabel 5. 15 Semangat Creativepreneur	156
Tabel 5. 16 Aktivitas Media Sosial yang Mendukung Creativepreneur	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow	37
Gambar 3. 1 Model Pengembangan 4D	43
Gambar 3. 2 Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1984)	49
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lahat	52
Gambar 4. 2 Peta Daerah Banjir.....	68
Gambar 4. 3 Peta Bahaya Longsor.....	68
Gambar 4. 4 Peta Rawan Karhutla.....	69
Gambar 4. 5 Peta Gunung Berapi	70
Gambar 4. 6 Peta Rawan Gempa Bumi	70
Gambar 4. 7 Persentase Penduduk di Kabupaten Lahat	71
Gambar 4. 8 Perkembangan PDRB Kabupaten Lahat Tahun 2016- 2021	74
Gambar 4. 9 IPM Kabupaten Lahat 2022	81
Gambar 5. 1 Responden Berdasarkan Pekerjaan	138
Gambar 5. 2 Model Sinergi Triple Helix.....	161
Gambar 5. 3 Penyusun Hierarki Triple Helix.....	162

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat menyebabkan perubahan-perubahan pada kehidupan manusia. Manusia menjadi cenderung menciptakan temuan-temuan baru untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak terhadap perubahan pola hidup masyarakatnya. Perubahan-perubahan orientasi tersebut oleh Howkins dikenal dengan “gelombang ekonomi”, dan sekarang memasuki gelombang ekonomi ke empat, yaitu gelombang ekonomi kreatif (Suryana, 2013). John Howkins dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money* pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif. Howkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreatifitas. Yang mana ciri dari gelombang ekonomi kreatif ini adalah beralihnya sumberdaya yang sebelumnya menggantungkan pada sumberdaya alam kearah sumberdaya manusia. Dalam fase ekonomi ini, manusia beserta ide, inovasi dan kreatifitasnya dijadikan sebagai modal utama (indonesiakreatif.bekraf.go.id:2017) Di Indonesia, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor riil yang layak menjadi prioritas. Presiden Joko Widodo secara optimis menyatakan pendapatnya bahwa ekonomi kreatif pada saatnya bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (www.bekraf.go.id). Hal ini dapat dipahami karena ekonomi kreatif yang digerakkan oleh potensi sumberdaya manusia tidak dapat habis atau punah seperti halnya sumberdaya alam. Ketika sumberdaya alam habis atau punah akan sulit sekali dilakukan perbaruan, sedangkan sumberdaya manusia akan selalu ada selama kehidupan manusia masih ada. Ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi tingkat persaingan yang kompetitif, sehingga tingkat persaingan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar proses tingkat proses produksi yang dilakukan tapi juga aspek kreativitas dan inovasi mulai memegang peranan yang sangat penting memberikan

pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tingkat persaingan yang ketat dan kompetitif. Wheny Khristianto (2012) menyatakan bahwa tingkat ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam lingkup ekonomi kreatif. Salah satunya akibat adanya perkembangan teknologi informasi sehingga membuat peluang dan pengembangan industri kreatif menjadi lebih cepat. Departemen Perdagangan (2007) menyatakan bahwa Industri kreatif mendapatkan perhatian yang besar disebabkan karena industri ini mampu memberikan sumbangan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 104,637 triliun rupiah pada periode 2002-2006. Nilai ini berarti industri kreatif telah memberikan kontribusi sebesar 6,28% pada periode 2002-2006. Nilai kontribusi ini berada di atas kontribusi sektor pengangkutan umum dan komunikasi, sektor bangunan, dan sektor listrik, gas dan air bersih (Irawan, 2015). Hal-hal tersebut yang selanjutnya mendorong pemerintah mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif. Pada 2015, nilai ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar Rp852,56 triliun. Angka tersebut terus tumbuh menjadi Rp922,59 triliun pada 2016 dan meningkat menjadi Rp1.009 triliun pada 2017 (infobanknews :2019). Tentunya data ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif tidak dapat dipandang sebelah mata. Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, engineering dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan (Rochmat Aldy Purnomo, 2016) Terkait kebijakan pemerintah mengenai ekonomi kreatif kronologisnya dimulai oleh pernyataan Presiden untuk meningkatkan

industri kerajinan dan kreativitas bangsa, terselenggaranya Pekan Produk Budaya Indonesia 2007, yang berubah nama menjadi Pekan Produk Kreatif Indonesia 2009, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, hingga Perpres Nomor 92 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum terbentuknya kementerian baru yang mengurus ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Menteri-nya, Mari Elka Pangestu. Kemudian lebih lanjut terbitlah pada tahun 2012, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 (<http://ekonomi.kompasiana.com>). Di dalam rencana strategis itu telah tersusun dengan detail pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang terbaru yaitu terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 142 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018 - 2025 atau disebut Rindekraf. Dalam Perpres ini berisi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam melaksanakan urusan pengembangan ekonomi kreatif nasional (Perpres nomor 142 tahun 2018) Dalam Perpres nomor 142 tahun 2018 disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinilan, lahir dari kreatifitas intelektual manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya. Sedangkan Definisi menurut Institute For Development Economy and Finance (2005), ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini dijelaskan terdapat 16 sub sektor yang termasuk dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif, yaitu :aplikasi atau game developer; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, dan video; fotografi,; kriya; kuliner; musik, penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; dan televisi dan radio. Di Kabupaten Lahat sendiri

kebijakan mengenai ekonomi kreatif sudah ada yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Penguatan Usaha Mikro, yang mana didalamnya terdapat ketentuan umum pemerintah daerah terkait Ekonomi Kreatif. Pemerintah Daerah dalam peraturan tersebut berperan dalam hal memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dengan cara melakukan langkah-langkah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kreatif dan inovasi ekonomi kreatif, menumbuhkan budaya kreatif dan kearifan lokal, menyediakan ruang kreatif, pengembangan sentra usaha, konsultasi dan advokasi, sampai dengan tahap promosi dan pemasaran. Langkah-langkah tersebut sudah tercantum dalam kebijakan, akan tetapi terkait implementasinya masih perlu dilihat lebih jauh lagi. Karena pada kenyatannya di kabupaten Lahat para pelaku ekonomi kreatif masih belum merasakan peran pemerintah sebagaimana tertulis di perda nomor 9 tahun 2017 tersebut. Kebijakan tentang ekonomi kreatif sudah ada, para pelaku ekonomi kreatif juga sudah ada. Akan tetapi selama ini belum ada sebuah kegiatan atau ruang yang dapat “mempertemukan” mereka.

Pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian direvisi dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, melahirkan perubahan yang sangat radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan kota yang dulunya memiliki kewenangan yang terbatas, sekarang ini memiliki kewenangan yang sangat luas di semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi

dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan menurut Dewey (1983) fungsi pemerintah itu meliputi: a) Pemberian pelayanan; b) Fungsi pengaturan; c) Fungsi pembangunan; d) Fungsi perwakilan; e) Fungsi koordinasi. Hal senada dikemukakan pula oleh Koswara (1997) yang menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan itu meliputi: 1) Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. 2) Peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih mandiri 3) Peningkatan kehidupan berdemokrasi di lapisan bawah. 4) Terlaksananya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang diusahakan melalui program pembangunan, sedangkan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa jauh kebutuhan nyata masyarakat dapat dipenuhi, masyarakat dapat diberdayakan dan puas terhadap pelayanan yang diterima.

Program penguatan kewirausahaan atau secara teoretik dikenal dengan creativepreneur merupakan program yang ideal untuk diterapkan di Kabupaten Lahat. Creativepreneur memiliki dua arti yaitu creative dan entrepreneur, artinya pelaku usaha yang kreatif. Seseorang yang tertarik dalam dunia bisnis dituntut untuk memiliki ide dan kreatifitas yang tinggi didukung dengan inovasi-inovasi terbaru sehingga penjualan dan hasilnya

nyata. Creativepreneur menurut pakar marketing Llise Benun (2011) adalah seseorang yang memulai atau menjual bisnisnya menggunakan ide kreatif. Ada yang menyebutkan, creativepreneur sebagai bisnis berbasis kreativitas. Creativepreneur basisnya adalah kreatif. Sehingga di era Milenial, creativepreneur berkembang dengan amat pesat tanpa batas karena tidak lagi berbabis pada aturan ekonomi bisnis masa lalu. Persaingan saat ini memiliki dua pilihan yaitu kreatif untuk bertahan atau tidak berkreasi. Untuk itulah diperlukan ide dan inovasi untuk terus dapat mengembangkan usaha dan membangun jaringan bisnis.

Dengan era disrupsi Revolusi Industri 4.0 sekarang ini terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi Creativepreneur tidaklah mudah. Ruang gerak menjadi terbatas, perubahan perilaku konsumen yang drastis hingga tekanan ekonomi. Namun, selain sebagai sebuah ancaman ternyata juga menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang kreatif. Kita pun seolah menjadi lebih mengenal lebih mendalam tentang orang-orang kreatif dan adanya aneka ragam peluang dari ekonomi kreatif. Giat inilah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mengembangkan konsep yang terarah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing komunitas usaha atau wilayah kelurahan.

Tujuan akhir dari pengembangan model creativepreneur ini untuk menguatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Leonora Scrafica-de Guzman, *Social work is the profesion which is primaly concerned with organized social service activity aimed to facilitate and strengthen basic relationship in the mutual adjusment between individual, and their social environment for the good of the individual and society, by the use of social work method.* Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan masyarakat membangun ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan ketimpangan dalam

kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Menurut Todamo dan Stephen C. Smith, Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil masyarakat pembangunan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: Pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. Kedua, Peningkatan kehidupan, tingkat pendapatan pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dan Ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilhan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan masyarakat juga berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum.

Mengingat urgensi pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat Kekdiri, maka sangat mendesak diperhatikan dan ditelaah lebih serius melalui pengembangan model creativepreneur sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai respon pemerintah pusat dengan mendekatkan pemerintah, akademisis serta dunia usaha dan dunia industry, sinergitas ini dimulai dari penyusunan model pengembangan creativepreneur Kerjasama dilaksanakan dengan kerjasama FISIP Unair

Surabaya dengan Balitbang Kabupaten Lahat untuk menghasilkan data kajian yang akurat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kondisi pelaku usaha kreatif di Lahat?
2. Apasaja potensi dan daya saing usaha kreatif di Lahat?
3. Bagaimana analisis strategi penguatan creativepreneur di Lahat?
4. Bagaimana Rumusan Strategi penguatan creativepreneur di Lahat?
5. Bagaimana saran dan rekomendasi penguatan creativepreneur?

1.3. Tujuan

- 1) Melakukan kajian kepemilikan daya dukung pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah berdasar dokumen
- 2) Melakukan kajian potensi dan daya dukung SDA dan SDM melalui survey
- 3) Menyusun gambaran harapan pengembangan melalui survey
- 4) Melakukan penyusunan Model pengembangan creativepreneur dengan metode 4D
- 5) Menyusun Saran dan rekomendasi

1.4. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah Kajian Penguatan Creativepreneur di Kabupaten Lahat Tahun 2023.

BAB II KERANGKA HUKUM DAN TEORI

2.1. Kerangka Hukum

Kegiatan kajian kegiatan penyusunan evaluasi dan penguatan program kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Lahat mengacu kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
2
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;

- 11) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
- 13) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Teori Kreativitas

1. Pengertian Kreativitas

Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru, yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya, unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual, seperti intelegensi bakat dan kecakapan hasil belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor.

Menurut David Campbell, Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh dan berguna bagi masyarakat. Pengertian Kreativitas menurut para ahli lainnya : Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru disini bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya.

- Guilford (1970 : 236)
Kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai cirri-ciri seorang kreatif.
- Utami Munandar (1992 : 41)
Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan.
- Rogers (1992 : 48)
Kreativitas adalah proses munculnya hasil-hasil baru dalam suatu tindakan.
- Drevdahl (Hurlock; 1978 : 3)
Kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis yang mungkin melibatkan pembentukan pola-pola bar dan kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi sekarang.
- Pengertian Kreativitas Menurut Torrance
Menurut Torrance (1981) kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis-hipotesis baru dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat

mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan

a. Persiapan (preparation)

Merupakan tahap awal berisi kegiatan pengenalan masalah, pengumpulan data-informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah-kaidah yang ada. Tetapi belum sampai menemukan sesuatu, baru menjajagi kemungkinan-kemungkinan.

b. Inkubasi (incubation)

Merupakan tahap menjelaskan, membatasi, membandingkan masalah. Dengan proses ini diharapkan ada pemisahan, mana hal-hal yang benar-benar penting dan mana yang tidak, mana yang relevan dan mana yang tidak.

c. Iluminasi (illumination)

Merupakan tahap mencari dan menemukan kunci pemecahan, menghimpun informasi dari luar untuk dianalisis dan disintesis kemudian merumuskan beberapa keputusan.

d. Verifikasi (verification)

Merupakan tahap mentes dan membuktikan hipotesis, apakah keputusan yang diambil itu tepat atau tidak.

Karakteristik Kreativitas

a. Diers (Adams : 1976) mengemukakan bahwa karakteristik :

- 1) Memiliki dorongan (drive) yang tinggi
- 2) Memiliki rasa ingin tahu yang besar
- 3) Penuh percaya diri
- 4) Toleran terhadap ambiguitas
- 5) Bersifat sensitive, dan lain-lain

b. Utami Munandar (1992) mengemukakan ciri-ciri kreativitas antara lain :

- 1) Senang mencari pengalaman baru
- 2) Memiliki inisiatif
- 3) Selalu ingin tahu
- 4) Mempunyai rasa humor
- 5) Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi, dan lain-lain.

c. Clark (1988) mengemukakan karakteristik kreativitas adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki disiplin diri yang tinggi
- 2) Senang berpetualang
- 3) Memiliki wawasan yang luas
- 4) Mampu berpikir periodic
- 5) Memerlukan situasi yang mendukung
- 6) Sensitif terhadap lingkungan
- 7) Memiliki nilai estetik yang tinggi

d. Torrance (1981) mengemukakan karakteristik kreativitas adalah :

- 1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar
- 2) Tekun dan tidak mudah bosan
- 3) Percaya diri dan mandiri
- 4) Berani mengambil resiko
- 5) Berpikir divergen

Adapun Definisi kreativitas tergantung pada segi penekanannya, kreativitas dapat didefinisikan kedalam empat jenis dimensi sebagai Four P's Creativity, yaitu dimensi Person, Proses, Press dan Product sebagai berikut :

1. Definisi kreativitas dalam dimensi Person. Definisi pada dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu

atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. "Creativity refers to the abilities that are characteristics of creative people" (Guilford, 1950 dalam Reni Akbar-Hawadi dkk, 2001). "Creative action is an imposing of one's own whole personality on the environment in a unique and characteristic way (Hulbeck, 1945 dikutip Utami Munandar, 1999). Guilford menerangkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan atau kecakapan yang ada dalam diri seseorang, hal ini erat kaitannya dengan bakat. Sedangkan Hulbeck menerangkan bahwa tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Definisi kreativitas dari dua pakar diatas lebih berfokus pada segi pribadi.

2. Kreativitas dalam dimensi Process. Definisi pada dimensi proses upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. "Creativity is a process that manifest in self in fluency, in flexibility as well in originality of thinking" (Munandar, 1977 dalam Reni Akbar-Hawadi dkk, 2001). Utami Munandar menerangkan bahwa kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci), suatu gagasan. Pada definisi ini lebih menekankan pada aspek proses perubahan (inovasi dan variasi). Dari pendapat diatas kreativitas sebagai sebuah proses yang terjadi didalam otak manusia dalam menemukan dan mengembangkan sebuah gagasan baru yang lebih inovatif dan variatif (divergensi berpikir).

3. Definisi Kreativitas dalam dimensi Press. Definisi dan pendekatan kreativitas yang menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Definisi Simpson (1982) dalam S. C. U. Munandar 1999, merujuk pada aspek dorongan internal dengan rumusannya sebagai berikut :
“The initiative that one manifests by his power to break away from the usual sequence of thought” Mengenai “press” dari lingkungan, ada lingkungan yang menghargai imajinasi dan fantasi, dan menekankan kreativitas serta inovasi. Kreativitas juga kurang berkembang dalam kebudayaan yang terlalu menekankan tradisi, dan kurang terbukanya terhadap perubahan atau perkembangan baru.
4. Definisi Kreativitas dalam dimensi Product. Definisi pada dimensi produk merupakan upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu baik sesuatu yang baru/original atau sebuah elaborasi/penggabungan yang inovatif. “Creativity is the ability to bring something new into existence” (Baron, 1976 dalam Reni Akbar-Hawadi dkk, 2001)
Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan pada orisinalitas, seperti yang dikemukakan oleh Baron (1969) yang menyatakan bahwa kreatifitas adalah kemampuan untuk menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Begitu pula menurut Haefele (1962) dalam Munandar, 1999; yang menyatakan kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru

yang mempunyai makna sosial. Dari dua definisi ini maka kreatifitas tidak hanya membuat sesuatu yang baru tetapi mungkin saja kombinasi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan makna dari kreativitas yang dikaji dari empat dimensi yang memberikan definisi saling melengkapi. Untuk itu kita dapat membuat berbagai kesimpulan mengenai definisi tentang kreativitas dengan acuan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli.

Dari beberapa uraian mengenai definisi kreativitas yang dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa : “Kreativitas adalah proses konstruksi ide yang orisinil (asli), bermanfaat, variatif (bernilai seni) dan inovatif (berbeda/lebih baik)”.

Konsep dasar kreativitas berdasar 4P, Strategi 4P yaitu Pribadi, Pendorong, Proses, dan Produk yang menurut para ahli dapat membantu mengembangkan kreatifitas anak jika diterapkan secara benar. Pada dasarnya setiap anak memiliki kreativitas, hanya saja tidak semua anak bisa mengembangkan kreatifitasnya dengan benar. Untuk itu diperlukan peran orang tua dalam mengembangkan kreatifitas tersebut. Melalui strategi 4P ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam mengembangkan kreativitas anaknya.

Pribadi

Hal pertama yang harus orang tua ketahui dalam upaya mengembangkan kreatifitas anak adalah dengan memahami pribadi mereka, diantaranya dengan :

- Memahami bahwa setiap anak memiliki pribadi berbeda, baik dari bakat, minat, maupun keinginan.

- Menghargai keunikan kreativitas yang dimiliki anak, dan bukan mengharapkan hal-hal yang sama antara satu anak dengan anak lainnya, karena setiap anak adalah pribadi yang “unik”, dan kreatifitas juga merupakan sesuatu yang unik.
- Jangan membanding-bandingkan anak karena tiap anak memiliki minat, bakat, kelebihan serta ketebatasannya masing-masing. Pahamiilah kekurangan anak dan kembangkanlah bakat dan kelebihan yang dimilikinya.

Pendorong

Dorongan dan motivasi bagi anda sangat berguna bagi anak dalam mengembangkan motivasi instrinsik mereka, dengan begitu mereka akan sendirinya berkreasi tanpa merasa dipaksa dan dituntut ini itu, kita dapat melakukan :

- Berilah fasilitas dan sarana bagi mereka untuk berkreasi, misalnya melalui mainan-mainan yang bisa merangsang daya kreativitas anak misalnya balok-balok susun, lego, mainan alat dapur dan sebagainya. Hindari memberikan mainan yang tinggal pencet tombol atau mainan langsung jadi.
- Ciptakan lingkungan keluarga yang mendukung kreatifitas anak dengan memberikan susana aman dan nyaman.
- Hindari membatasi ruang gerak anak didalam rumah karena takut ada barang-barang yang pecah atau rusak, karena cara ini justru bisa memasung kreativitas mereka, alangkah lebih baik jika anda mau mengalah dengan menyimpan dahulu barang-barang yang mudah pecah ditempat yang aman, atau anda bisa menyediakan tempat khusus bermain anak, dimana anak bebas berkreasi.
- Disiplin tetap diperlukan agar ide-ide kreatif mereka bisa terwujud.

Proses

Proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas dimana anak anda akan merasa mampu dan senang bersibuk diri secara kreatif dengan aktifitas yang dilakukannya, baik melukis, menyusun balok, merangkai bunga dan sebagainya, beberapa hal yang dapat dilakukan:

- Hargailah kreasinya tanpa perlu berlebihan, karena secara intuitif anak akan tahu mana pujian yang tulus dan yang mana yang hanya akan basa-basi.
- Hindari memberi komentar negatif saat anak berkreasi, apalagi disertai dengan perintah ini itu terhadap karya yang sedang dibuatnya, karena hal ini justru dapat menyurutkan semangatnya berkreasi.
- Peliharalah harga diri anak dengan mengungkapkan terlebih dahulu komentar anda secara positif, misalnya “bunda senang adek bisa membuat menara seperti itu, lain kali adek buat yang lebih tinggi dan tidak mudah ambruk ya.” Dengan demikian anak akan merasa dirinya mampu dan dihargai lingkungannya

Produk

Pada tahap ini anak sudah bisa menghasilkan produk kreatif mereka, yang bisa dilakukan:

- Hargailah hasil kreatifitas mereka meski hasilnya agak kurang memuaskan.
- Pajanglah karya anak anda di kamar mereka atau tempat-tempat lain yang memungkinkan. Dengan demikian, anak akan merasa bangga karena karyanya dihargai.

2.2.2. Definisi dan Penjabaran Industri Kreatif

Sejak diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter (1934), konsep keilmuan Creativepreneurship telah dikembangkan oleh para peneliti yang terbagi menjadi dua kelompok dengan dua cara pandang/mahzab/paradigma (School of Entrepreneurship Thought), yaitu: 1) Creative Entrepreneurship, dan 2) Entrepreneurship in Creative Industry, sebagaimana pembahasan berikut. Creative Entrepreneurship sebagai School of Entrepreneurship Thought telah dijadikan pedoman bagi berbagai universitas dan telah dikembangkan menjadi program studi hingga saat ini, misalnya oleh Swansea Metropolitan University, University of East Anglia, University of Latvia, University of London, dll. Serta telah dikembangkan sebagai mata kuliah dan kajian, misalnya di: Stanford University, Babson College, Freeman School of Business, dll. Sedangkan sebagai kajian riset telah banyak dikemukakan pada jurnal-jurnal index Scopus dan Thomson Reuters.

Creative Entrepreneurship telah dipopulerkan oleh Joseph Schumpeter sejak tahun 1934 seorang ekonom terkenal kelahiran Austria yang mengajar di Harvard University, dan dilanjutkan oleh Baumol (1968). Bahwa fenomena new economy telah mengubah hukum ilmu ekonomi normal umumnya (Reinert, 2006), Schumpeter menyebutkan tentang Economic Theory of 'Creative Destruction', yaitu pada dasarnya faktor creativity adalah bagian utama dari creative entrepreneur memainkan peran fundamental dalam merevitalisasi new ekonomi, breaking up established systems dan membuka pasar-pasar baru. Bilton (2010) menyebutkan bahwa efek disruptive dan atau perubahan ini mempengaruhi bisnis melalui creative destruction dalam memperbaharui established businesses dan melakukan rekonstruksi kembali. Teori ini kemudian diperkuat oleh neoclassical theory yang disebut The Profit Maximizer (Endogenous Growth Theory) oleh Romer (1986, 1990) menitik

beratkan pada determinan knowledge-base firm yang menggerakkan innovation sebagai peran sentral dalam entrepreneurship (Friis et al, 2006). Konsentrasi creative entrepreneur dapat berbeda antara typical business atau social entrepreneur dalam mengkreasikan dan mengeksploitasi modal intelektual (intellectual capital) atau disebut juga sebagai investor talenta (Caves, 2001).

Creative Entrepreneurship sebagai sintesa konsep creative entrepreneur pada visi pionernya Schumpeter merupakan gabungan dari 3 postulate yang berasal dari tiga proposisi (Lintunen, 2000), sebagai berikut:

Postulate 1: Creative entrepreneur merupakan perwujudan inovasi pemimpin sukses.

Postulate 2: Inovator sukses merepresentasikan self-governing entrepreneur.

Postulate 3: Leadership pada self-governing entrepreneur adalah bukti keberhasilan proses inovasi.

Konsep inovasi Schumpeter menurut Oscarius (2016) dapat merupakan penekanan pada: munculnya gagasan produk baru, munculnya metode produksi baru, munculnya pasar baru, dan munculnya inovasi baru pada organisasi. Creative Entrepreneurship sebagai Creativity-based Entrepreneurship bagi kelompok peneliti lainnya, yaitu kelanjutan dari teori Wallas (1926) tentang Model of Creative Thinking yang kemudian dilanjutkan oleh Lumpkin et al (2004) dengan Creativity-based Model of Entrepreneurial Opportunity Recognition, terdapat lima tahapan formasi peluang pada Creativity-based Entrepreneurship yaitu: preparation (unconscious awareness), incubation of ideas, insight (the moment of discovery), evaluation and elaboration (Sabrina, 2013). Creativity (kreativitas) adalah membangkitkan idea baru (novel), berguna, dan tepat (Duxbury, 2012), adapun secara state of art dari creativity tsb dapat didefinisikan berdasar 4 Ps, yaitu personality, product,

process, press (Kolnhofer-Derecskei, 2016). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dari Fillis & Rentschler (2010) serta Schmidt et al (2013) bahwa creativity menjadi bagian dasar kritis pada pengalaman entrepreneurship sejak mengidentifikasi masalah, kepemimpinan, dan mengembangkan produk. Selain itu karena sebagai jiwa/the soul of entrepreneurship (Morris & Kuratko, 2002) creativity penting sebagai inisiasi dan mempertahankan perusahaan dalam menghadapi lingkungan kompetitif yang kompleks (Dayan & Benedetto, 2013).

Creative-preneurship pada School of Entrepreneurship Thought lainnya telah banyak dipraktikkan oleh beberapa universitas diantaranya: Berlin University pada program Creative Entrepreneurship of Creative Businesses, UiT the Arctic University of Norway pada program Bachelor of Cultural & Creative Entrepreneurship, SBM ITB pada program MBA in Creative and Cultural Entrepreneurship, University of London pada program Goldsmiths Creative and Cultural Entrepreneurship, Trinity College Dublin pada program M.Phil. in Creative and Cultural Entrepreneurship, dll. Pada umumnya universitas-universitas ini lebih fokus lagi dalam mengeksplorasi kewirausahaan pada konteks industri kreatif dan kultur budaya, menjadi program studi dan kajian pada berbagai strata pendidikan.

Creative-preneurship adalah pendapat kelompok kedua tentang Creative Entrepreneurship, yaitu sebagai praktek setting up a business secara mandiri pada industri kreatif (Bujur & Avasilcai, 2014), pendapat ini dikutip menjadi pendefinisian bebas dalam Wikipedia. Creative-preneurship mengacu pada aktivitas para entrepreneurs di bidang bisnis industri kreatif (Kellet, 2006). Berkembangnya kelompok kedua ini dipicu dengan adanya disrupsi pada industri, yaitu melalui perkembangan informasi internet, mobile era, musik, distribusi foto, dll (Jamison, 2012).

Creative-preneurship melakukan kajian dan simulasi praktis secara interrelasi antara “creativity”, “culture”, “arts”, “talents” terutama dalam keterkaitannya pada Creative and Cultural Entrepreneurship, Arts and Cultural Policy Administration, serta pada Social Entrepreneurship (Lauzikas & Mokšėckienė, 2013). Dengan demikian, cakupan Creative-preneurship apabila difokuskan pada ekonomi kreatif yang mencakup 14 subsektor, yaitu: Arsitektur; Desain; Fesyen; Film, Video, dan Fotografi; Kerajinan; Teknologi Informasi dan Piranti Lunak; Musik; Pasar Barang Seni; Penerbitan dan Percetakan; Periklanan; Permainan Interaktif; Riset dan Pengembangan; Seni Pertunjukan; dan Televisi dan Radio. Serat ditambah lagi dengan subsektor kuliner (Kemenparekraf, 2013).

Creativepreneurship dengan demikian telah berkembang menjadi spirit/roh bagi ilmu kewirausahaan serta memberikan sumbangsih contribution to the body of entrepreneurship dan mengembangkan keilmuan teori kewirausahaan pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa entrepreneurship telah menjadi suatu cabang ilmu terapan, misalnya di Indonesia telah disahkan pada tahun 2015 oleh Dirjen Dikti, KemenRistekDikti tahun 2015, yaitu kode nomenklatur 6160307 Kewirausahaan. Adapun state of the art dari entrepreneurship dibagi menjadi 5 paham (David & Christina, 2015), yaitu:

1. Frech School, yaitu: Richard Cantilon (1680-1734), Niccolas Baudeau (1730-1792), Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), dan Jean Baptiste Say (1767-1832).
2. German School, yaitu: Johann Heinrich von Thunen (1785-1850), Mangoldt (1824-1858), Wilhelm Roscher (1817-1894), Bruno Hildebrand (1812-1878), dan Karl Knies (1821-1898).
3. Austrian School, yaitu: Carl Menger (1840-1921), Leon Walras (1834-1910), dan Ludwig von Mises (1881-1872).

4. American School, yaitu: Amasa Walker (1799-1875), Francis A. Walker (1840-1897), John Bates Clark (1847-1938), F.B. Hawley (1843-1929), dan Frank Hyneman Knight (1885-1972).
5. England School, yaitu: Adam Smith (1723-1790), Jeremy Bentham (1748-1832), dan Alfred Marshal (1842-1924).

Secara detail pembahasan ilmu entrepreneurship tidak dibahas mendalam di artikel ini. Sedangkan Konsep kreatifitas pada creativepreneurship awalnya dipengaruhi oleh Plato (427 BC – 347 BC) bahwa kreatifitas sebagai alat untuk mengembangkan inovasi, Aristoteles (384 BC – 322 BC) proses kreasi menekankan pada tingkat keahlian, kecermatan dan ketelitian. Dengan demikian, creativity dalam entrepreneurship menghasilkan tujuh perspektif creation (Morris, 1998), yaitu: creation of wealth, creation of enterprise, creation of innovation, creation of change, creation of employment, creation of value, creation of growth.

Creative Industry berdasarkan referensi asing adalah sebagai berikut: *Creatives Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. This includes: advertising, architecture, the art and antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, interactive leisure software, music, the performing arts, publishing, software and computer services, television & radio* (Natale De Douglas and Gregory H.Wassal, 2007 dalam Setyo Nugroho Puguh dan Malik Cahyadin 2014 : 4).

Industri Kreatif bukan merupakan sesuatu yang bersifat universal, karena sebenarnya merefleksikan tradisi kebudayaan Anglo-Amerika dalam pembuatan kebijakan di bidang kebudayaan dan yang memandang hak kekayaan intelektual sebagai “*tradable economic goods*”. Di Eropa khususnya, berkembang dua buah *tradisi*

kebijakan yang berbeda di sektor kebudayaan dalam kaitannya dengan industri kreatif. Pada dekade tahun 1980-an, istilah yang digunakan pada awalnya adalah *cultural industry* (industri budaya). Istilah ini digunakan karena pada waktu itu kebijakan yang dikembangkan adalah mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam bidang seni dan budaya atau disebut juga dengan istilah *cultural democracy* dengan mengembangkan seni „modern“ seperti musik populer sebagai „lawan“ atas seni yang „bercita rasa tinggi“ seperti opera, balet dan musik klasik, yang menciptakan kelompok eksklusif dalam masyarakat. Istilah industri budaya kemudian secara bertahap mengalami perkembangan menjadi *creative industry* (industri kreatif), yang menekankan kepada masalah “*individual talent and the generation of wealth and employment*”. Istilah ini kemudian lebih mengedepankan aspek individualisme dan hasil di bidang ekonomi daripada kolektivisme dan nilai-nilai sosial (Bilton C, 2007 dalam Antariksa Basuki, 2012 : 2).

Ditinjau dari aspek sejarah, istilah Industri Kreatif muncul pertama kali pada dekade tahun 1990-an di Australia dalam kaitannya dengan usulan untuk melakukan reformasi radikal di bidang justifikasi dan mekanisme pendanaan yang berkaitan dengan kebijakan di sektor seni dan budaya. Kendati demikian, istilah tersebut menjadi lebih dikenal luas ketika industri kreatif dikembangkan oleh Pemerintah Inggris. Pada dekade tahun 1980-an, *Inggris* mengalami sejumlah persoalan yaitu: tingkat pengangguran yang tinggi, berkurangnya aktivitas industri dan pengurangan kontribusi dana pemerintah untuk bidang seni. Maka diperkenalkanlah sebuah konsep, yaitu *culture as an industry*(Roodhouse S, 2011 dalam Antariksa Basuki, 2012 : 2).Melalui konsep ini, seni dan budaya tidak lagi dilihat sebagai sektor-sektor yang selalu membutuhkan subsidi, melainkan justru

didesain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan inovasi.

Ditinjau dari aspek definisi, Pemerintah Inggris melalui *Department of Media, Culture and Sport*(DCMS) memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan industri kreatif adalah sebagai berikut:

“those activities which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property”.

Khususnya di Indonesia sendiri, seperti yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak digunakan istilah industri kreatif melainkan *ekonomi* kreatif. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut menurut Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah "...kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia". Dari definisi ini Departemen Perdagangan RI mendalami lebih jauh bagaimanacaramenghitungnya, maka didapatkan salah satu metode penghitungandengan cepat dengan menggunakan data sekunder yaitu berbasis KBLI (data dari BPS). Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek.

Departemen Perdagangan RI (2008) mengidentifikasi setidaknya ada 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu:

1. **Periklanan**; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar,

perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi kampanye relasi public, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan *delivery advertising materials* atau sampel, serta penyewaan kolom untuk iklan.

2. Arsitektur; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya, konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (town planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya; arsitektur taman, desain interior).
3. Pasar barang seni; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film indie-dokumenter, seni rupa dan lukisan.
4. Kerajinan (handicraft); kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).
5. Desain; kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi

identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

6. Fashion; kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.
7. Film, video, dan fotografi; kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, pameran film.
8. Permainan interaktif; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.
9. Musik; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara atau lagu.
10. Seni pertunjukan; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tari tradisional, tari kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
11. Penerbitan dan percetakan; kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, material, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup

penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12. Layanan komputer dan piranti lunak; kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras serta desain portal termasuk perawatannya.
13. Radio dan televisi; kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.
14. Riset dan pengembangan; kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar ternasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

Dari data tersebut, menurut Puguh Setyo Nugroho dan Malik Cahyadin dalam jurnalnya Analisis Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia (2014 : 4), terdapat 14 subsektor yang dapat dijabarkan angka-angka kontribusinya ekonominya. Definisi lain yang menyangkut industri kreatif adalah *creativity*, *skill*, dan *talent*, yaitu:

- *Creativity (or creativeness) is a mental process involving the generation of new ideas or concepts, or new associations*

between existing ideas or concepts.

- *A Skill is the ability or talent to perform a task well or better than average.*
- *Talent is a personal gift/skill.*

2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Komunitas

2.2.1. Definisi Komunitas

Perwira Mulia (2015) mengatakan bahwa komunitas (*Communities-of-Practice*) adalah sebuah konstruksi sosial yang dibangun berdasar atas *initial-interest* dan tujuan yang sama pada sebuah ikhtiar (Wenger, 1998) yang membentuk identitas (Nobre, 2006) komunitas tersebut. Mereka tidak hanya saling berbagi pengetahuan, namun juga keterampilan. Sekarang ini banyak bermunculan banyak komunitas. Fenomena sosial ini banyak ditanggapi positif seiring tidak mampunya konstruksi sosial lain seperti ormas, geng, paguyuban, perkumpulan, kelompok, arisan dan sebagainya untuk berkontribusi dalam perubahan yang positif di masyarakat.

Kebanyakan anggota Komunitas adalah orang-orang yang memiliki *resources* pengetahuan dan dana, dimana sekarang ini diasumsikan sebagai golongan kelas-menengah (*middle class*). Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial dan berjuang untuk melakukan sesuatu. Idealisme membawa Komunitas ke dalam bentuk yang *in-between* antara kaum aktivis dan hedonis. Sebuah idealisme aktivis ditawarkan melalui cara yang lebih *soft* yang mampu menggerakkan hedonis yang jarang peduli terhadap sesama.

Locus-of-control tersebut membawa Komunitas memperjuangkan idealisme masing-masing karena melihat bahwa hal tersebut adalah sebuah peluang (*opportunity*).

Dalam domain entrepreneurship, masih jarang dilakukan research terhadap Komunitas (Davidsson, 2004 dalam Perwira Mulia A, 2015). Padahal, mereka membawa newness dan new-offering kepada masyarakat luas. Oleh karena pesan yang dibawa oleh Komunitas berupa pengembangan ilmu pengetahuan, maka Komunitas juga berperan penting dalam mengubah pola pikir (mindset) dan perilaku (behaviour).

Pendekatan psikologis kreatif digunakan sebagai tools yang dianggap menyentuh hati masyarakat agar timbul awareness. Pendekatan agama pun digunakan pada Komunitas pencari rezeki yang berusaha mengubah pola pikir bahwa peluang tidak selalu tentang uang dan rizki tidak selalu tentang materi. Beberapa Komunitas yang telah matang dan dewasa ada yang mengembangkan diri menjadi sebuah social enterprise. Dengan tetap mempertahankan idealisme, mereka hanya mengubah bentuk pergerakannya saja. Hal ini dapat membedakan antara mana yang benar-benar social enterprise dan mana yang business enterprise. Masyarakat luas dapat memanfaatkan Komunitas bukan hanya sebagai ajang ekspresi diri, namun juga pengembangan diri. Kesetaraan yang disepakati dalam modal sosial (social capital) masing-masing Komunitas, memungkinkan sebuah distributed-leadership (Retna & Ng, 2011 dalam Perwira Mulia A, 2015).

Dalam konteks regional/local economic development, Komunitas juga berperan penting. Tumbuhnya Komunitas Kreatif memungkinkan ide-ide baru dapat dieksploitasikan. Sebuah tren baru dalam pertumbuhan ekonomi yang sama pentingnya seperti sebuah energi baru terbarukan. Energi dalam Komunitas adalah semangatnya. Hal yang cukup

langka pada sebuah daerah yang ekonominya stagnan dan mengandalkan resources terbatas. Komunitas dapat dibentuk di manapun. Dalam nuansa continuum Schumpeterian dan Kirznerian, Komunitas tidak harus dibangkitkan dari middle-class berduit kuat namun dapat juga dari yang berilmu kuat. Sebagai sebuah entitas sosial, Komunitas dapat berkontribusi mengisikesejangan yang belum dapat ditangani baik oleh Akademisi, Pemerintah maupun Kalangan Bisnis (triple helix). Mereka sekarang tidak hanya sebagai objek, namun bergerak menjadi subjek dalam pembangunan.

Benih-benih kreativitas dan kemandirian yang dipelihara dan dibangun dalam Komunitas dapat menjadi awal yang baik bagi tumbuhnya entrepreneur (creativepreneur, sociopreneur dan sebagainya). Selain mendorong diri sendiri untuk berkembang menjadi entrepreneur, Komunitas juga dibantu oleh inkubator. Sayangnya, belum banyak inkubator yang sangat khusus menangani enterprise yang diinisiasi oleh Komunitas. Hal ini menjadi masalah ketika dalam paradigma sekarang, bisnis adalah lawan bagi perjuangan komunitas. Favorable environment (Taormina & Lao, 2007 dalam Perwira Mulia A, 2015) merupakan pemersatu Komunitas dalam satu klaster interest. Jika initial-interest merupakan sebuah center-of-excellence masing-masing Komunitas, maka sebaiknya egoisme pribadi perlu disingkirkan, sehingga bisa berkolaborasi dengan Komunitas lain agar terjadi sharing-knowledge. Dengan demikian, nilai perjuangan dan pesan yang dibawa bisa dikreasikan dengan bentuk yang lebih bervariasi.

2.2.4. Teori Karakteristik Kewirausahaan

Mendefinisikan kewirausahaan dalam ranah kebudayaan dan industri kreatif sebagai sebuah organisasi sektoral dalam struktural ekonomi tradisional yang kuat, seperti definisi berikut: (HKU Jurnal *The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries*, 2010: 10).

"Entrepreneurship in these sectors means to have creative ideas and to pursue them in a commercial way, with the purpose to make a profit. However, the profit alone is not the drivers; it is the creativity and the possibility to build something, the self-fulfilment or being able to pursue your own creative interests. There is a mix between the entrepreneurial side and the creative side". (Sectoral Organisation, Structurally Strong Traditional Economy).

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumberdaya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan menurut Drucker (1959, Dalam Sandiasa, G, 2009 : 6) adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Karya dan karsa hanya terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Tidak sedikit orang dan perusahaan yang berhasil meraih sukses karena memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Jadi kewirausahaan merupakan suatu sumberdaya dengan cara-cara baru dan berbeda seperti:

- 1) Pengembangan teknologi;
- 2) Penemuan pengetahuan ilmiah;
- 3) Perbaikan produk barang dan jasa yang ada;
- 4) Menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan produk yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

Konsep dari kewirausahaan budaya telah mendapatkan

perhatian selama dekade terakhir. Model yang berbeda telah dimasukkan ke depan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang sistematis dari karakteristik struktural industri budaya dan kreatif, dengan demikian membentuk sebuah definisi umum kewirausahaan budaya dan kreatif. Ini adalah tugas yang sulit karena menggabungkan istilah yang tampaknya berbeda dan menimbulkan tantangan persimpangan budaya dan ekonomi. Wacana untuk mendefinisikan sebuah istilah yang berbeda dengan mengambil komponen dari kedua dunia tersebut dan memahami spesifikasi dukungan yang diperlukan (*HKU Jurnal The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries*, 2010: 10).

2.2.5. Definisi Karakteristik Kewirausahaan

Wirausaha umumnya mempunyai sifat, ciri dan watak yang sama. Mereka adalah yang mempunyai tenaga, keinginan untuk terlibat dalam sebuah peluang inovatif, kemauan untuk menerima tanggung jawab pribadi, dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan untuk berprestasi yang sangat tinggi. Menurut William D. Bygrave (1996, dalam Aziz, Noor, 2007:10) menyatakan bahwa seorang wirausahawan (*entrepreneur*) adalah seorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejar peluang tersebut melalui sebuah proses kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang menyangkut segala fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi itu sendiri. Seorang entrepreneur mendapatkan ide atau gagasan melalui pengalaman masa lalu atau pekerjaan yang pernah ditekuninya sampai dengan saat ini. Lebih lanjut, melalui pendapat Arjo Klamer (2011: 155) dalam *Jurnal Cultural Entrepreneurship* menyatakan bahwa seorang wirausahawan budaya yang baik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mereka waspada terhadap munculnya peluang (Kirzner).
2. Mereka kreatif dalam ranah dari konten artistik juga dalam mengorganisir sebuah SDM ataupun relasi dan mengatur finansial.
3. Konten artistik adalah hasrat dan komitmen mereka, selain itu, faktor ekonomi merupakan tambahan.
4. Mereka persuasif dalam arti bisa meyakinkan dengan cara yang baik agar seniman mau diajak bekerja dengan mereka, mengaitkan tentang minat dalam seni, mendapatkan individu yang mau terlibat (misalnya, relawan) dan,
5. Mereka bijaksana dan menunjukkan keberanian, harapan dan keyakinan dalam tindakan mereka. (cf. McCloskey: 2006).

Tumbuh dan kembangnya suatu kewirausahaan sangat ditentukan oleh faktor internal atau faktor bawaan dan faktor eksternal atau faktor lingkungan yang melingkupi kewirausahaan tersebut. Adapun faktor- faktor menurut Hakim Arman, dkk. (2001 dalam Aziz, Noor, 2007: 12) yang mempengaruhi jiwa wirausaha yakni:

- a. Intelegensia, yaitu kemampuan individu secara sadar untuk menyesuaikan pemikirannya terhadap tuntutan baru yaitu kemampuan menyesuaikan mental terhadap masalah dan keadaan baru. Intelegensia berkaitan dengan pemecahan masalah, perencanaan dan pengejaran prestasi yang sangat berarti dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
- b. Latar belakang budaya, secara tidak langsung tingkah laku manusia dibatasi oleh norma atau nilai budaya setempat. Kebudayaan adalah cara manusia membentuk dan melihat lingkungannya dan sebaliknya, budaya adalah hasil dari perilaku manusia sekaligus membentuk dan menentukan perilakunya sendiri maupun kelompok.
- c. Tingkat pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang,

semakin luas wawasan dan pengetahuan seseorang dan semakin mudah menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya.

- d. Usia, dimana kepribadian manusia bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia. Makin berumur seseorang diharapkan semakin mampu mengendalikan emosinya, dan sifat- sifat lainnya yang menunjukkan kematangan intelektual dan psikologinya.
- e. Pola asuh keluarga, juga sangat menentukan perkembangan jiwa wirausaha yang terlatih, dibiasakan hidup mandiri, bekerja keras dan pantang menyerah sedari dini, akan memberikan pengalaman dan ketrampilan yang berharga baginya kelak di kemudian hari.

2.2.6. Motivasi

Menjadi seorang *entrepreneur* sering dipandang sebagai pilihan karir yang menantang, dimana seseorang menghadapi kehidupan sehari – hari dalam situasi kerja yang penuh dengan rintangan kerja, kegagalan, ketidakpastian, dan frustrasi yang dihubungkan dengan proses pembentukan usaha yang dilakukan. Gilad dan Levine (Gilad dan Levine dalam Widhari dan Suarta, 2012: 55) mengemukakan dua teori berkenaan tentang dorongan untuk berwirausaha, "*push*" *theory* dan "*pull*" *theory*.

Menurut *push theory*, setiap individu didorong untuk menjadi wirausahawan oleh faktor-faktor eksternal yang bersifat negatif, seperti ketidakpuasan kerja, kesulitan mendapatkan pekerjaan (bekerja pada orang lain), gaji yang tidak memadai, atau jadwal kerja yang tidak fleksibel. Sebaliknya *pull theory* berargumentasi bahwa orang tertarik untuk menjadi wirausahawan karena hasratakan kemandirian, kebebasan, aktualisasi diri, keberhasilan, kekayaan, atau hal lainnya yang

cenderung bersifat positif.

Sardiman A.M (2011), mengatakan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Sedangkan menurut Basrowi (2014) motivasi berasal dari kata motif yang berarti suatu keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melaksanakan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu hal dan keadaan yang datang dari dalam diri dan merupakan pendorong untuk melakukan kegiatan, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu dan merupakan pengaruh dari orang tua atau lingkungan.

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu:



Gambar 2. 1 Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow

Sumber: Matthew H. Olson & B.R. Hergenhahn (2013)

- 1) Kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan diri seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan biologis lainnya, seperti seks maupun berfungsinya anggota tubuh (kesehatan).
- 2) Kebutuhan akan rasa aman, mencakup rasa aman dalam pengertian yang luas, misalnya kewangannya tidak dikurangi, tidak terancam degradasi, penghasilan tidak berkurang dan sebagainya.
- 3) Kebutuhan rasa cinta, meliputi keinginan untuk berbagi kasih sayang pada sesama, diterima oleh lingkungan, dicintai orang lain dan mencintai orang lain.

- 4) Kebutuhan akan harga diri, misalnya kebutuhan untuk dikenali dan dihargai dan juga rasa bangga.
- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengekspresikan diri, bakat, hobi, ide-ide, pikiran dan kemampuan-kemampuan. Kebutuhan manusia menurut teori Maslow dapat dipilih menjadi dua kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan dasar (fisiologis), dan kebutuhan akan rasa aman. Sedangkan kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Teori motivasi juga dikembangkan oleh McClelland (dalam Daft,2011). Dalam teori ini, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui motivasi memenuhi kebutuhan manusia dalam berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi ini ada karena orang-orang memiliki dorongan kuat untuk berhasil. Mereka lebih mengejar prestasi pribadi ketimbang imbalan terhadap keberhasilannya. Mereka bergairah untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

Mc Clelland (dalam Daft,2011) menemukan bahwa mereka dengan dorongan prestasi yang tinggi berbeda dari orang lain dalam keinginan kuat mereka untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik. Mereka mencari kesempatan-kesempatan dimana mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban- jawaban terhadap masalah. Mereka yang memiliki kebutuhan berprestasi lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang dimana mereka memiliki tanggung jawab pribadi, akan memperoleh balikan dann tugas pekerjaannya memiliki resiko yang sedang. Dalam penelitiannya, McClelland (dalam Daft,2011) menemukan bahwa mereka yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi paling tinggi adalah para wirausahawan yang

berhasil. Sebaliknya ia tidak menemukan adanya manajer dengan kebutuhan prestasi yang tinggi.

Kebutuhan untuk berkuasa juga merupakan kebutuhan dari teori McClelland, kebutuhan berkuasa adalah adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain. Orang yang ingin kekuasaannya besar adalah mereka yang suka untuk menjadi pemimpin. Kebutuhan untuk berafiliasi adalah teori ketiga milik Mc Clelland, kebutuhan ini yang paling sedikit mendapat perhatian untuk diteliti. Orang dengan kebutuhan berafiliasi yang tinggi adalah orang yang berusaha mendapat persahabatan.

Mereka ingin disukai orang lain dan menghindari konflik. Berdasarkan semua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah semua kekuatan yang memberi energy, daya, arah, dan dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan, baik pemenuhan kebutuhan atau pencapaian kepuasan.

Atkinson (2011) mengusulkan ada tiga macam dorongan mendasar dalam diri orang yang termotivasi :

1. Kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*), adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan. *Entrepreneur* yang berorientasi dan bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka, apabila hanya terdapat sedikit resiko gagal, dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi diwaktu lalu.
2. Kebutuhan kekuatan (*need for power*), dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan mengubah situasi. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan ingin menimbulkan

dampak dan mau memikul resiko untuk melakukan hal itu.

3. Kebutuhan untuk berafiliasi (*need for affiliation*), dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar social. Orang-orang yang bermotivasi afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerja sama mereka yang menyenangkan.

Keseimbangan antara ketiga dorongan ini bervariasi dari orang yang satu ke orang yang lain. Misalnya, seseorang mungkin mempunyai kebutuhan untuk berafiliasi yang kuat, sementara orang lain mempunyai kebutuhan berprestasi yang kuat. Selain ketiga dorongan itu, motivasi seorang individu juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal adalah :

1. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri
2. Harga diri
3. Harapan pribadi;
4. Kebutuhan
5. Keinginan;
6. Kepuasan kerja
7. Prestasi kerja yang dihasilkan.

Minat karir berwirausaha pada seseorang dibentuk melalui pengalaman langsung atau pengalaman yang mengesankan dan hal ini akan menyediakan kesempatan bagi individu untuk mempraktekkan, memperoleh umpan balik dan mengembangkan keterampilan yang mengarah pada efikasi personal dan pengharapan atas hasil yang memuaskan (Lent, Brown dan Hacket, dalam Farzier dan Niehm, 2008). Faktor penting yang mempengaruhi pengembangan karir dalam diri seseorang adalah pengaruh keluarga, pendidikan dan faktor lingkungan.

Menurut peneliti terdahulu yang dijalankan oleh Richard

Denanyoh, Kwabena Adjei, dan Gabriel Effah Nyemekye terdapat 3 variabel yang di dalam masing- masing variabel tersebut terdapat 3 dimensi dan indikasi-indikasi yang mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha. Variabel-variabel tersebut adalah:

Faktor pendidikan wirausaha merupakan sumber dari sikap wirausaha dan keseluruhan minat untuk menjadi wirausaha di masa yang akan datang. Pendidikan bisa mempengaruhi sikap mahasiswa untuk berwirausaha dan efikasi diri kewirausahaan mereka. Kurangnya paparan pendidikan kewirausahaan dapat menyebabkan rendahnya tingkat niat kewirausahaan mahasiswa. Mekanisme dukungan universitas berperan penting terhadap kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Pendidikan kewirausahaan difokuskan pada pengembangan siswa dengan semangat dan beberapa keterampilan.

BAB III METODE KEGIATAN

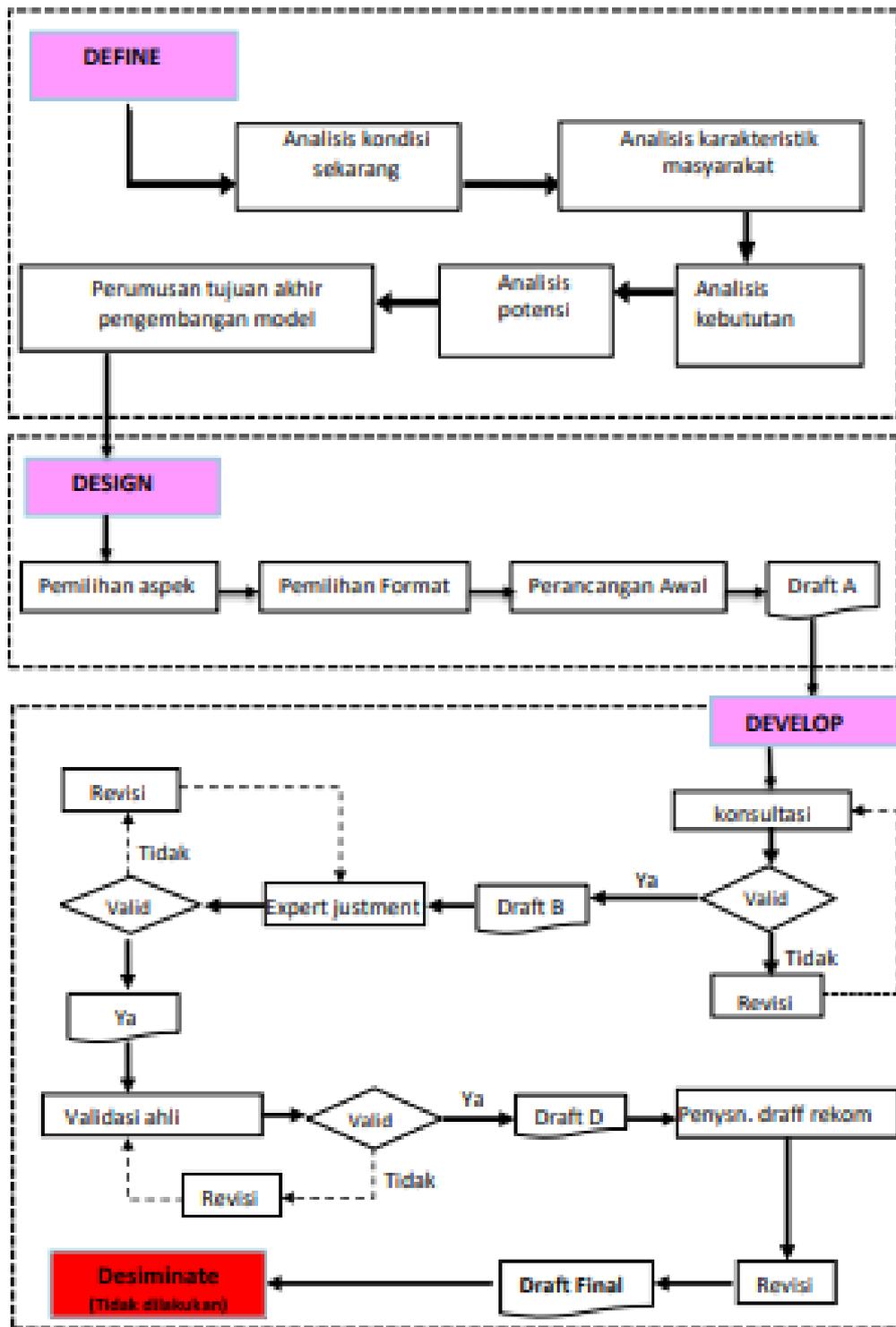
3.1 Rancangan Pengembangan

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan 4-D (*four-D Models*). Peneliti memilih menggunakan model 4-D karena model 4-D ini cocok untuk mengembangkan model, langkah atau tahapan pengembangannya sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan mudah diterapkan dalam proses pengembangannya. Model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pengembangan.

3.2 Prosedur Pengembangan

Model 4-D terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu tahap pendefinisian (*define*), tahap perencanaan (*Design*), tahap pengembangan (*develop*), dan tahap pendiseminasian (*Disseminate*) Thiagarajan, Semmel dan Semmel (Trianto, 2014). Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan 4-D yang telah dimodifikasi sehingga terdiri atas tiga tahap yaitu tahap pendefinisian (*define*), tahap perencanaan (*design*), dan tahap pengembangan (*develop*) dengan prosedur penelitian yang disusun sebagai berikut:

- 1) Tahap *Define* terdiri dari analisis awal akhir, analisis karakteristik masyarakat, analisis materi, analisis tugas, perumusan tujuan penguatan program.
- 2) Tahap *Design* terdiri dari pemilihan media, pemilihan format, rancangan awal.
- 3) Tahap *Develop* terdiri dari konsultasi, validasi ahli, revisi desain, uji coba. Tahap pengembangan model dengan menggunakan model 4-D yang telah dimodifikasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema di bawah ini.



Gambar 3. 1 Model Pengembangan 4D

Keterangan Gambar

 : Garis pelaksanaan (arah proses)

 : Garis siklus(jika diperlukan)

 : Jenis kegiatan (proses)

 : Pengambilan keputusan

 : Hasil kegiatan (dokumen)

 : Tahap yang tidak dilakukan

3.3 Langkah-Langkah Pengembangan

3.3.1 Tahap *Define* (Pendefinisian)

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Analisis awal-akhir

Kegiatan analisis awal-akhir dilakukan untuk menetapkan masalah dasar yang diperlukan dalam pengembangan model. Pada tahap ini dilakukan analisis pengembangan program penguatan sosial, menentukan kompetensi sosial yang harus dimiliki masyarakat, dan model pengembangan sehingga diperoleh deskripsi pola penguatan program yang dianggap paling sesuai.

2) Analisis Karakteristik Masyarakat

Sebelum mengembangkan model, terlebih dahulu harus mengenali karakteristik masyarakat, hal ini penting karena semua proses penguatan program harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengembangan model, karakteristik masyarakat perlu diketahui untuk menyusun model yang sesuai dengan potensi masyarakat.

3) Analisis potensi

Analisis materi bertujuan untuk mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan dipelajari oleh masyarakat berdasarkan analisis awal-akhir. Analisis ini menjadi dasar dalam menyusun tujuan penguatan program.

4) Analisis harapan

Analisis tugas adalah tahapan pengidentifikasian tugas / keterampilan- keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan penguatan program. Analisis tugas disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil pengembangan.

5) Perumusan tujuan penguatan program

Tahap ini dilakukan untuk merumuskan indikator pencapaian hasil pengembangan menjadi tujuan penguatan program khusus yang merupakan dasar dalam menyusun rancangan model.

3.3.2 Tahap *Design* (Perancangan)

Pada tahap design ini, terdapat beberapa langkah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Pemilihan Media

Kegiatan pemilihan media dilakukan untuk menentukan media yang tepat dalam penyajian materi model, alat dan sumber pengembangan yang mendukung.

2) Pemilihan Format

Format awal bahan ajar model dimulai dari penentuan sampul depan, penyusunan model hingga sampul belakang.

3) Perancangan Awal

Perancangan awal yaitu merancang fisik model agar lebih menarik dan termotivasi untuk mempelajari model yang dikembangkan. Pada tahap ini akan menghasilkan suatu produk awal yang akan diuji.

3.3.3 Tahap *Develop* (Pengembangan)

Pada tahap ini tindakan yang dilakukan adalah memvalidasi, menguji praktikalitas dan efektifitas model.

1) Konsultasi

Tahap konsultasi bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap model yang dihasilkan setelah melakukan perancangan awal. Pada tahap ini peneliti akan meminta arahan dan masukan dari ahli.

2) Tahap Validasi Ahli

Setelah produk melewati tahap konsultasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan validasi produk. Ada empat aspek yang perlu divalidasi, kesesuaian, efektivitas, ketercapaian, dan keberlanjutan. Tahap validasi ini bertujuan untuk melihat kevalidan model yang dikembangkan. Pada tahap validasi ini akan diperoleh saran dan pendapat dari tim ahli, yang mana saran dan pendapat akan digunakan untuk merevisi model. Model akan terus direvisi berdasarkan saran dan pendapat ahli sampai tim ahli menyatakan bahwa model layak digunakan tanpa revisi, sekaligus memperoleh draft final atau draft akhir.

3.3.4 Tahap *Diseminate*

Pada penelitian ini, tahap disseminate tidak dilakukan karena alasan finansial berupa keterbatasan program kegiatan.

3.4 Penilaian Produk

Tujuan dari penilaian produk ini yaitu untuk mendapatkan data yang akurat yang digunakan untuk melakukan revisi (perbaikan), menetapkan tujuan kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan produk yang dihasilkan. Tahap penilaian pada pengembangan ini melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap konsultasi

Tahap konsultasi terdiri dari beberapa kegiatan berikut.

- a) Ahli yang akan melakukan pengecekan terhadap model yang telah dikembangkan, kemudian memberikan arahan dan saran untuk melakukan terhadap revisi model yang dihasilkan.
 - b) Pengembang melakukan perbaikan model berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilakukan.
- b. Tahap validasi ahli

Tahap validasi ahli terdiri dari beberapa kegiatan berikut:

- a) Validasi model oleh para ahli
- b) Pengembang melakukan revisi terhadap model sesuai kritik, saran dan pendapat para ahli.

3.5 Karakteristik Subjek

Dalam penelitian ini, subjek dalam kegiatan ini yakni: Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Lahat.

3.6 Jenis Data Penilaian

Jenis data penilaian dalam pengembangan model ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif.

Data kualitatif berasal dari kritik, saran, dan komentar dari para ahli dan responden.

- b. Data kuantitatif.

Data kuantitatif diperoleh dari angket dan tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian masyarakat setelah menggunakan model.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Validitas

Untuk melihat kevalidan dari model yang dikembangkan digunakan instrumen berupa angket untuk validasi. Angket untuk validasi model ini terdiri dari angket validasi kelayakan isi, angket validasi kelayakan penyajian, angket validasi kelayakan bahasa dan angket validasi kelayakan kegrafikan yang akan dinilai oleh validator.

Hasil analisis data kuantitatif dilakukan triangulasi secara kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif. Menurut Pawito analisis data dalam penelitian komunikasi kualitatif pada dasarnya dikembangkan dengan maksud hendak memberikan makna (making sense) terhadap data, menafsirkan (interpretating), atau mentransformasikan (transforming) data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (thesis) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

3.7.2 Reduksi Data

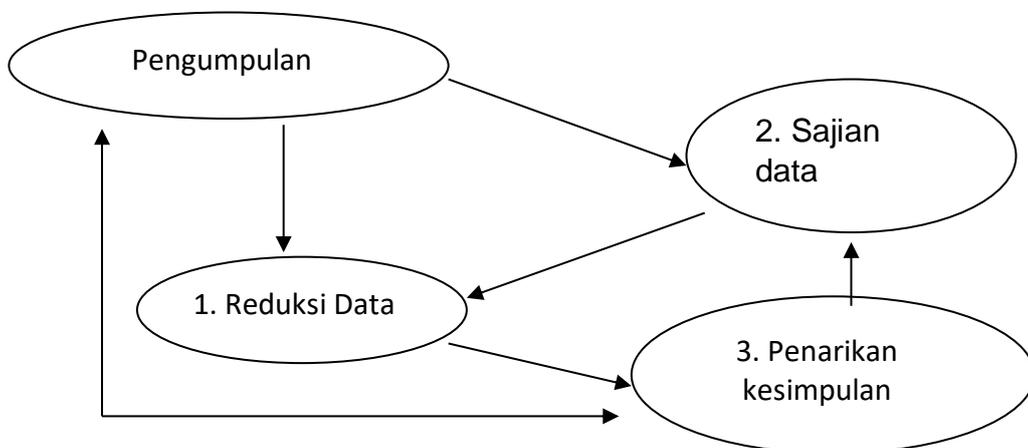
Reduksi dapat diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang menyederhanakan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakan data yang diperoleh.

1. Display data

Sementara itu display atau penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan sebuah penelitian. Suatu penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menyangkan data yang telah diperoleh untuk dijadikan sebagai petunjuk.

2. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penarikan kesimpulan harus longgar, terbuka dan skeptis. Pemeriksaan kembali tentang kebenaran data yang telah diperoleh.



Gambar 3. 2 Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1984)

BAB IV GAMBARAN KABUPATEN LAHAT

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lahat menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Lahat diperoleh gambaran karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Lahat.

4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

4.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Lahat yang dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan terdiri dari 24 kecamatan, 17 kelurahan, dan 360 desa, yang memiliki wilayah seluas 4.361,83 km². dengan batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan : Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim

Secara rinci luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 4.1.

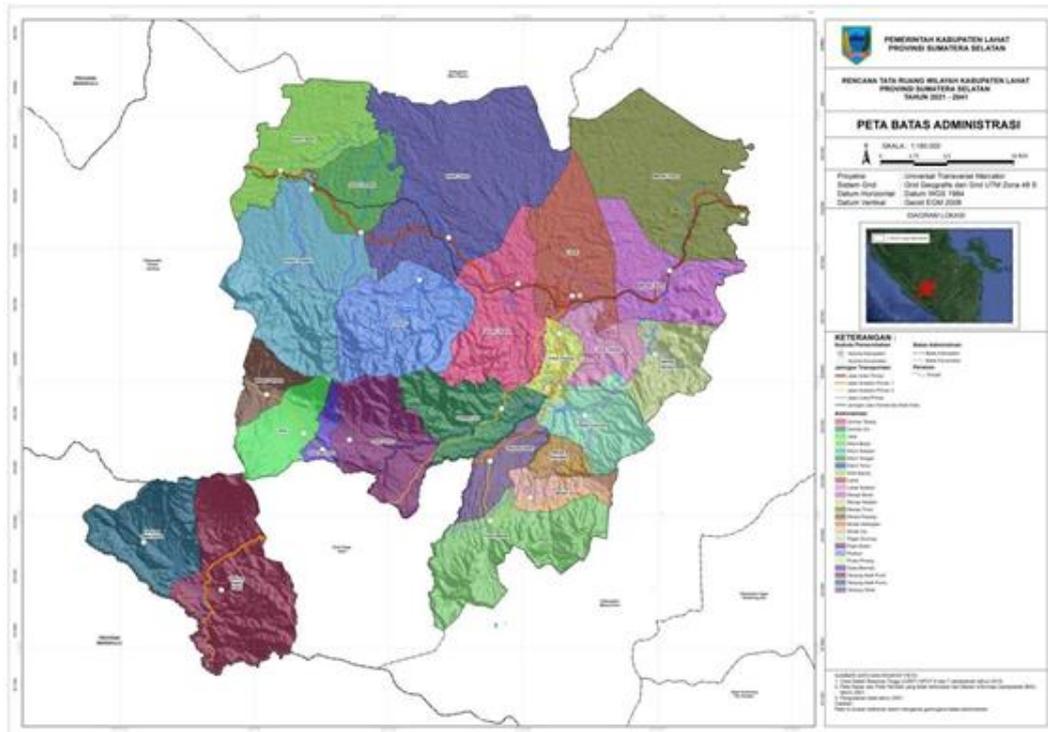
Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1	Tanjung Sakti PUMI	31.708,60	7,30	Pajar Bulan	18	66,35
2	Tanjung Sakti PUMU	17.815,46	4,10	Simpang III PUMU	14	66,97
3	Kota Agung	24.347,54	5,60	Kota Agung	22	32,59
4	Mulak Ulu	6.375,95	1,47	Muara Tiga	16	27,87
5	Tanjung Tebat	8.476,96	1,95	Tanjung Tebat	14	22,55
6	Mulak Sebingkai	3.885,44	0,89	Keban Agung	10	18,53
7	Pulau Pinang	5.299,55	1,22	Jati	10	3,3
8	Pagar Gunung	13.485,56	3,10	Karang Agung	20	15,86
9	Gumay Ulu	16.067,68	3,70	Tinggi Hari	10	17,13
10	Jarai	11.301,83	2,60	Pasar Jarai	21	41,53
11	Pajar Bulan	19.258,37	4,43	Sumur	20	36,60
12	Muara Payang	6.283,68	1,45	Lawang Agung	7	44,87
13	Suka Merindu	3.069,53	0,71	Suka Merindu	10	40,84
14	Kikim Barat	20.275,84	4,67	Saung Naga	19	46,14
15	Kikim Timur	52.507,20	12,08	Bungamas	32	20,57
16	Kikim Selatan	35.774,38	8,23	Pagar Jati	18	31,61
17	Kikim Tengah	12.635,59	2,91	Tanjung Aur	9	32,7
18	Lahat	20.737,51	4,77	Lahat	29	0
19	Gumay Talang	22.970,40	5,29	Sukarame	15	7,67
20	Lahat Selatan	8.672,12	2,00	Tanjung Payang	10	2,11
21	PSEKSU	25.391,40	5,84	Lubuk Mabar	11	21,69
22	Merapi Barat	18.754,23	4,32	Merapi	19	16,01
23	Merapi Timur	37.988,98	8,74	Lebuay Bandung	14	28,02
24	Merapi Selatan	11.404,29	2,62	Sukamerindu	9	14,50
Kabupaten		434.487,9	100	Lahat	377	-

Sumber: - BPS, Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2021

Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis berdasarkan Peta Rupabumi skala 1 : 50.000 pada garis terluar Kabupaten Lahat terletak antara 3°29'42,000"- 4°16'1,200" Lintang Selatan dan 102°54'54,000"-103°46'22,800" Bujur Timur. Dengan letak yang sangat strategis tersebut menjadikan Kabupaten Lahat sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan merupakan jalur transportasi nasional Lintas Tengah Sumatera (Trans Jakarta – Lampung – Baturaja – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Bengkulu atau Padang). Secara rinci batas administrasi Kabupaten Lahat dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lahat

4.1.1.2 Topografi

Topografi Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut bervariasi mulai dari 25 meter hingga 1.000 meter. Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Lahat, Merapi Barat, dan Merapi Timur dengan ketinggian 25 meter sampai 100 meter. Sedangkan kecamatan dengan dataran tinggi dari permukaan laut meliputi Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Jarai, Pajar Bulan, dan Muara Payang. Secara rinci ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut, dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota <i>Distance to the Capital of Regency/ Municipality</i>
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	500-1000	66,35
Tanjung Sakti Pumu	500-1000	66,97
Kota Agung	500-1000	32,59
Mulak Ulu	100-1000	27,87
Tanjung Tebat	100-1000	22,55
Mulak Sebingkai	-	18,53
Pulau Pinang	100-500	3,37
Pagar Gunung	100-500	15,86
Gumay Ulu	100-500	17,13
Jarai	500-1000	41,53
Pajar Bulan	500-1000	36,60
Muara Payang	500-1000	44,87
Sukamerindu	500-1000	40,84
Kikim Barat	100-500	46,14
Kikim Timur	100-500	20,57
Kikim Selatan	100-500	31,61
Kikim Tengah	100-500	32,74
Lahat	25-100	-
Gumay Talang	100-500	7,67
Lahat Selatan	-	2,11
Pseksu	100-500	21,69
Merapi Barat	25-100	16,01
Merapi Timur	25-100	28,02
Merapi Selatan	25-100	14,50
Kabupaten Lahat <i>Lahat Regency</i>	-	-

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.1.1.3 Geologi

Kabupaten Lahat termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan tatanan tektoniknya menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Jenis struktur yang umum dijumpai di cekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Pembentukan struktur

lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon.

Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tercier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Secara geologi daerah Kabupaten Lahat tersusun atas formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi jenis tanah aluvial, regosol, andosol, latosol, asosiasi litosol dan latosol serta komplek tanah podsolik dan litosol yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis tanah aluvial sangat cocok untuk tanaman sawah, kebun campuran, tegalan, alang-alang/semak belukar. Sedangkan jenis tanah andosol dan latosol cocok digunakan untuk tanaman padi, jagung, kopi, karet, coklat, tanaman buah-buahan dan umbi-umbian.

4.1.1.4 Hidrologi

Secara umum Kabupaten Lahat memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan adalah sumber air yang berada di atas permukaan tanah yang memenuhi persyaratan layak untuk dikonsumsi seperti sungai, danau dan tadah hujan. Beberapa sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi Sungai Lematang, Sungai Air Mulak, Sungai Endikat, Sungai Kikim, Sungai Lingsing, Sungai Pangi, Sungai Serelo, Sungai Air Keruh, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Masyarakat yang tinggal sepanjang pinggiran sungai memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap keberadaan sungai tersebut dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Sebagian masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih untuk dijadikan air minum. Pada saat musim kemarau, jumlah masyarakat

yang memanfaatkan air sungai menjadi meningkat.

Sumber daya air tanah adalah sumber daya air yang terdapat di dalam tanah. Air tanah adalah sumber air yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat dipergunakan baik untuk keperluan sehari-hari, irigasi ataupun industri tentu saja jika memenuhi persyaratan kualitas dan debitnya memenuhi kebutuhan.

4.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Lahat memiliki iklim tropis atau 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2017, rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan setiap bulan di Kabupaten Lahat yaitu 93.36 per hari dan 266.29 mm. Jumlah curah hujan rata-rata paling sedikit terjadi di Kecamatan Merapi Timur sebanyak 183 per hari dan 69 mm, sedangkan rata-rata jumlah curah hujan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Pulau Pinang sebanyak 396 per hari dan 82 mm.

Tabel 4. 3 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Total		Rata-Rata	
		HH	CH	HH	CH
1	Tanjung Sakti Pumi	23 7	3.29 0	119	274
2	Tanjung Sakti Pumu	25 0	4.58 3	125	382
3	Kota Agung	18 8	3.33 1	94	278
4	Mulak Ulu	19 1	3.15 3	96	263
5	Tanjung Tebat	15 5	2.95 8	78	247
6	Pulau Pinang	16 4	4.74 7	82	396
7	Pagar Gunung	21 8	3.87 5	109	323
8	Gumay Ulu	10 3	2.78 2	52	232
9	Jarai	20 7	3.34 0	104	278
10	Pajar Bulan	27 4	3.34 1	137	278
11	Muara Payang	20 5	3.12 7	103	261
12	Sukamerindu	-	-	-	-
13	Kikim Barat	17 8	2.99 9	89	250

14	Kikim Timur	18 8	3.71 8	94	310
15	Kikim Selatan	24 2	2.90 4	121	242
16	Kikim Tengah	17 2	3.22 6	86	269
17	Lahat	20 5	3.77 0	103	314
18	Gumay Talang	20 6	4.20 0	103	350
19	Pseksu	23 6	3.50 8	118	292
20	Merapi Barat	16 4	2.58 1	82	215
21	Merapi Timur	13 8	2.19 3	69	183
22	Merapi Selatan	18 7	2.67 4	94	223
23	Lahat Selatan	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-
	Jumlah	70. 30 0	4.10 8	5.858	2.05 4
	Rata-Rata	3.1 95, 45	186, 73	266,2 9	93,3 6

Keterangan:

- Data masih tergabung dengan kecamatan induk, CH = Curah Hujan, HH = Hari Hujan

4.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat berdasarkan fungsinya dibagi menjadi lahan pertanian dan bukan lahan pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Lahat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		(Km ²)	%
1	Lahan Pertanian		

	a. Irigasi	159,42	3,65
	b. Tadah Hujan	15,70	0,36
	c. Rawa Pasang Surut	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-
2	Bukan Lahan Pertanian		
	a. Bangunan Permukiman	464,56	10,65
	b. Tegal	202,03	4,63
	c. Ladang	36,68	0,84
	d. Perkebunan	1.567,69	35,94
	e. Hutan Rakyat	544,10	12,47
	f. Hutan Negara	288,06	6,60
	g. Padang Rumput	224,12	5,14
	h. Tidak ditanami apapun	431,22	9,89
	i. Lainnya	148,71	3,41
	j. Pertambangan	279,54	6,41
	Jumlah	4.361,83	100,00
	h		

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lahat

Dari table di atas luas wilayah terbagi menjadi beberapa kecamatan, seperti tergambar pada table berikut:

Tabel 4. 5 Luas Area Kecamatan di Kabupaten Lahat

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas ¹ Total Area ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	Pajar Bulan	271,00
Tanjung Sakti Pumu	Simpang III PUMU	229,59
Kota Agung	Kota Agung	165,59
Mulak Ulu	Muara Tiga	108,43
Tanjung Tebat	Tanjung Tebat	82,72
Mulak Sebingkai	Keban Agung	63,41
Pulau Pinang	Jati	111,67
Pagar Gunung	Karang Agung	105,51
Gumay Ulu	Tinggi Hari	87,01
Jarai	Jarai	167,52
Pajar Bulan	Sumur	146,11
Muara Payang	Lawang Agung Lama	37,50
Sukamerindu	Sukamerindu	55,23
Kikim Barat	Saung Naga	272,00
Kikim Timur	Bungamas	564,45
Kikim Selatan	Pagar Jati	124,80
Kikim Tengah	Tanjung Aur	265,60
Lahat	Lahat	107,60
Gumay Talang	Sukarame	249,61
Lahat Selatan	Tanjung Payang	183,87
Pseksu	Lubuk Mabar	269,29
Merapi Barat	Merapi	232,64
Merapi Timur	Lebuay Bandung	260,55
Merapi Selatan	Sukamerindu	200,14
Kabupaten Lahat		4 361,84

Sumber : Kabupaten Lahat dalam Angka 2021

4.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik Kabupaten Lahat maka dapat diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan rencana perubahannya dalam Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032, bahwa kawasan lindung meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 44.528 (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu. Kawasan lindung terdiri dari:

- a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
 - Kawasan Hutan Lindung, meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kikim Barat, Jarai, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung dan Mulak Ulu.
 - Kawasan Resapan Air, meliputi: kawasan resapan air yang terdapat hutan lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah, Gumai Tebing Tinggi, Bukit Serelo dan Hutan Lindung Bukit Napal.
- b) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - Kawasan Sempadan Sungai, meliputi Sungai Lematang, Sungai Kikim, Sungai Endikat, dan Sungai Manna dengan luas kurang lebih 7.142 hektar dan ketentuan jarak kawasan sempadan sungai selebar 100 meter kiri kanan untuk sungai besar dan 50 meter di kiri kanan untuk sungai kecil, serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman.
 - Ruang Terbuka Hijau Kota dengan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimum 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau privat seluas minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

- c) Kawasan konservasi, meliputi:
- Taman Wisata Alam Bukit Serelo dengan luas kurang lebih 210 hektar.
 - Suaka Margasatwa Gumai Pasemah dengan luas kurang lebih 46.123 hektar.
 - Suaka Margasatwa Isau Pasemah dengan luas kurang lebih 16.998 hektar.
- d) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi, Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Jarai, Kecamatan Muara Payung, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Pseksu, Kecamatan Gumay Talang, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Kawasan rawan bencana gerakan tanah berlokasi di Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Tengah, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Kawasan rawan bencana letusan gunung api berlokasi di Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
 - Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.
 - Kawasan rawan gempa bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.
- e) Kawasan lindung geologi yaitu berada pada Kawasan Bukit Besak di Kecamatan Merapi Selatan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya Kabupaten Lahat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

a) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :

- Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 51.093 hektar terdiri atas Kecamatan Kikim Timur dengan luas kurang lebih 23.144 hektar, Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 2.064 hektar, dan Kecamatan Merapi Barat dengan luas kurang lebih 25.885 hektar.
- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 5.458 hektar, terdiri atas Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dengan luas kurang lebih 888 hektar, Kecamatan Pulau Pinang dengan luas kurang lebih 4.564 hektar, dan Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 6 hektar.

b) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

- Kawasan peruntukan tanaman pangan yang dikembangkan di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 17.512 hektar. Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas lebih kurang 15.942 hektar.
- Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas unggulan berupa durian, duku, manggis, alpukat, kubis, sawi, cabe dan wortel yang dikembangkan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kecamatan Kikim Selatan dan Kecamatan PSEKSU dengan luas kurang lebih 2.968 hektar.
- Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi yang dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 145.004 hektar, terdiri atas: 1) perkebunan

karet meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 4.335 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 37.907 hektar; 2) kelapa sawit meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 32.589 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 5.157 hektar; 3) perkebunan lada dengan luas kurang lebih 738 hektar; 4) perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 61.997 hektar; 5) perkebunan kakau dengan luas kurang lebih 1.100 hektar; 6) perkebunan kelapa dengan luas kurang lebih 810 hektar; 7) kemiri dengan luas kurang lebih 89 hektar; 8) kayu manis dengan luas kurang lebih 161 hektar; 9) cengkeh dengan luas kurang lebih 60 hektar; dan 10) pinang dengan luas kurang lebih 61 hektar.

- Kawasan peruntukan peternakan meliputi peternakan sapi, kambing dan unggas dengan skala rumah tangga yang diarahkan pada seluruh kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

- Kawasan perikanan tangkap meliputi pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan sungai dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap di danau, tebat, cekdam, embung, dan/atau waduk.
- Kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari budidaya perikanan kolam air tenang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Budidaya perikanan kolam air deras meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu,

Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.

- Budidaya perikanan sawah meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.

d) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan peruntukan perambangan batubara, dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Pulau Pinang.
- Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merapi, Kecamatan Pagun, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Kota Agung.
- Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Lahat.
- Rencana kawasan peruntukan pertambangan panas bumi

berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

- e) Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri kecil.
 - Kawasan peruntukan industri sedang meliputi industri pengolahan batu kali dan krikil yang terletak di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Pulau Pinang.
 - Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga meliputi industri pengolahan anyaman bambu, tahu, tempe, kerupuk, rotan dan ukiran kayu terletak di Kecamatan Kikim Barat dan Kecamatan Lahat.
- f) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata budaya dan wisata alam.
 - Kawasan peruntukan pariwisata budaya berlokasi :1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata budaya batu kepala putri, batunaga, batu orang roboh, batu kodok, batu gajah tidur, batu tapak orang belobang, batu lesung, meja batu dan rumah batu; 2) Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur dan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata budaya putri menjemur padi, makam serunting sakti, perahu kuno, batu kursi, makam dayang rindu, batu kambing, makam jaga lawang, makam hulu baling dan makam intan permata; 3) Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata budaya batu ngeri celeng, lobang tiga orang, puri menangis, batu behanding dan batu kerbau; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU yang memiliki objek wisata budaya batu tiang enam, ngarai, suaka alam, Makam Puyang Batu, dan perkebunan kopi bukit timur; 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Pajar Bulan yang memiliki objek wisata budaya batu lumping gajah, pemandian putri, rumah batu hanebat dan batu langgar; 6) Kecamatan Kikim Timur yang memiliki objek wisata budaya makam puyang raden gede dan makam Syekh Salman; 7) Kecamatan

Gumay Ulu yang memiliki objek wisata budaya Megalith Kuhut Majapahit, Megalith Parajutri, Megalith Tinja Banyak; dan 8) Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata budaya Rumah Bahi dan Candi Dayang Rindu.

- Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas 1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata alam taman rekreasi ribang kemambang, gua sarang walet dan air terjun;
- 2) Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit serelo, pusat pelatihan gajah, Bukit Besar, Air Terjun Hujan Panas, Air Terjun Berdarah, Air Terjun Uhangan, Air Terjun Mata Putri, Air Sumur; 3) Kecamatan Kota Agung yang memiliki objek wisata alam bukit rancing, Curup Nelindang, Curup Air Kerinjing, Tebat Bukit, Curup Air Tupai, danau batu dan tebat besar; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang memiliki objek wisata alam air panas, tebat besar, Curup Kabuhan, Curup Merundingan, Curup Perampangan, Curup Air Anak, dan Air Terjun Singgah Kudai;
- 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Cambai, ngarai, suaka alam, Batu Megalit dan perkebunan kopi bukit timur; 6) Kecamatan Kikim Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit seping tiang; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata alam Taman Tinggi Hari I, II, dan III, Taman Nik Kambing, Curup Lintang, Curup Maung, Curup Buluh, dan Curup Pasemah; 8) Kecamatan Pseksu yang memiliki objek wisata alam Curup 9 Panggung, Goa Suruman, Curup Tinggi Suban, dan Goa Bukit Semping Tiang; 9) Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Curup Lawang Agung dan Lubuk Buntak; 10) Kecamatan Mulak Ulu yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Penengan, Air Terjun Dayang Rindu, Air Terjun Air Bais, Air Terjun Napalan, Megalith Batu Kerbau, Goa Suhuman, Tebat

Besar, dan Tebat Bengkuang;

- Kecamatan Pulau Pinang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Air Salak, Curup Pemandian 7 Bidadari, Curup Gunung Nyawe, Curup Kunduran, Megalitik, dan Air Panas.

- Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata alam Marung Batu, Curup Bemban, Air Pans, Curup Laye dan Gua Laye, Curup Air Ugul Besak, Curup Air Ugul Kecil, Batu macan, Ribang Gayau, Gua Masanap Masaris, Tunggul Bute, dan Air Panas Kembuhak; 13) Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata alam Curup Cadas Pelangi, Air Terjun Tiga Tingkat, Danau Batu, Wahana Wisata Water Park.

- g) Kawasan peruntukan permukiman seluas 18.549 hektar meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di setiap pusat ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan menyebar di setiap kecamatan.
- h) Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lahat dan kawasan peruntukan untuk Polres dan Polsek yang berada di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat serta Kawasan Pemerintahan di Kecamatan Lahat dan Merapi Barat.

4.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bencana alam yang terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor alam melainkan juga disebabkan karena faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, karena dampak dari bencana itu sendiri akan kembali ke manusia dan merugikan dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang relatif bervariasi yaitu berkisar antara 0->300 meter di atas permukaan laut dan juga memiliki gunung berapi aktif dan juga beberapa sehingga menjadikan Kabupaten Lahat berpotensi rawan bencana alam banjir, karhutla, letusan gunung berapi, longsor dan gempa bumi. Sementara itu wilayah yang berpotensi rawan bencana banjir seluas 175.929,12 hektar, rawan bencana karhutla seluas 128.150,19 hektar, rawan bencana letusan gunung berapi seluas 1.044,11 hektar, rawan bencana longsor seluas 123.278,30 hektar dan rawan bencana gempa bumi seluas 4.248,26 hektar.

Tabel 4. 6 Luas Kawasan Bahaya Bencana di Kabupaten Lahat

No	Bahaya Bencana	Luas Ha
1	Banjir	175.929,12
2	Longsor	123.278,30
3	Karhutla	128.150,19
4	Letusan Gunung Berapi	1.044,11
5	Gempa Bumi	4.248,26

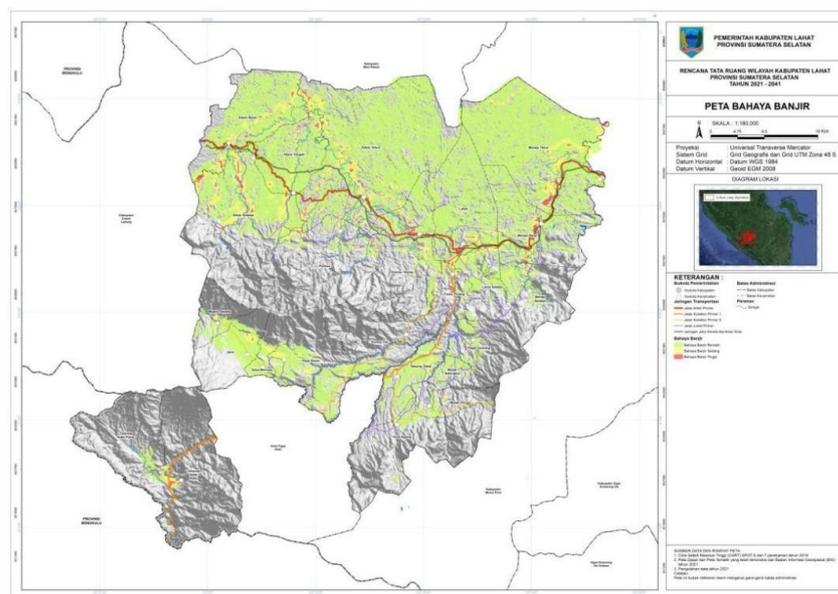
Sumber: Inasrisk, Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam KLHS Lahat 2019-2023

4.1.1.9 Kejadian Bencana Kabupaten Lahat dan Sekitarnya

Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami mengalami bencana banjir pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan wilayah sekitar Kabupaten Lahat salah satunya Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan dimana bencana alam yang sering terjadi adalah bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2020 yang berdampak terjadinya kerusakan bangunan rumah warga.

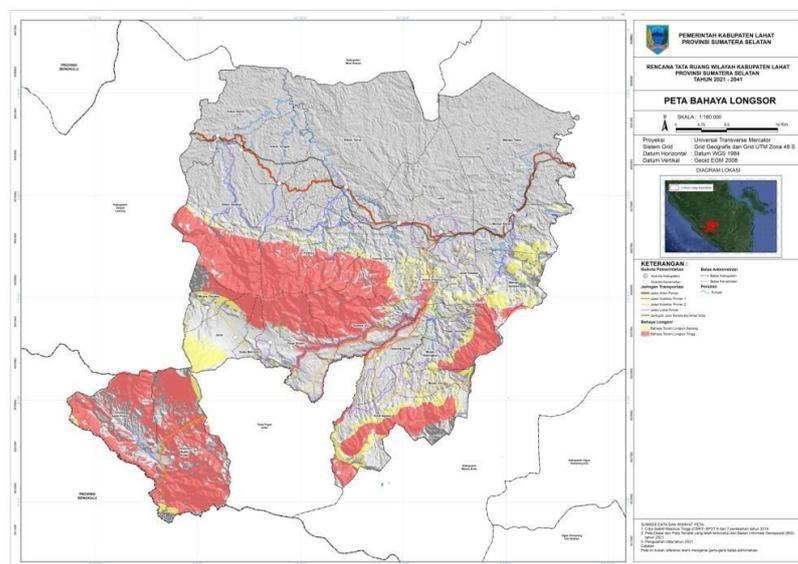
Berdasarkan data BNPB sepanjang tahun 2019-2020 wilayah Kabupaten Lahat mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya yaitu bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 05.00 WIB, tanggal 30 Desember 2019 yang melanda 3 (tiga) desa diantaranya Desa Keban Agung, Desa Lesung Batu dan Desa Pengentaan. Kemudian bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 04.00 WIB, Tanggal 09 Januari 2020 yang melanda 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan

Pulau Pinang, Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Kikim Timur. Selanjutnya terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada pukul 10.00 WIB, Tanggal 7 Februari 2020 yang melanda Desa Batay, Desa Ngalam Baru, Desa Mandi Angin, Desa Gunung Kembang dan Desa Jati.



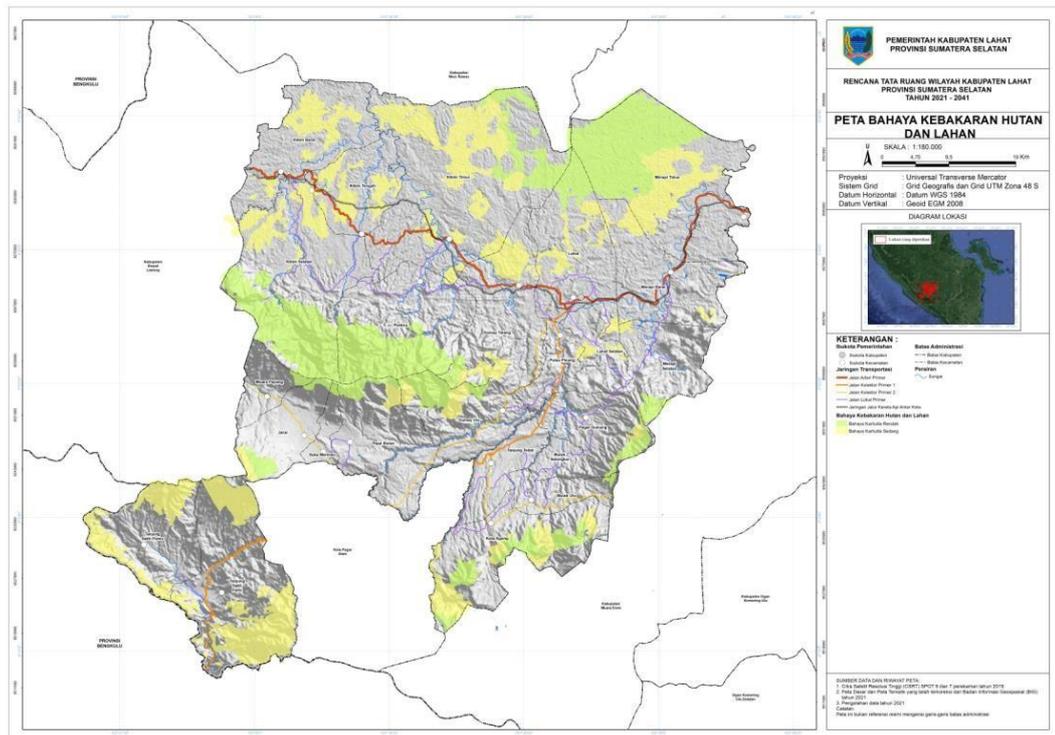
Gambar 4. 2 Peta Daerah Banjir

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



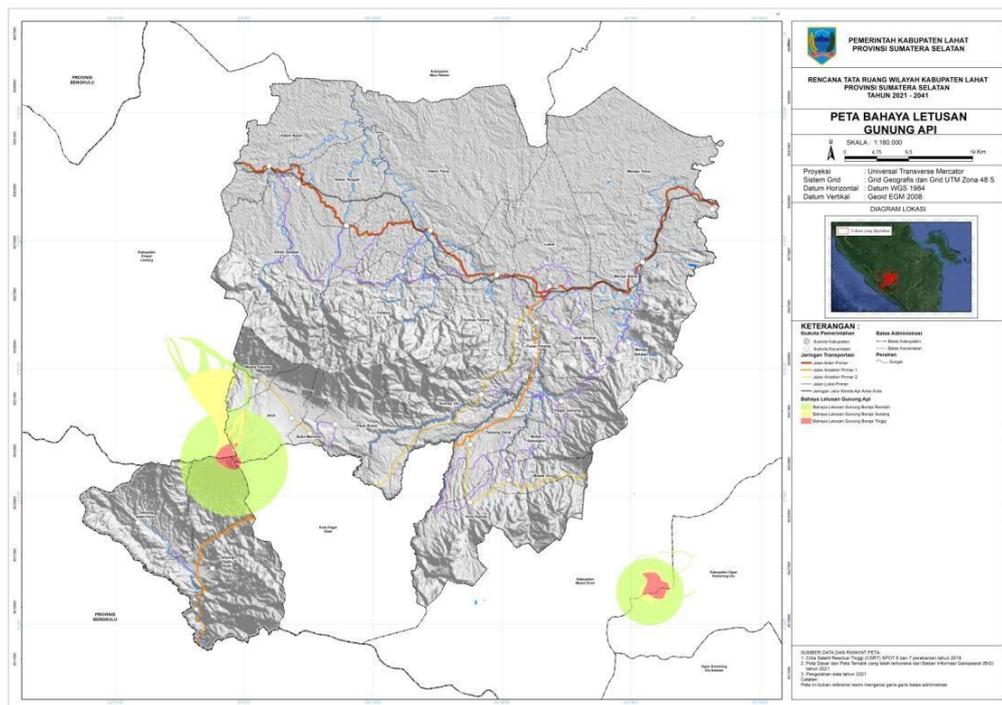
Gambar 4. 3 Peta Bahaya Longsor

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



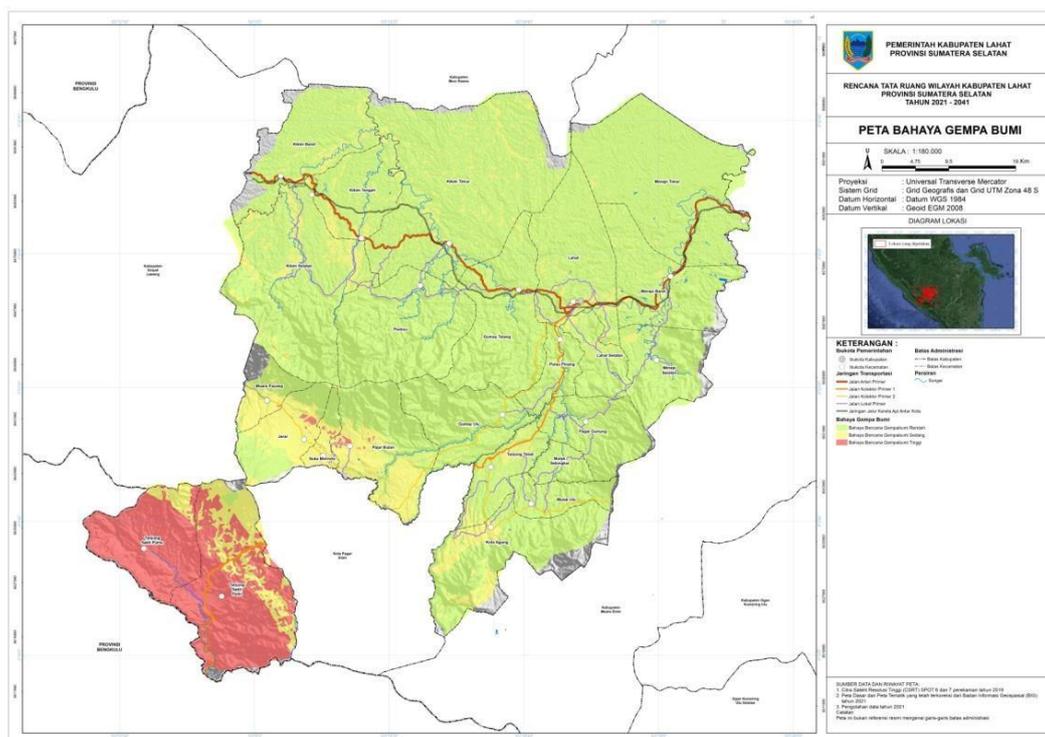
Gambar 4. 4 Peta Rawan Karhutla

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



Gambar 4. 5 Peta Gunung Berapi

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



Gambar 4. 6 Peta Rawan Gempa Bumi

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

4.2 Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Lahat pada kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Lahat mencapai 439.567 jiwa yang terdiri atas 224.884 jiwa penduduk laki-laki dan 214.683 jiwa penduduk perempuan.



Gambar 4. 7 Persentase Penduduk di Kabupaten Lahat

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Untuk mengetahui jumlah penduduk serta laju pertumbuhan, digambarkan dalam grafis berikut:

Tabel 4. 7 Laju Populasi Penduduk per Tahun

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanjung Sakti Pumi	16,82	16,94	1,09	0,96
Tanjung Sakti Pumu	14,52	14,60	0,89	0,69
Kota Agung	13,62	13,74	1,23	1,15
Mulak Ulu	12,57	12,66	1,05	0,90
Tanjung Tebat	8,82	8,90	1,28	1,21
Mulak Sebingkai	5,71	5,73	0,81	0,58
Pulau Pinang	9,87	10,04	2,17	2,40
Pagar Gunung	12,95	13,04	1,10	0,97
Gumay Ulu	5,58	5,62	1,09	0,96
Jarai	20,51	20,56	0,63	0,34
Pajar Bulan	12,85	12,94	1,03	0,88
Muara Payang	8,90	8,93	0,64	0,36
Sukamerindu	8,05	8,08	0,84	0,63
Kikim Barat	17,90	18,18	1,92	2,07
Kikim Timur	31,99	32,52	2,02	2,20
Kikim Selatan	17,34	17,54	1,54	1,56
Kikim Tengah	10,05	10,21	1,99	2,16
Lahat	107,51	108,13	0,95	0,78
Gumay Talang	12,94	13,24	2,72	3,13
Pseksu	9,04	9,12	5,00	1,18
Lahat Selatan	13,21	13,82	1,25	6,19
Merapi Barat	25,70	26,27	2,57	2,93
Merapi Timur	25,23	25,66	2,07	2,27
Merapi Selatan	8,39	8,47	1,32	1,26
Kabupaten Lahat/ Lahat Regency	430,07	434,94	1,47	1,51

Sumber: Lahat Dalam Angka, 2022

Bertambahnya jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Lahat menyebabkan bertambahnya masalah kependudukan terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan.

4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dapat dilihat dari capaian kinerja indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.

4.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

4.3.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.3.1.2 Pertumbuhan PDRB

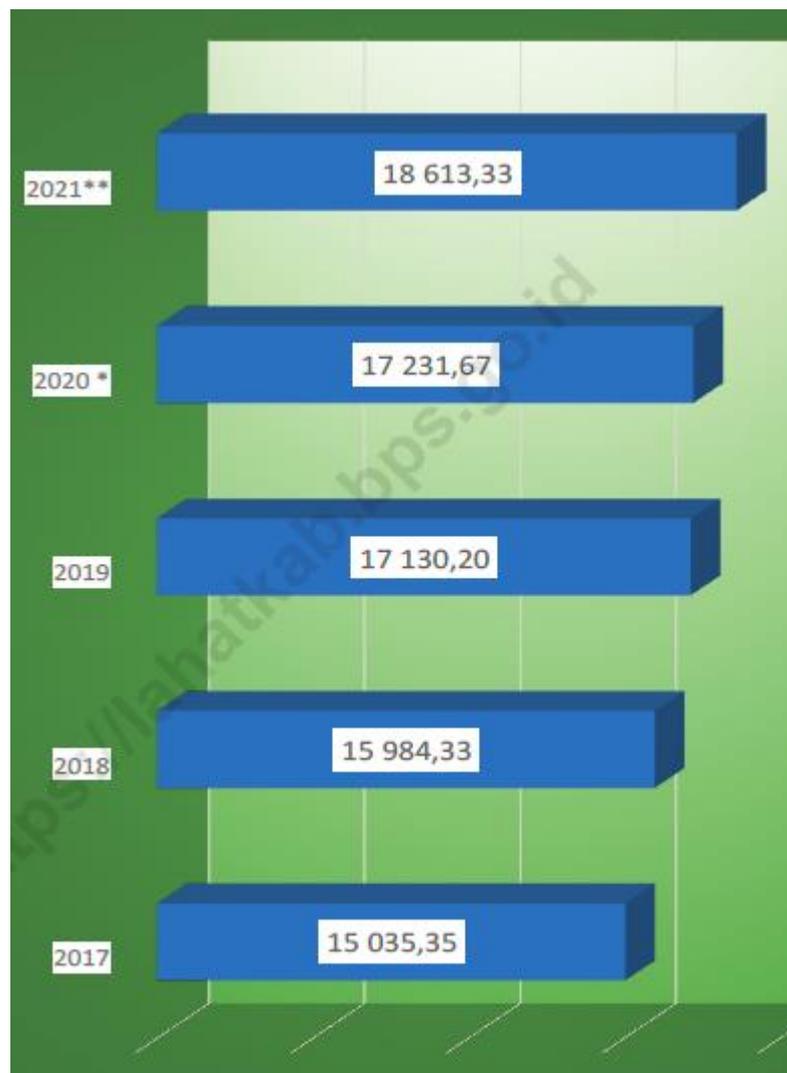
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha. Namun dari hitungan – hitungan tersebut PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada, karenanya PDRB merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah. Dimana PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu 2014 s.d 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Berdasarkan data BPS, PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Lahat tahun 2021 terhitung sebesar 118.613,33 trilyun rupiah atau tumbuh sebesar 7.4 persen dari tahun sebelumnya (2020). Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13.002,37 trilyun rupiah dengan pertumbuhan 3.6 persen.

Persentase distribusi PDRB atas harga berlaku yang paling terbesar adalah di lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai 35,74 persen. Sedangkan, sektor yang paling sedikit adalah disektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0.03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2021 mencapai 4,63 persen.

**Gambar 4. 8 Perkembangan PDRB Kabupaten Lahat
Tahun 2016-2021**



Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB Kab Lahat atas harga berlaku tercatat sebesar 15,035 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai

18,613 juta rupiah

4.3.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi atau naik turunnya tingkat harga barang dan jasa digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian yang terjadi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Secara teori pada dasarnya berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijaksanaan pemerintah antara lain tidak stabilnya harga BBM dan gas, tarif dasar listrik dan adanya krisis ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat laju inflasi semua sektor di Kabupaten Lahat.

Secara umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi.

Untuk mengukur laju inflasi diperlukan survey biaya hidup dan juga survey kebutuhan pasar untuk mengetahui harga konsumen. Di Kabupaten Lahat tidak melaksanakan survey tersebut, sehingga untuk mengetahui laju inflasi di Kabupaten Lahat, digunakanlah data dari Kota Lubuk Linggau sebagai kota terdekat dari Lahat sebagaimana berikut :

Tabel 4. 8 Laju Inflasi Bulanan Kabupaten

Lahat

Month	Food, Beverages and Tobacco	Clothing and Footwear	Housing, Water, Electricity, and Household Fuels
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	1,00	-0,04	-0,24
Februari/February	-0,49	0,05	-0,12
Maret/March	-0,03	0,00	0,08
April/April	0,56	0,39	0,29
Mei/May	0,05	1,00	0,21
Juni/June	-0,41	0,01	-0,01
Juli/July	-0,49	0,00	0,10
Agustus/August	-0,87	0,12	0,26
September/September	0,19	0,01	0,53
Oktober/October	0,28	0,02	0,95
November/November	0,86	0,08	-0,12
Desember/December	1,03	0,00	0,00
2021	0,54	0,10	0,36

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.4 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten Lahat tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 4. 9 PDRB Kabupaten Lahat menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2 677,44	2 740,91	2 784,01	2 813,21	2 921,36
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4 049,51	4 247,58	4 629,03	4 702,86	5 068,88
C Industri Pengolahan/Manufacturing	482,26	508,57	532,18	540,53	549,90
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	43,31	51,35	59,49	68,96	74,08
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	3,04	3,26	3,54	3,74	3,78
F Konstruksi/Construction	908,82	929,18	953,53	970,15	976,93
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 177,45	1 251,24	1 362,14	1 263,97	1 310,02
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	117,39	119,40	122,43	114,57	116,32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	112,69	122,49	134,83	125,35	131,37
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	112,62	114,93	120,40	130,32	135,28

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	185,33	187,75	189,96	191,38	193,28
L Real Estat/Real Estate Activities	289,49	299,20	308,60	306,35	313,91
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	4,69	4,95	5,23	5,08	5,21
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	616,42	639,11	650,55	662,69	665,01
P Jasa Pendidikan/Education	335,89	348,23	362,89	355,99	360,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	93,40	95,87	99,95	105,98	109,06
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	55,55	59,68	63,60	66,31	67,04
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	11 265,29	11 723,72	12 382,33	12 427,42	13 002,37

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.5 Indeks Gini

Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dimana, ketimpangan pembangunan atau disparitas dapat menggambarkan perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.

Kabupaten Lahat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menekan kesenjangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Gini rasio menggambarkan kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Semakin kecil angka gini rasio berarti pemerataan ekonomi semakin baik. Perkembangan gini rasio Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2019-2021 mendorong Pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang atau terisolir akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pada tahun 2019 – 2020 Gini rasio Kabupaten Lahat stagnan di angka 0,33 dan mulai membaik pada tahun 2021 dengan Gini rasio sebesar 0,30. Gini Rasio Kabupaten Lahat pada tiga tahun terakhir lebih baik dari Provinsi Sumsel dan Nasional.

Tabel 4. 10 Indeks Gini Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021

Indeks Gini	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	0,33	0,33	0,30
Provinsi Sumsel	0,33	0,34	0,34
Nasional	0,38	0,38	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

4.3.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lahat pada kurun waktu 2014-2021 mengalami penurunan dari 18,02% di tahun 2014 menurun menjadi 16,46% pada tahun 2021. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan presentasi penduduk miskin mencapai 15,92 dan angka tersebut naik sampai mencapai angka 16,46% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut salah satunya diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang membuat perekonomian dunia anjlok termasuk naiknya angka kemiskinan daerah dan juga nasional. Belum signifikannya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lahat antara lain disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta bantuan sosial yang belum tepat sasaran.

4.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. ada 3 aspek yang menjadi dimensi pengukuran IPM yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara umum IPM di Kabupaten Lahat masih kalah dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumsel dan IPM Nasional. Begitu juga dengan IPM Kab. Lahat tahun 2019-2021 yang mengalami penurunan dari 67,62 pada tahun 2019, menurun 67,44 tahun 2020, dan meningkat sedikit pada tahun 2021 sebesar 67,58.

Tabel 4. 11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021

IPM	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	67,62	67,4 4	67,58
Provinsi Sumsel	70,02	70,0 1	70,24
Nasional	71,92	71,9 4	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Berikut adalah perbandingan IPM kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 4. 9 IPM Kabupaten Lahat 2022



Sumber : BPS 2022

Untuk memperbaiki IPM suatu daerah, diperlukan penanganan serius khususnya pada 3 dimensi pengukuran IPM. IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Selain itu, dukungan infrastruktur juga sangat berpengaruh untuk mendukung pembangunan daerah. Perlu adanya pemetaan secara serius untuk melihat dimensi

mana yang masih kurang dan strategi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.

4.3.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fokus kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggungjawab.

Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan harapan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

4.3.2.2.1 Fasilitas Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah,

ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada. Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula.

Pada tahun 2018, angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat untuk SD sederajat sebesar 148,128; SMP sederajat sebesar 249,772 dan SMA sederajat 353,339 siswa persekolah. Sedangkan rasio murid-guru untuk SD sederajat sebesar 1:09; SMP sederajat sebesar 1:12 dan SMA sederajat 1:12 siswa per guru. Jika dibandingkan dengan angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat tahun 2014, maka capaian rasio murid-sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2014, rasio murid-sekolah untuk SD sederajat sebesar 158,06 yang artinya ketersediaan sekolah menampung murid sekolah SD pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula halnya dengan ketersediaan gedung SMP sederajat dan SMA sederajat. Dimana perkembangan rasio murid-sekolah SMP sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014. Sedangkan untuk perkembangan rasio murid-guru kurun waktu 2014-2018 pada SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan dan masih perlu

menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Rasio murid-guru pada tahun 2018 lebih besar daripada rasio murid-guru pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya jumlah murid yang sekolah lebih banyak dari pada ketersediaan guru yang ada saat ini. Dengan demikian, seiring bertambahnya masyarakat yang bersekolah saat ini harus diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar/guru karena merupakan faktor sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid yang sekolah pada SD, SMP dan SMA sederajat.

4.3.2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2021 mencapai lebih dari 100 persen yaitu 109,75 persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun telah duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2021 APK sebesar 94,48 persen dan APK SMA sederajat sebesar 82,34 persen.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Pada tahun 2021 APM Sekolah Dasar sebesar 98,83 persen. Hal ini menunjukkan banyaknya anak usia 12 tahun yang telah duduk di bangku SD. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA angkanya masing-masing sebesar 86,98 persen dan 67,85 persen. Rendahnya APM juga menunjukkan banyaknya murid yang duduk di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

4.3.2.2.3 Angka Melek Huruf

Berdasarkan data BPS Kab. Lahat, angka melek huruf mencapai 98,85%. Dari segi kelompok umur, pada usia 15-24 tahun angka melek huruf mencapai 100%. Pada usia 45 ke atas angka melek huruf mencapai 97,23.

4.3.2.3 Kesehatan

4.3.2.3.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah $25 < x > 85$ (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program sosial

lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat kurun waktu 2018-2021 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Tahun 2019, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat sebesar 65,76 tahun meningkat menjadi sebesar 66,04 tahun di tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebesar 66,16.

4.3.2.3.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sebesar 0,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,001 persen (target ≤ 1).

Kondisi gizi sangat menentukan status kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Status gizi buruk diharapkan akan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk. Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan masyarakat dalam hidup sehat. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi. Karena itu, diharapkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diharapkan dapat mengatasi jumlah balita gizi buruk.

4.3.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Beberapa indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat seperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat pada kurun waktu tahun 2014-2017 berdasarkan penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama menunjukkan peningkatan yaitu dari tahun 2014 berjumlah 184.770 orang meningkat menjadi 201.240 orang pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan penduduk usia ekonomi aktif

yang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi jauh lebih banyak.

Perkembangan TPAK Kabupaten Lahat kurun waktu 2014- 2017 yaitu pada tahun 2014 mencapai 70,66% meningkat menjadi 72,74% di tahun 2017. Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuatifnya kegiatan di bidang pertanian. Bila referensi waktu survei bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi. Sebaliknya bila referensi waktu survei bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan, sedangkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Lahat pada tahun 2017 sebesar 59,47 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang angkanya sebesar 60,26 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja wanita yang sedang mencari pekerjaan.

Salah satu isu dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan

juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 4,33 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang angkanya sebesar 5,62 persen. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat tersebut terutama disebabkan oleh angka pengangguran penduduk laki-laki, yaitu dari 5,98 persen tahun 2014 menjadi 4,43 persen tahun 2017. Demikian juga dengan angka pengangguran pada penduduk perempuan turun dari 5,07 persen tahun 2014 menjadi 4,16 persen tahun 2017. Penurunan ini terjadi disinyalir karena banyaknya perusahaan pertambangan dan angkutan batu bara yang baru berdiri di Kabupaten Lahat sehingga menyerap cukup banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (*under unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dapat menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro

serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lapangan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Selain itu, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan upah minimum masyarakat di Kabupaten Lahat.

4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lahat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta

mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah- tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Lahat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Kabupaten Lahat mempunyai kekayaan seni budaya yang beragam, hal tersebut menjadi modal dasar untuk pengembangan pariwisata. Kabupaten Lahat dikenal dengan "Bumi Seribu Megalit" karena pada tahun 2012 dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia), yaitu Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia. Sebaran situs megalit berada di beberapa kecamatan seperti: Merapi Barat, Kota Lahat, Pulau Pinang, Gumay Ulu, Pagar Gunung, Tanjung Tebat, Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Pajar Bulan, Muara Payang, Suka Merindu dan Tanjung Sakti. Peninggalan megalit di Kabupaten Lahat berupa: arca, arca menhir, lesung batu, lumpang batu, batu tegak, batu datar, dolmen, batu gelang, batu bergores, tetralith, bilik batu, lukisan bilik batu dan tempayan kubur. Jenis temuan megalit sebanyak 13 jenis hanya di temukan di Kabupaten Lahat.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Lahat yang berbukit sehingga terdapat banyak air terjun, sungai, danau dan sumber air panas. Saat ini telah terdata di Kabupaten Lahat terdapat lebih kurang 126 air terjun dengan ketinggian dan keindahan yang berbeda. Pesona air terjun Kabupaten Lahat tersebar di beberapa kecamatan seperti: air terjun Milang di Kecamatan Merapi Barat. Air terjun Deras, air terjun Renalap di Kecamatan Merapi Selatan. Air terjun Ganya dan Serame di Kecamatan Kota Lahat. Air terjun Ketapang, Salak, Sumbing, Bidadari, Pandak, Pegadungan, Terlantang, Ujan Panas, Panjang, Kunduran, Gunung Nyawe, Gegas di Kecamatan Pulau Pinang. Air terjun Lintang Kecil, Lintang Besar, Buluh 7 Tingkat, Maung di Kecamatan Gumay Ulu. Air terjun Kesik, Jambat Akar, Kijeng di Kecamatan Tanjung Tebat. Air terjun

Bale, Kerinjing, Nelindang, Semindang Rindu di Kecamatan Kota Agung. Air terjun Jernih, Suruman, Dayang Rindu, Penenangan, Tinggi, Napalan di Kecamatan Mulak Ulu, air terjun Ughul Kecil, Ughul Besar, Bemban, Laye di Kecamatan Pagar Gunung, air terjun Lawang Agung di Kecamatan Muara Payang, air terjun 9 Panggung di Kecamatan Pseksu, air terjun Bukit Timur, Pama Salak, Gimo, Embun di Jarai, air terjun Pemandian Ratu di Kecamatan Tanjung Sakti. Sedangkan sumber air panas di Kabupaten Lahat terdapat di Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Tanjung Sakti. Sumber air panas yang berada di Kecamatan Pagar Gunung terletak di Desa Padang dan Danau di hutan lindung Bukit Barisan pada ketinggian 850 mdpl. Sumber air panas di Kecamatan Tanjung Sakti berada di tengah Desa Pajar Bulan, sehingga mudah di jangkau. Sumber air panas ini terletak tepat di bawah jembatan desa Pajar Bulan. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang terintegrasi dengan wisata arung jeram di sungai Manna. Kabupaten Lahat memiliki arena arung jeram di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Lematang, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Ketika berarung jeram selain menyusuri sungai juga akan melihat dan singgah di air terjun. Untuk arung jeram di sungai Lematang akan singgah di air terjun Salak dan arung jeram di Sungai Selangis Kecamatan Gumay Ulu akan melihat 6 air terjun dan singgah di air terjun Buluh (7 tingkat). Sedang arung jeram di Sungai Manna Kecamatan Tanjung Sakti akan dibawa menikmati jernihnya air sungai dan indahnya pemandangan sepanjang sungai Manna.

Selain sebagai sarana olahraga arung jeram, saat ini juga merupakan salah satu potensi pariwisata unggulan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lahat. Masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat selain berolahraga juga dapat menikmati suasana keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat memiliki Bukit Serelo atau Gunung Jempol merupakan sebuah bukit yang sangat unik dan tiada duanya di dunia. Letak bukit ini di desa Padang Kecamatan Merapi Selatan atau berjarak 27 km dari pusat Kota Lahat. Bukit dengan ketinggian 900 mdpl menjadi simbol Kabupaten Lahat. Di sini juga terdapat pelatihan gajah Sumatera dan dapat dijadikan sarana untuk rock climbing. Keberhasilan berbagai seni dan budaya serta olah raga

mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai di antaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan pemerintah wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

4.4.2 Urusan Pendidikan

4.4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat di bidang pendidikan antara lain menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan

partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi penduduk menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lahat pada tahun 2018 dilihat dari golongan usia 7-12 tahun sebesar 104,15 persen yang artinya terdapat 104 penduduk yang bersekolah pada usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada golongan usia 13-15 tahun sebesar 84,9 persen yang artinya penduduk usia 13-15 tahun ditemui 84 orang yang bersekolah. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk golongan usia 16-18 tahun sebesar 82,46 persen yang artinya pada tahun 2018, terdapat 82 penduduk yang bersekolah pada usia 16-18 tahun.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah faktor biaya pendidikan yang cenderung semakin mahal pada jenjang pendidikan lebih tinggi mengakibatkan sebagian siswa yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi pola angka partisipasi sekolah secara umum yang cenderung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Angka Partisipasi Sekolah dalam kurun waktu 2014-2018 memperlihatkan angka yang fluktuatif untuk setiap kategori kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi tahun 2018 pada kelompok umur 7-12 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 16-18 tahun.

4.4.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar sangat mempengaruhi kondisi pendidikan di setiap daerah. Keberhasilan di bidang pendidikan ditandai dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD, SLTP dan SLTA yang rusak berat dan penempatan guru di

sekolah yang kekurangan guru.

4.4.2.3 Rasio Murid - Sekolah dan Rasio Murid - Guru

Rasio murid terhadap sekolah adalah angka rata-rata kemampuan sekolah dalam menampung muridnya. Semakin kecil rasio antara murid dan sekolah maka semakin baik indikator pendidikan mengenai daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah yang semakin kecil tentunya menunjukkan bahwa sekolah lebih intensif dalam memberikan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas. Semakin rendah nilai rasio menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin membaik. Rasio murid terhadap sekolah lebih disebabkan oleh jumlah murid yang menurun tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang semakin bertambah.

Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2018 pada setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang relative lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat per tingkat pendidikan, tingkat SD memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 148,128. Selanjutnya adalah tingkat SLTP sebesar 249, 772 dan SLTA sebesar 353,339. Nilai rasio murid terhadap sekolah yang menunjukkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa penyebab nilai rasio yang menurun ini terjadi karena peningkatan fasilitas jumlah sekolah di Kabupaten Lahat.

Jumlah sekolah pada tahun 2018 bahkan meningkat pada berbagai tingkat pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah ini lebih disebabkan oleh jumlah murid yang bertambah diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang kemudian diikuti dengan upaya peningkatan jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Selanjutnya, angka rasio murid terhadap guru adalah rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru dalam suatu tahun tertentu. Semakin kecil rasio murid terhadap guru tentunya menunjukkan semakin baiknya pendidikan yang bisa diberikan guru terhadap muridnya. Rasio

murid terhadap guru pada tahun 2014- 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai fluktuatif. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai yang semakin besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pengajaran guru mengalami penurunan karena beban murid yang harus diajar lebih banyak pada tahun 2018 sedangkan jumlah guru berkurang sehingga menyebabkan guru menjadi kurang intens memperhatikan muridnya.

Pada jenjang SD, 1 orang guru mengawasi secara rata-rata 9 orang murid, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 12 orang murid dan pada jenjang SLTA seorang guru mengawasi rata-rata 12 orang murid. Fenomena tingkat pendidikan di Kabupaten Lahat menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dimana indikator kesejahteraan taraf pendidikan yang baik diterima pada setiap masyarakat akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula.

4.4.3 Urusan Kesehatan

Gambaran umum kesehatan di Kabupaten Lahat menunjukkan derajat atau status kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, morbiditas, imunisasi, dan angka harapan hidup. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Lahat yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

4.4.3.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan penduduk dapat diselenggarakan baik oleh institusi pemerintah maupun swasta seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin dan lain-lain. Selain itu juga mencakup sarana pendukung

kesehatan seperti tempat praktek dokter, bidan, poliklinik dan posyandu. Perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lahat kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menunjukkan peningkatan, begitu pula halnya dengan jumlah tenaga kesehatan.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Lahat terdapat 2 unit rumah sakit, 33 unit puskesmas, 56 unit puskesmas pembantu, 1 unit rumah bersalin. Sementara itu jumlah apotik 19 buah, klinik/balai pengobatan sebanyak 13 buah dan optikal sebanyak 4 buah yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Lahat pada tahun 2018 terdiri dari dokter sebanyak 28 orang, perawat sebanyak 167 orang, bidan sebanyak 297 orang, dan tenaga farmasi sebanyak 11 orang. Hal tersebut dapat menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya kesadaran pentingnya pelayanan kesehatan oleh tenaga medis serta partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan dengan tenaga medis yang semakin tinggi. Akses masyarakat terhadap bidan desa yang semakin mudah akan mengurangi angka kematian bayi sekaligus juga meningkatkan angka harapan hidup.

4.4.3.2 Morbiditas

Morbiditas atau angka kesakitan dapat dijadikan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Angka kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.4.4 TATA RUANG

4.4.4.1 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Sebagai salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, maka jaringan irigasi tersebut haruslah dalam kondisi baik sehingga kebutuhan air irigasi bagi pertanian dapat terpenuhi.

Kondisi baik untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi < 10% dari total panjang saluran irigasi, demikian sebaliknya kondisi rusak untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi > 10% dari total panjang saluran irigasi. Saluran irigasi di Kabupaten Lahat seluas 13.348 ha, yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang. Pada awal tahun 2017 memiliki kondisi jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan 9,10% yang merupakan angka kritis menuju ke kondisi tidak baik.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2017 terlihat meningkat dan menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2014 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 61,84 meningkat menjadi 72,88 atau seluas 9.729 hektar. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Lahat kedepan yaitu perlu menjaga dan mempertahankan luasan daerah irigasi agar tidak terjadi penyusutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasarkan kewenangannya, jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Lahat sebanyak 214 Daerah Irigasi dengan Luas 13.348 hektar, sedangkan untuk kewenangan Provinsi Sumsel sebanyak 8 Daerah Irigasi dengan luas 10.443 hektar.

4.4.4.2 Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lahat masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032

dan saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, evaluasi dan penilaian oleh Tim PK RTRW Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Lahat.

Hasil dari Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan hasil penilaian per aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek maka RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 perlu direvisi. Selain itu, penilaian terhadap perubahan RTRW berdasarkan beberapa kajian didapat hasil total perubahan sebesar 18%, yang artinya tidak perlu dilakukan pencabutan peraturan Daerah tetapi hanya perlu perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

Beberapa rekomendasi dalam revisi RTRW berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 sebagai berikut:

a. Revisi Peraturan Daerah

Perubahan peraturan daerah disebabkan antara lain adanya perubahan wilayah akibat pemekaran wilayah kecamatan. Selain itu perubahan peraturan daerah dilakukan untuk mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

b. Revisi terhadap Materi Teknis

Revisi terhadap materi teknis akan disesuaikan dengan perubahan pada Peraturan Daerah serta mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

c. Revisi terhadap peta

Revisi terhadap peta-peta juga diperlukan untuk memberikan gambaran data spasial terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-

2032 yang mengalami revisi. Revisi peta meliputi perubahan batas administrasi, perubahan data-data spasial yang dipersyaratkan dalam dokumen RTRW, perubahan peta-peta rencana yang meliputi peta struktur ruang, peta pola ruang dan peta kawasan strategis.

4.5 FOKUS URUSAN DASAR

4.5.1 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari gangguan luar dan sebagai tempat tinggal untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Untuk itu, rumah diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Saat ini rumah merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Dengan adanya data perumahan dapat menggambarkan sampai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain akses rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak, akses terhadap sumber listrik dan beberapa indikator lainnya. Permasalahan air minum, sanitasi dan sumber listrik perlu menjadi perhatian, karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lahat.

4.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk. Dalam rangka mencapai akses universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) diperlukan dorongan dan strategi percepatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai hal dimaksud. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, dimana

permasalahan akses air minum, kawasan kumuh dan sanitasi yang layak sudah menjadi prioritas nasional merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Capaian rata-rata Kabupaten Lahat untuk akses air bersih tahun 2018 sebesar 43,70% masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 72,99% dan capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,84%. Angka capaian akses air minum layak Kabupaten Lahat pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 45,83%. Hal ini menggambarkan kinerja pengelolaan akses air minum layak di Kabupaten Lahat semakin rendah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan capaian akses universal dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan baik melalui hibah, CSR, APBN, APBD dan lain-lain.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam upaya mendorong capaian akses universal yang telah dicanangkan secara nasional (100-0-100) pada tahun kedepan untuk akses air minum antara lain: memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan melalui pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, merencanakan proyeksi kebutuhan penyediaan sarana air minum agar dapat berkelanjutan, membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan pelayanan air bersih, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Penyediaan air minum disalurkan ke seluruh konsumen, diantaranya sosial (umum; khusus), non niaga (rumah tangga; instansi pemerintah), niaga (kecil; besar) dan khusus (pelabuhan; lainnya). Pada tahun 2017, banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat mencapai 6.644 pelanggan yang terdiri dari jenis konsumen sosial, konsumen niaga, non niaga, industri dan khusus. Secara rinci perkembangan banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis

konsumen di Kabupaten Lahat.

4.5.3 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lahat, pada tahun 2018 telah melaksanakan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti halnya juga yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini akan semakin mudah terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok daerah.

Masyarakat sebagai salah satu mitra aparat keamanan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib serta bebas dari penyakit masyarakat diharapkan mampu mengungkapkan berbagai pesan moral dalam perwujudannya. Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan sebanyak 10 pelanggaran. Selain itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan Peraturan Daerah yaitu kegiatan penertiban tempat hiburan, penertiban penjualan minuman beralkohol, penertiban penginapan, hotel, losmen dan penertiban KTP. Disisi lain dilakukan juga kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas aparat.

4.5.4 Urusan Sosial

Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Lihat selaras dengan tujuan pembangunan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar (Usia 6-18 tahun), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas (ADK) kelainan fisik/mental belum berusia 18 tahun, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai/wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendidik) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Sedangkan yang dimaksud Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa hambatan di bidang sosial antara lain masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh masyarakat, peningkatan PMKS yang masih tinggi setiap tahunnya. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial meliputi berbagai jangkauan pelayanan pemberdayaan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan santunan bagi lansia terlantar, selain itu juga telah dilakukan peningkatan pemberdayaan peran keluarga

miskin dan bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial termasuk Penyempurnaan Sarana Prasarana Pusat Rehabilitas dan Panti Asuhan, Bantuan Tanggap Darurat kepada para korban bencana.

Hal penting lainnya yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mencakup upaya-upaya integrasi sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan, pemberdayaan KAT bukan hanya dilihat sebatas upaya untuk memathkan isolasi/keterasingan secara fisik dari kelompok- kelompok masyarakat lain di Lingkungannya tetapi lebih penting lagi adalah isu sosial, sehingga mereka dapat hidup sejajar dengan masyarakat sekitarnya.

Saat ini, permasalahan Urusan Sosial Kabupaten Lahat adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi oleh karena itu penanganan PMKS harus lebih di Optimalkan dan Pembinaan terhadap Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS perlu ditingkatkan. Dalam rangka mengentaskan permasalahan tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lahat memerlukan target kinerja dan tambahan sumber dana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya melalui program yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan lima tahun mendatang yaitu melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Keluarga sangat Miskin (KSM) yang Memperoleh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Persentase KMS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Program Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan Indikator Kinerja Persentase eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dengan Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Terlantar yang dilatih Keterampilannya.

4.5.5 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kekerasan kepada Pemerintah. Pada tahun 2014, persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 10% menurun menjadi 7,2% di tahun 2018. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung oleh Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perkembangan angka partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan lembaga pemerintah pada kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2014 untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif sebesar 7,5% meningkat menjadi 10% di tahun 2018. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 3,1%, meningkat menjadi 4,98% di tahun 2018. Beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di Kabupaten Lahat antara lain melalui Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

4.5.6 Urusan Pangan

Kebutuhan pangan di Kabupaten Lahat saat ini jauh lebih kecil

dari pada produksi dan ketersediaan pangan di kabupaten Lahat. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan mencapai 152.914.570.500 ton/tahun. Ketersediaan pangan terdiri dari indikator kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan sereal.

Analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dapat diperoleh dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Lahat dan Kecamatan Gumay Talang memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan. Namun dengan masuknya produk tanaman pangan dari kecamatan lain di dalam Kabupaten Lahat serta dari luar Kabupaten Lahat sehingga defisit bahan pangan di dua Kecamatan tersebut dapat di abaikan. Kekurangan bahan pangan di dua Kecamatan tersebut di sebabkan oleh luas lahan sawah yang dimiliki oleh kecamatan tersebut semakin sedikit.

4.5.7 Urusan Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan yang merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

4.5.7.1 Daya Dukung Air Permukaan

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Permen LH No.17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian

diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakupi tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup (*basicneed*). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m³/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard National Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8m³/kapita/tahun. Dari perhitungan air permukaan yang tersedia di kabupaten Lahat sebesar 17.079.897.600 m³/tahun. Kebutuhan air yang diperhitungkan terdiri dari kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk pengairan pertanian, kebutuhan air untuk peternakan dan kebutuhan air untuk industri. Kebutuhan air domestik dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita.

Penggunaan air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, kebutuhan domestik, kebutuhan peternakan dan kebutuhan industri relatif lebih aman karena dapat dipenuhi dari air permukaan. Kabupaten Lahat masih mengalami surplus air sebesar 16.876.210.052,59 m³/tahun. Kebutuhan air domestik lebih dititik beratkan ke konsumsi air bersih yang berasal dari air permukaan dan di tangani oleh PDAM.

Konsumsi air yang dapat dilayani oleh PDAM hanya sebesar 23,16 persen dari total kebutuhan. Layanan air bersih melalui PDAM untuk rumah tangga hanya sebesar 23,16 % dari total kebutuhan air domestik. Menurut data PDAM kabupaten Lahat tahun 2017, kebutuhan air untuk rumah tangga terhadap konsumen dilayani PDAM sebesar 2.589.135,822 m³/tahun dari total kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi kebutuhan air bersih domestik yang diperoleh dari hasil model dan kebutuhan air rumah tangga yang dilayani PDAM. Terdapat perbedaan signifikan, dikarenakan tidak semua sumber air rumah tangga di kabupaten Lahat menggunakan jasa layanan PDAM.

Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk kabupaten Lahat sebagai berikut:

- Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak 1.000 m³/kapita/tahun menurut standar WHO maka kebutuhan air sebesar 11.096.656,90 m³ atau 5% dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya mencapai 0,95
- Jika dibandingkan dengan kebutuhan air dirinci menurut kebutuhan sosial, pertanian dan industri maka kebutuhan air sebesar 192.591.890 m³/tahun atau 94 % dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya hanya mencapai 0,06.

4.5.7.2 Kualitas Air Sungai

Lima (5) sungai yang ada di Kabupaten Lahat telah mengalami pencemaran dengan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang telah melampaui daya tampung sungai. Sumber BOD dan COD tersebut berasal dari beban pencemar dari limbah domestik (COD 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari), beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (COD 7.685 kg/hari dan BOD 1.750 kg/hari), beban pencemar dari limbah peternakan (COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari), beban pencemar dari limbah UMKM (COD 7.950 kg/hari dan BOD 1.755 kg/hari), dan beban pencemar dari limbah Industri. Sumber pencemar air sungai di kabupaten Lahat meliputi limbah domestik, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan limbah industri.

- 1) Beban pencemar dari limbah domestik
Sungai Lematang dan sungai Selangis merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah domestik COD sebesar 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari.
- 2) Beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (non-titik)
Sungai Lim merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan COD sebesar 7.685 kg/hari dan BOD sebesar 1.750 kg/hari.
- 3) Beban pencemar dari limbah peternakan

Beban pencemar dari limbah peternakan terbesar berasal hewan sapi dan kerbau dengan kandungan COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari

4) Beban pencemar dari limbah UMKM

Sungai Endikat paling tinggi beban pencemar dari limbah UMKM dengan jumlah COD sebesar 7.950 kg/hari dan BOD sebesar 1.755 kg/hari.

5) Beban pencemar dari limbah Industri

Sungai Lematang merupakan sungai dengan jumlah industri terbanyak yang membuang limbah sebanyak 18 industri.

Pada bidang persampahan, saat ini volume sampah di Kabupaten Lahat sebesar 120.922,53 ton/tahun dan penyumbang timbulan sampah terbesar berada di kecamatan Lahat. Pelayanan sampah di kabupaten Lahat masih terpusat di daerah perkotaan.. Berbagai alternatif pengelolaan sampah dapat diarahkan kepada program atau kegiatan daur ulang sampah serta pembangunan teknologi pengolahan limbah/sampah, sehingga volume sampah dapat dikurangi.

Timbulan sampah di Kabupaten Lahat telah melampaui dari kapasitas yang ada. Dalam pengelolaan sampah dapat melalui kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai sumber timbulan sampah seperti permukiman, industri, pasar, perkantoran, dan lain- lain. Sistem yang diterapkan dalam pengolahan sampah secara ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan semi sanitary landfill sudah diterapkan oleh TPA yang berada di Kabupaten Lahat tetapi masih kekurangan Fasilitas dalam pengolahan dan penampungan sampah. Saat ini fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Lahat.

4.5.8 Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lahat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian persentase penduduk yang belum memiliki KK meningkat pada Tahun 2018 sebesar 25,5%.

Dalam pemenuhan penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP pada tahun 2018 telah mencapai 85%, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebesar 20% dan Akta Kematian sebesar 14%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang baik dan sesuai prosedur.

4.5.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2017, dalam rangka meningkatkan pasar desa yang modern, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang ekonomi sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat mengadakan pembinaan pengelolaan pasar desa yang difokuskan pada 25 pasar desa di Kabupaten Lahat. Dengan harapan pasar desa tersebut akan menjadi pasar yang sehat, nyaman, aman, bersih dan memiliki manajemen pengelolaan yang profesional sehingga kesejahteraan pedagang meningkat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lahat juga melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 58 desa di wilayah Kabupaten Lahat.

Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menuju desa swasembada, masyarakat Desa Muara Tiga Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berperan secara aktif dalam menyukseskan program Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

4.5.10 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%) kurun waktu 2014-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu pada tahun 2014 adalah 73,04% meningkat menjadi 76,09% di tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi

73,28%. Realisasi cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif telah melebihi target SPM sebesar 65%. Tercapainya indikator ini didukung oleh Program Keluarga Berencana seperti penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan keluarga berencana, dan Program Pelayanan Kontrasepsi melalui pelayanan konseling KB, pelayanan pemasangan kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi. Beberapa kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%), cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB dan Rasio PPKBD setiap desa/kelurahan. Sedangkan kinerja yang belum memenuhi target SPM antara lain cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/ unmeet need dan Rasio PLKB/PKB (petugas/desa).

4.5.11 Urusan Perhubungan

Sejalan dengan peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan beberapa program seperti Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Saat ini transportasi Darat yang ada di Kabupaten Lahat tahun 2017 berupa angkutan darat umum yang berjumlah 210 angkutan darat dengan jumlah penumpang 16.618 orang dengan menggunakan angkutan desa.

4.5.12 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2018, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo antara lain: pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi, Pembuatan Website Humas Pemerintah Kabupaten. Selain itu, dilaksanakan juga Program kerja sama informasi dengan massa media, melalui kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat terlihat lebih baik. Hal tersebut, ditandai dengan semakin meningkatnya implementasi penggunaan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lahat. Saat ini Dinas Komunikasi dan informasi menerapkan publikasi berbasis online pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat melalui website www.lahatkab.go.id dengan harapan data dan informasi Kabupaten Lahat dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan lengkap.

4.5.13 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Lahat sebanyak 358 koperasi menurun menjadi 168 koperasi di tahun 2018. Kurangnya kemampuan anggota koperasi dalam mengelola koperasi sangat berpengaruh pada jalannya usaha koperasi tersebut.

Persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2018 sebesar 22,14% sedangkan untuk Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Kecil sebesar 61,20%. Strategi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung upaya pencapaian target tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Lahat dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dan Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.

4.5.14 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan kerjasama di bidang penanaman modal antara instansi pemerintah baik tingkat propinsi maupun lembaga pusat. Selain itu juga dilaksanakan temu usaha antara pemerintah dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Lahat dengan pengusaha PMDN, dan Instransi terkait yang bertujuan untuk terwujudnya konsep kemitraan dan pengembangan di bidang investasi serta terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Lahat. Bagi pemohon yang akan membayar pajak dan retribusi atas izin yang dimohonkan cukup di Kantor DPM dan PTSP Kabupaten Lahat, selain itu pula bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Kantor Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.

4.5.15 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Pada kurun waktu 2014-2018, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga adalah meningkatnya prestasi generasi muda dan meningkatnya prestasi olahraga. Pembangunan di bidang kepemudaan dilakukan melalui peningkatan kualitas dari kegiatan yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Lahat. Kegiatan difokuskan pada pembekalan bagi pemuda dengan pelatihan keterampilan dan wawasan tentang kewirausahaan dengan harapan mampu mencetak pemuda produktif yang memiliki kompetensi dan mampu berperan aktif ditengah-tengah masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembibitan dan pembinaan atlit berprestasi di berbagai cabang olahraga agar mampu bersaing dan berprestasi pada

pertandingan olahraga ditingkat regional maupun nasional.

4.5.16 Urusan Perpustakaan

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren meningkat, seiring dengan meningkatnya persentase minat baca masyarakat Kabupaten Lahat. Capaian kinerja Jumlah pengunjung, peminjam dan koleksi buku pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam menunjang kegiatan dan Pelayanan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan khususnya meubelair dan sarana penunjang lainnya, antara lain pengadaan buku-buku perpustakaan untuk menambah koleksi bahan-bahan pustaka. Untuk menjangkau masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah-wilayah terpencil di seluruh Kabupaten Lahat, perlu adanya Perpustakaan Keliling. Selain itu, untuk menunjang minat baca pada anak-anak, perlu didirikan ruang baca khusus anak-anak. Ruangan ini rencananya akan dibuat menarik dengan dihiasi gambar-gambar warna-warni sesuai dunia anak-anak. Diharapkan dengan ruangan yang demikian, anak-anak lebih suka berkunjung dan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Bagi pengguna perpustakaan yang ingin mendapatkan informasi lewat internet disediakan sarana komputer untuk akses internet secara gratis. Begitu juga bagi mereka yang membawa sendiri komputer laptop atau PDA, disediakan juga fasilitas jaringan internet wireless.

Dinas Perpustakaan telah menggunakan kartu keanggotaan perpustakaan elektronik untuk tertibnya administrasi. Dengan sarana ini pengunjung perpustakaan cukup menggunakan kartu elektronik ini untuk peminjaman dan pengembalian buku. Secara otomatis komputer akan meng-update ke data base komputer. Sedangkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang prima, maka perpustakaan perlu menyediakan informasi-informasi bagi masyarakat luas mengenai koleksi buku-buku di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan

ke depan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada masyarakat antara lain peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemenuhan erpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang lengkap dan modern, meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri, meningkatkan pengembangan budaya baca dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan/pemustaka, meningkatkan pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan ke desa-desa, membangun gedung perpustakaan yang refresentatif, mewujudkan perpustakaan desa yang mandiri, mewujudkan perpustakaan berbasis digital secara nasional dan adanya ruang baca anak.

4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

4.6.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat seluas 15.400 km² yang terdiri dari perairan umum, kolam, tebat dan sawah. Lahan tersebut masih belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap Kabupaten Lahat sebesar 10.974 ton dengan jenis ikan yaitu nila, gurame, lele, patin, mas dan ikan lokal perairan umum.

Pada umumnya pelaku usaha di bidang perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat masih bersifat tradisional, untuk dikonsumsi pribadi dan belum dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Lahat. Ada beberapa jenis kelompok perikanan di Kabupaten Lahat yaitu Kelompok Budidaya Perikanan sebanyak 89 kelompok, Kelompok Usaha Bersama sebanyak 12 kelompok dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan sebanyak 2 kelompok. Selanjutnya, untuk pengembangan pembangunan di sektor perikanan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ditempatkan di beberapa kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan. Sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Lahat terdiri dari BBI Kota Agung seluas 6.202

m², BBI Tanjung Sakti seluas 6.000 m², KAD Tanjung Sirih sebanyak 1 unit, Pasar Benih Ikan sebanyak 1 unit, Pasar Ikan Jarai sebanyak 1 unit, Laboratorium Kesehatan Ikan sebanyak 1 unit, dan Kantor UPTD PBI Kecamatan Lahat.

Berdasarkan data potensi dan permasalahan yang ada, maka dibuat rencana pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lahat, pemenuhan tingkat konsumsi ikan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan. Beberapa rencana pembangunan di bidang perikanan yaitu meningkatkan luas area lokasi 2 (dua) unit Balai Benih Ikan yang terdapat di Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Sakti.

4.6.2 Urusan Pariwisata

Sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Lahat terus menggali potensi wisata dan melakukan promosi kepada wisatawan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja urusan pariwisata seperti meningkatkan promosi budaya dan pariwisata baik skala nasional maupun internasional, mengembangkan objek-objek wisata unggulan, pembangunan infrastruktur pada objek wisata dan sebagainya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat, diperlukan tersedianya sarana akomodasi yang memadai. Saat ini Kabupaten Lahat telah memiliki 5 (lima) hotel kelas bintang dan 7 (tujuh) hotel bukan kelas bintang. Sedangkan untuk rumah makan tercatat ada 151 rumah makan di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2018 Kabupaten Lahat memiliki 86 tempat objek wisata alam, 4 objek wisata buatan dan 11 tempat objek wisata budaya yang tersebar di 16 kecamatan. Pada tahun 2018, jumlah kamar akomodasi yang tersedia di hotel dan losmen yang ada di Kabupaten Lahat ada

sebanyak 520 kamar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 273 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas akomodasi hotel dan tenaga kerja pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan tingginya penggunaan kamar sehingga hotel harus menambah tenaga kerja dan kamar huni setiap tahunnya.

4.6.3 Urusan Pertanian

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki lahan sawah seluas 17.158 hektar dan lahan bukan sawah seluas 342.213 hektar. Salah satu sektor unggulan dalam pertanian adalah tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Tahun 2018, produksi padi (padi sawah dan Padi ladang) sebanyak 229.776 ton, produktivitas 54,30 kuintal per hektar dengan luas panen 42.029 hektar padi sawah dan 1.384 hektar padi ladang.

Selanjutnya untuk jenis tanaman palawija mencakup jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2018, produksi palawija yang paling banyak adalah produksi jagung yaitu sebesar 7.876 ton, disusul ubi kayu sebesar 2.125 ton, ubi Jalar sebesar 2.068 ton, Kedelai sebesar 422 ton, kacang tanah sebesar 198 ton, dan yang terkecil adalah produksi kacang hijau sebesar 160,5 ton. Selain tanaman palawija di Kabupaten Lahat juga terdapat tanaman buah-buahan.

Selanjutnya untuk jenis tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Lahat meliputi bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang panjang, cabe, cabe rawit, paprika, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam dan sebagainya.

Selain tanaman pangan terdapat banyak jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Hanya saja yang cukup menonjol adalah kopi dan karet, sementara kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar. Pada tahun 2018, luas tanaman

perkebunan kopi paling luas sebesar 54.441 ha jika dibandingkan dengan luas tanaman perkebunan lainnya yaitu karet sebesar 43.232 hektar, kelapa sawit sebesar 13.636 hektar, dan kakao sebesar 4.366 hektar.

Selain Urusan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lahat juga melaksanakan Urusan Peternakan di Kabupaten Lahat. Adapun hasil peternakan terdiri dari daging, telur dan susu. Produksi daging Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, produksi daging sebesar 2.353 ton meningkat menjadi 4.810 ton di tahun 2018. Demikian juga halnya dengan produksi telur, dimana pada tahun 2014 produksi telur mencapai 2.232 ton meningkat menjadi sebesar 2.443 ton di tahun 2018.

Hasil peternakan selain dari produksi daging dan telur, juga bisa dihitung dari populasi ternak. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Lahat terbagi menjadi populasi ternak besar dan populasi ternak kecil/unggas. Adapun yang termasuk populasi ternak besar adalah sapi (termasuk sapi perah), kerbau dan kuda, sedangkan yang termasuk populasi ternak kecil/unggas adalah kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam petelur dan itik. Pada tahun 2018, populasi ternak besar yang paling banyak adalah populasi sapi sebanyak 11.382 ekor dibandingkan populasi ternak besar lainnya seperti kerbau sebanyak 1.668 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil dan unggas yang paling banyak adalah populasi ternak kambing sebanyak 13.920 ekor dan populasi ternak ayam pedaging sebanyak 2.282.566 ekor.

4.6.4 Urusan Perdagangan

Pada tahun 2018 , sarana perdagangan di Kabupaten Lahat dilihat dari jenisnya berjumlah 1.833 fasilitas. Jenis sarana kios dan rumah makan merupakan jenis sarana perdagangan dengan persentase tertinggi yaitu 35,46 persen atau masing-masing sebanyak 650 kios, sedangkan fasilitas pasar umum di Kabupaten Lahat berjumlah 9 pasar.

4.7 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG

4.7.1 Urusan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lahat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun muatan laporan tersebut menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan, pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Elemen data yang dihimpun berasal dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Tim Penyusun, dan hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat dilanjutkan dengan *self-asessment* oleh Tim Evaluasi Daerah dan Setelah dilakukan penyempurnaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat untuk dilakukan pembahasan dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat.

4.7.2 Urusan Pengawasan

Capaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 memperoleh nilai 64,1 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lahat sudah menunjukkan hasil yang baik. Jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian tahun 2018 adalah mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap dapat mempertahankan nilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan baik atau predikat B.

4.7.3 Urusan Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membantu pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada periode 2014-2018, Bappeda Kabupaten Lahat telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJMD dan RKPD dengan tepat waktu dan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lahat akan menerapkan perencanaan berbasis *e_planning*.

4.7.4 Urusan Keuangan

Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.917.046.551.222,32 atau 105% dari target pendapatan tahun anggaran 2018. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar

Rp112.549.070.975,37 atau 90,94% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.377.663.737.906,00 atau 106,20% dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 426.833.742.340,95 atau 105,47%. Sedangkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.834.893.019.295,00 atau 95,21% dari target belanja tahun anggaran 2018 yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.119.633.141.296,00 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 715.259.877.999,00.

Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2018, yaitu penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi). Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 berasal dari SILPA sebesar Rp 1.942.278.544,69. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah ditandai dengan penerimaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bagi Kabupaten Lahat.

4.7.5 Urusan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan data tahun 2018 berjumlah 6.761 orang dengan komposisi Eselon II.B sebanyak 31 orang, Eselon III.A sebanyak 75 orang, Eselon III.B sebanyak 137 orang, Eselon IV. A sebanyak 720 orang, Eselon IV.B sebanyak 233 orang, Eselon V.A sebanyak 17 orang, Jabatan Fungsional tertentu Ahli dan Terampil sebanyak 3.548 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2000 orang.

Persentase ASN di lingkungan Pemkab Lahat berdasarkan golongan pada tahun 2018 meliputi golongan IV.C sebanyak 32 orang, golongan IV.B sebanyak 318 orang, golongan IV.A sebanyak 1.093 orang, golongan III.D sebanyak 1.219 orang, golongan III.C sebanyak 826 orang, golongan III.B sebanyak 1114 orang, golongan III.A sebanyak 936 orang, golongan II.D sebanyak 187 orang, golongan II.C sebanyak 561 orang, golongan II.B sebanyak 286 orang, golongan II.A sebanyak 139 orang, golongan I.D sebanyak 19 orang,

golongan I.C sebanyak 18 orang, golongan I.B sebanyak 9 orang dan golongan I.A sebanyak 4 orang.

4.7.6 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lahat. Badan ini merupakan pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian (kelitbangan) di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan rekomendasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lahat karena minimnya publikasi hasil penelitian terkait bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan serta masyarakat dan masih rendahnya kehadiran inovasi (produk, proses, organisasi, pasar dan perilaku) untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Lahat.

BAB V HASIL KEGIATAN

5.1 Sebaran Responden

5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

Tabel 5. 1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Responden	Percent
Gumay Talang	7	2,1
Gumay Ulu	5	1,5
Jarai	17	5,2
Kikim Barat	14	4,2
Kikim Selatan	9	2,7
Kikim Tengah	6	1,8
Kikim Timur	21	6,4
Kota Agung	17	5,2
Lahat	69	20,9
Lahat Selatan	14	4,2
Merapi Barat	19	5,8
Merapi Selatan	7	2,1
Merapi Timur	22	6,7
Muarapayang	9	2,7
Mulak Sebingkai	5	1,5
Mulak Ulu	9	2,7
Pagar Gunung	13	3,9
Pajar Bulan	19	5,8
Pseksu	8	2,4
Pulaupinang	6	1,8
Sukamerindu	10	3,0
Tanjung Sakti Pumi	18	5,5

Kecamatan	Jumlah Responden	Percent
Tanjungtebat	6	1,8
Gumay Talang	7	2,1
Total	330	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui responden berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Tabel 5. 2 Nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan

No	Kecamatan/Subdistrict	2023
1	Tanjung Sakti Pumi	18
2	Tanjung Sakti Pumu	14
3	Kota Agung	22
4	Mulak Ulu	16
5	Tanjung Tebat	14
6	Mulak Sebingkai	10
7	Pulau Pinang	10
8	Pagar Gunung	20
9	Gumay Ulu	10
10	Jarai	21
11	Pajar Bulan	20
12	Muara Payang	7

No	Kecamatan/Subdistrict	2023
13	Sukamerindu	10
14	Kikim Barat	19
15	Kikim Timur	32
16	Kikim Selatan	18
17	Kikim Tengah	9
18	Lahat	29
19	Gumay Talang	15
20	Lahat Selatan	10
21	Pseksu	11
22	Merapi Barat	19
23	Merapi Timur	14
24	Merapi Selatan	9
	Kabupaten Lahat	377

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2023

Tabel 5. 3 jumlah penduduk serta laju pertumbuhan menurut Kecamatan

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanjung Sakti Pumi	16,94	17,11	1,09	1,02
Tanjung Sakti Pumu	14,60	14,71	0,89	0,81
Kota Agung	13,74	13,90	1,23	1,16
Mulak Ulu	12,66	12,78	1,05	0,96
Tanjung Tebat	8,90	9,01	1,28	1,20
Mulak Sebingkai	5,73	5,77	0,81	0,73
Pulau Pinang	10,04	10,26	2,17	2,10
Pagar Gunung	13,04	13,18	1,10	1,02
Gumay Ulu	5,62	5,68	1,09	1,01
Jarai	20,56	20,68	0,63	0,55
Pajar Bulan	12,94	13,06	1,03	0,95
Muara Payang	8,93	8,98	0,64	0,55
Sukamerindu	8,08	8,15	0,84	0,75
Kikim Barat	18,18	18,51	1,92	1,84
Kikim Timur	32,52	33,15	2,02	1,94
Kikim Selatan	17,54	17,80	1,54	1,45
Kikim Tengah	10,21	10,40	1,99	1,92
Lahat	108,13	109,08	0,95	0,87
Gumay Talang	13,24	13,59	2,72	2,64
Pseksu	9,12	9,23	5,00	1,17
Lahat Selatan	13,82	14,50	1,25	4,91
Merapi Barat	26,27	26,92	2,57	2,49
Merapi Timur	25,66	26,17	2,07	1,99
Merapi Selatan	8,47	8,57	1,32	1,24
Kabupaten Lahat/ Lahat Regency	434,94	441,17	1,47	1,43

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2023

Perbedaan kepadatan jumlah penduduk per kilometer, luas wilayah, serta jumlah desa/kelurahan tentu akan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pelayanan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan kepada masyarakat. Supaya semua fasilitas-fasilitas yang telah tersedia dapat dinikmati secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka sangat perlu untuk memperhatikan dimana kecamatan – kecamatan yang menjadi pusat “pertumbuhan. Apabila suatu kecamatan memiliki kemampuan untuk menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan dampak

positif bagi daerahnya bahkan lebih jauh berdampak bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di sekitarnya. Untuk dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan tentu memiliki fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan yang memadai. Namun di samping itu, pengembangan potensi daerah dengan memperlihatkan komoditas-komoditas unggulan sangat perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa konsentrasi jumlah penduduk yang menyebar secara tidak merata. Hal ini dapat kita ketahui dengan mudah dengan melihat perbedaan rata-rata jumlah penduduk per kilometer di masing-masing kecamatan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah oleh karena faktor luas wilayah kecamatan yang juga tidak merata. Perbedaan kepadatan jumlah penduduk per kilometer, luas wilayah, serta jumlah desa/kelurahan tentu akan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pelayanan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan kepada masyarakat. Supaya semua fasilitas-fasilitas yang telah tersedia dapat dinikmati secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka sangat perlu untuk memperhatikan dimana kecamatan – kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan. Apabila suatu kecamatan memiliki kemampuan untuk menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan dampak positif bagi daerahnya bahkan lebih jauh berdampak bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di sekitarnya. Untuk dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan tentu memiliki fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan yang memadai.

Tabel 5. 4 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tanjung Sakti Pumi	3,90	3,88	63,00	63,14
Tanjung Sakti Pumu	3,36	3,33	64,00	64,07
Kota Agung	3,16	3,15	83,00	83,94
Mulak Ulu	2,91	2,90	117,00	117,86
Tanjung Tebat	2,05	2,04	108,00	108,92
Mulak Sebingkai	1,32	1,31	90,00	91,00
Pulau Pinang	2,31	2,33	90,00	91,88
Pagar Gunung	3,00	2,99	124,00	124,92
Gumay Ulu	1,29	1,29	65,00	65,28
Jarai	4,73	4,69	123,00	123,45
Pajar Bulan	2,97	2,96	89,00	89,38
Muara Payang	2,05	2,04	238,00	239,47
Sukamerindu	1,86	1,85	146,00	147,56
Kikim Barat	4,18	4,20	67,00	68,05
Kikim Timur	7,48	7,51	58,00	58,73
Kikim Selatan	4,03	4,03	141,00	142,63
Kikim Tengah	2,35	2,36	38,00	39,16
Lahat	24,86	24,73	1 005,00	1 013,75
Gumay Talang	3,04	3,08	53,00	54,44
Pseksu	2,10	2,09	34,00	50,20
Lahat Selatan	3,18	3,29	75,00	53,85
Merapi Barat	6,04	6,10	113,00	115,72
Merapi Timur	5,90	5,93	98,00	100,44
Merapi Selatan	1,95	1,94	42,00	42,82
Kabupaten Lahat/ Lahat Regency	100,00	100,00	100,00	101,14

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2023

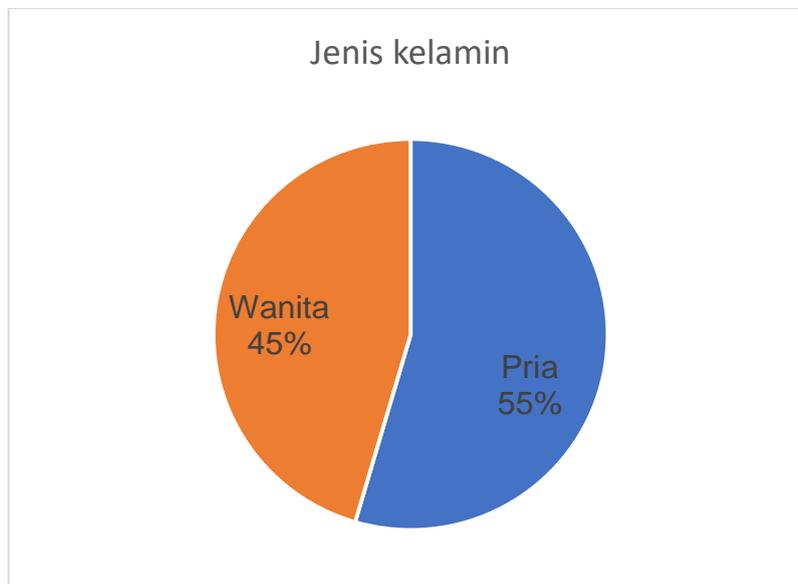
5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Tabel 5. 5 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Usia	Frequency	Percent
< 20 Tahun	5	1,5
20 - 29 Tahun	34	10,3
30 - 39 Tahun	98	29,7
40 - 49 Tahun	98	29,7
> 50 Tahun	95	28,8
Total	330	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut kelompok usia di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 29,7% responden berusia 30-39 tahun, disusul 29,7% penduduk berusia 40-49 tahun, kemudian 10.3% penduduk berusia 20-29 tahun, lalu sebesar 28.8% penduduk berusia lebih dari 50 tahun, dan terakhir kelompok usia di bawah 20 tahun sebesar 1.5%. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin



Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut jenis kelamin di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui

sebanyak 54.5% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 45.5% diantaranya responden berjenis kelamin perempuan, responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hal ini akan semakin memperberat persoalan kelangkaan modal karena untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi pada setiap tahunnya maka perlu dilakukan investasi secara besar-besaran (Jhingan, 1992: 26-27). Laju pertumbuhan penduduk yang beragam, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat diiringi dengan tingkat pendapatan yang rendah dan nihilnya tingkat pemupukan modal merupakan kesulitan bagi negara berkembang. Output yang meningkat karena teknologi akan tertekan oleh pertumbuhan tersebut, akibatnya tidak ada perbaikan taraf hidup.

Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan dan sektor industri yang tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja. Navarrete (dalam Jhingan, 1992: 29) mengatakan: pengangguran dapat dilukiskan sebagai suatu keadaan, dimana pengalihan sejumlah tertentu faktor tenaga kerja ke bidang lain tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asal. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa produktivitas marjinal unit-unit faktor tenaga kerja tempat asal mereka kerja adalah nol atau menduduki nol atau bahkan negatif. Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan berpenduduk padat pengangguran tersembunyi diperkirakan 25-30 persen dari tenaga kerja (di dalam pertanian). Dalam menentukan betapa penting arti pendidikan di masa pembangunan ekonomi, suatu negara tidak dapat mengaku dirinya maju, tanpa menyelenggarakan pendidikan di bidang peradaban industri (Cairncross dalam Jhingan, 1992: 70). Petani harus di bawah menuju perekonomian moneter dan tidak dibiarkan saja bergerak

pada usaha tani pangan. Para pekerja harus dibiasakan bekerja pada jam kerja yang ditentukan di pabrik-pabrik untuk mendapat bayaran. Kota-kota harus tumbuh, begitu juga bank dan usaha bisnis. Hasil ilmu pengetahuan harus diterapkan di seluruh perekonomian, dimana harus muncul kelompok pemuda bisnis, administrasi dan politik, sebagai nyawa kehidupan bangsa yang dapat menjadi tumpuan dalam mempertahankan momentum pembangunan. Faktor manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada efisiensi. Para ahli ilmu ekonomi modern 32 menyebutkan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Dalam mengetahui perkembangan suatu wilayah dari aspek sosial, kemiskinan (poverty) merupakan indikator yang digunakan dalam menilai perkembangan suatu wilayah (Hill dan Williams, 1989: 195).

5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku

Tabel 5. 6 Sebaran Responden Menurut Suku

Suku	Jumlah Responden	Prosentase
Jawa	5	1,5
Sunda	6	1,8
Bali	1	0,3
Lainnya	58	17,6
Sunda Banten	1	0,3
Jawa 1 (Jawa Tengahan)	21	6,4
Jawa 2 (Jogja : sleman, Kulon Progo, Gn Kidul, Bantul, dll)	1	0,3
Jawa 3 (Jawa Timuran)	9	2,7
Lampung	1	0,3
Palembang	5	1,5
Batak	2	0,6
Melayu	3	0,9

Suku	Jumlah Responden	Prosentase
Ogan komering	2	0,6
Pasemah	97	29,4
Gumai	25	7,6
Lematang	93	28,2
Total	330	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran suku di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 29.4% dari suku Pasemah sekaligus yang paling banyak, sedangkan suku Bali, sunda banten dan jawa 2 hanya 0.3% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Lahat dikenal di Sumatera Selatan dengan 4 suku yang ada di sana sehingga disebut Lekipali.

Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan Pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo (3.159 meter di atas permukaan laut). Di tanah yang relatif subur ini orang Lahat umumnya hidup dari bertani.

Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok Lahat tersebut adalah orang Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang, sehingga dulu mereka sering juga disebut kelompok Lekipali. Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Di antara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri

yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya.

Orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan dan di sini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, karena kota kabupatennya, yaitu Kota Lahat, merupakan daerah lintas provinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi. Di dalam jumlah tersebut sudah termasuk anggota suku bangsa pendatang lainnya. Penduduk pendatang yang terbanyak adalah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau, dan Pirsus Senabing. Penduduk pendatang lainnya adalah orang Semendo yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Menurut cerita rakyat setempat, orang Semendo ini pada masa lampau merupakan keturunan orang Lahat yang merantau ke daerahnya yang sekarang. Di daerah kota Lahat juga banyak bermukim pendatang keturunan China.

Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Diantara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya. Di Kabupaten Lahat orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan dan disini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, antara lain karena kota kabupatennya yakni Kota Lahat, merupakan daerah lintas antar provinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi. Penduduk pendatang yang terbanyak ialah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau dan Pirsus Senabing.

Prinsip keturunan orang Lahat bersifat patrilineal, artinya garis keturunan dihitung melalui kerabat laki-laki "pihak ayah", sehubungan dengan prinsip keturunan ini dalam masyarakat

dikenal sistem pewarisan gelar-gelar yang diturunkan juga melalui garis laki-laki. Pada masyarakat dusun Tanjung Payang yang termasuk salah satu dusun di kecamatan Kota Lahat orang-orang yang berasal dari keturunan laki-laki dari nenek moyang yang pertama kali membuka areal persawahan dan dusun disebut Jurai Tue.

Jurai Tue di dusun ini ada dua orang yakni yang berasal dari keturunan nenek moyang dari Demak dan keturunan dari Majapahit. Kedudukan Jurai Tue dalam masyarakat dipandang sangat tinggi. Setiap kali masyarakat hendak memulai usaha yang menyangkut persawahan, mereka harus meminta izin kepada jurai tue terlebih dahulu.

Desa atau dusun di Lahat dipimpin oleh kepala desa "rie", selain berbagai kepada pemerintahan, seorang rie sekaligus bertindak sebagai kepala adat di desanya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh tua-tua dusun yakni orang yang dituakan dalam kampung. Untuk memimpin dan mengawasi soal-soal yang menyangkut keagamaan terdapat penghulu atau khatib. Khusus untuk mengatur soal persawahan masyarakat diangkat seorang Ketua Ataran yang bertugas mengawasi kegiatan masyarakat kampung dari masa penanaman, pemakaian air hingga panen.

Seperti halnya masyarakat modern, Masyarakat Adat Suku Lahat juga memiliki sistem pemerintahan yang menjalankan tradisi suku tersebut. Dusun-dusun orang Suku Lahat dipimpin oleh Rie sebagai kepala pemerintahan setempat. Rie juga sekaligus menjadi kepala adat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala adat, Rie dibantu oleh tua-tua, atau yang dianggap sesepuh (orang yang dituakan) di dusun tersebut. Lalu ada Penghulu atau disebut juga dengan Khatib. Keduanya memiliki tugas memimpin hal-hal yang terkait dengan ritual-ritual keagamaan atau adat. Ada juga yang bertugas khusus mengatur soal persawahan, mulai dari menanam, pemakaian air hingga saat masa panen tiba. Jabatan ini disebut sebagai Ketua Ataran.

Di samping mempunyai sejumlah megalitik (batu besar/monumen kuno) berusianya ribuan tahun, Kabupaten Lahat pun mempunyai sejumlah lokasi tinggal tradisional yang berusia ratusan tahun. Rumah yang dinamakan sebagai ghumah baghi atau lokasi tinggal baghi (rumah tua) berada di beberapa kecamatan. Dahulunya delapan kecamatan ini dikenal dengan nama Besemah Padang Libagh dan secara kultur adat istiadat sama dengan masyarakat Pagaralam yang dinamakan Besemah, yang dahulunya unsur dari Lahat.

Keberadaan lokasi tinggal baghi di delapan kecamatan ini tersebar di desa-desa laksana di Kecamatan Kota Agung, tampak ada di Desa Bangke, Mulak Ulu dan salah satunya ada di Desa Gramat. Beberapa rumah, kondisinya menyedihkan tergambar pada sebanyak bangunan. Sebagian lokasi tinggal yang rata rata usianya di atas ratusan tahun ini, tidak sedikit yang telah lapuk. Bahkan sejumlah diantaranya tak terurus dan terpinggirkan diantara rumah-rumah penduduk dengan desain yang lebih modern. Tak laksana rumah canggih saat ini, lokasi tinggal baghi makin terpinggirkan. Maklum saja, desainnya yang klasik tidak unik warga guna mencontohnya ketika membangun. Jika merenovasi, tanpa sadar kemurnian rumah itu hilang. Tak ayal, keberadaannya sekarang terancam punah dan bermukim jadi kenangan.

5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 5. 7 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah Responde n	Prosentase Responde n
1.	Tidak sekolah	2	0,6
2.	SD/Sederajat	91	27,6
3.	SLTP/Sederajat	62	18,8
4.	SLTA/Sederajat	149	45,2

No	Pendidikan terakhir	Jumlah Responden	Prosentase Responden
5.	PT dan Sederajat	26	7,9
6.	Total	330	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran tingkat Pendidikan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 45.2% berpendidikan SMA sederajat, kemudian peringkat kedua sebesar 27.6% berpendidikan SD/Sederajat, lalu 18.8% berpendidikan SMP/Sederajat, untuk pendidikan tinggi sebesar 7.9%, dan masyarakat yang tidak sekolah sebesar 0,8% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Pembangunan ekonomi tidaklah mungkin tanpa pendidikan. Melalui pendidikan umum pemerintah dapat meningkatkan persediaan buruh efektif dan kapasitas produktif bangsa, serta lembaga latihan yang diperlukan untuk memberikan pengajaran kepada ahli mesin, montir listrik, tukang, perawat, guru, penyuluh pertanian dan lain-lain. Pendidikan tinggi dan lembaga penelitian didirikan untuk mencetak dan meningkatkan jumlah dokter, administrator, insinyur dan semua jenis personil terlatih. Program pendidikan pada usaha menjalin kesatuan bangsa pada umumnya, memanfaatkan energi rakyat dan membangun bangsa dan sumber daya manusia di seluruh negeri, investasi dalam mendidik massa sama juga produktifnya. Galbraith (dalam Jhingan,1992: 550) berpendapat” Menolong petani dan pekerja dari kebutuhurufan mungkin merupakan suatu tujuan tersendiri, tetap juga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan bagi setiap bentuk

kemajuan pertanian. Dipandang secara demikian, pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang sangat produktif". Dalam melihat perkembangan suatu wilayah dari segi pendidikan, alternatif yang digunakan untuk mengukur perkembangan adalah rasio banyaknya 33 pelajar pada jenjang SLTP, yaitu banyaknya pelajar grup usia (13-15 tahun) sebagai indikator pendidikan(Hill dan Williams, 1985: 191-195).

5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama

Tabel 5. 8 Sebaran Responden Menurut Agama

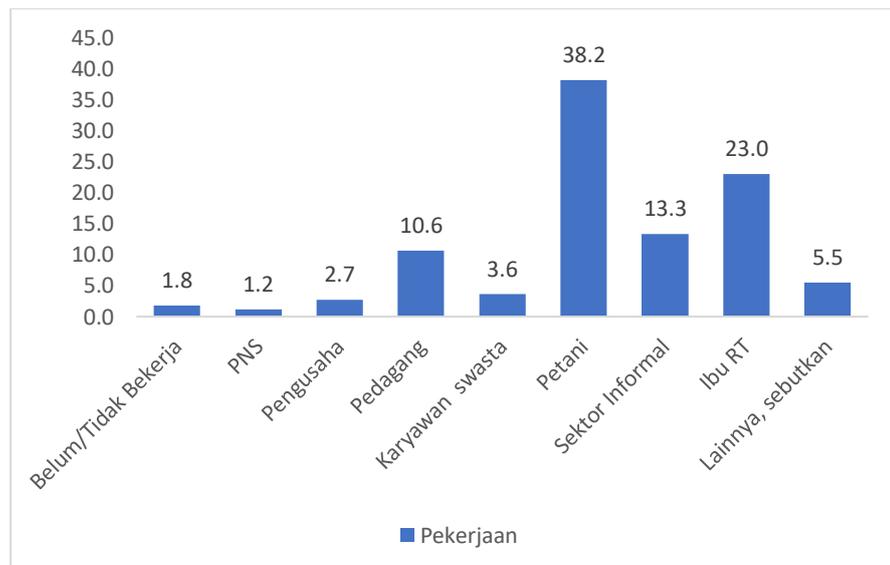
No	Agama	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	Islam	327	99,1
2.	Kristen	2	0,6
3.	Katolik	1	0,3
	Total	330	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut agama responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 96,86% beragama Islam, kemudian 0.6% beragama kristen, lalu 0.3% beragama katolik, responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Masyarakat Lahat kini paling banyak pemeluk Agama Islam, walaupun demikian sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menyediakan sesajen atau membacakan mantera-mantera tertentu.

Di antara upacara adat yang terpenting ialah yang berkaitan dengan pengerjaan sawah, yang disebut Sedekah Rame. Tujuannya ialah agar padi yang ditanam selalu dilindungi oleh Tuhan YME dan banyak hasilnya. Dalam upacara ini terdapat tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan, diantaranya meminta ijin kepada Jurai Tue, mengadakan pertemuan antara rie dan tua-tua kampung memberikan sesajen berupa pembakaran kemenyan, pembacaan kisah puyang pertama yang membuka areal persawahan, pembacaan doa, makan bersama serta menyelenggarakan upacara mubuh babak, yakni mengeringkan dan membersihkan saluran air serta menangkap ikan.

5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan



Gambar 5. 1 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasar Gambar di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pekerjaan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 38,2% sebagai petani, kemudian peringkat terendah sebagai karyawan swasta. responden dalam kegiatan ini telah

selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Variabel perekonomian yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah diukur berdasarkan produktivitas, perubahan struktur ekonomi dan perubahan taraf hidup masyarakat yang akan mendorong terjadinya transformasi pada lapangan kerja, terutama perubahan mata pencaharian penduduk dari sektor primer, ke sektor sekunder dan tersier. Adanya peningkatan produksi komoditas wilayah tersebut mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat wilayah itu sendiri. Struktur ekonomi merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah, dimana beralihnya mata pencaharian masyarakat suatu daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan keluarga dan pola konsumsi masyarakat, baik meningkat ataupun menurun.

Kabupaten Lahat sebagai daerah berbasis pertanian, lapangan kerja utama penduduknya adalah sektor primer (pertanian). Perkembangan perekonomian setiap kecamatan di Kabupaten Lahat diindikasikan dengan terjadinya transformasi bidang pekerjaan dari primer ke sekunder dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, antara lain terjadinya alih lapangan pekerjaan dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebelum pemekaran wilayah, sebagian besar masyarakat (80%) bekerja pada sektor primer (pertanian), yaitu antara tahun 1990–1998, namun setelah tahun 2021 komposisi pekerja yang berada di kecamatan mengalami peralihan ke sektor sekunder. Hal ini terlihat dengan meningkatnya persentase pekerja sektor sekunder sebesar 50%. Pergeseran ini didorong oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada di setiap kecamatan. Hal ini pula mencerminkan adanya peningkatan pada sektor pembangunan

serta mencerminkan adanya peningkatan modal, terutama dari alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

Sebelum pemekaran wilayah kabupaten, hasil pertanian berupa beras relatif lebih besar, akan tetapi setelah pemekaran wilayah produksi hasil pertanian padi cenderung menurun. Pada akhirnya, hal tersebut mempengaruhi pendapatan dan tingkat konsumsi keluarga pada sebagian besar kecamatan, antara lain: Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo dan Ulu Musi. Adapun untuk kecamatan lainnya cenderung mendatar, yang berarti kesejahteraan akibat adanya faktor nonekonomi, seperti penambahan penduduk akan mendorong demand, sehingga harga pasar meningkat. Produksi kedua yang dominan di kecamatan dalam Kabupaten Lahat adalah produksi hasil perkebunan berupa biji kopi yang merupakan komoditas unggulan bagi Kabupaten Lahat. Dalam memenuhi permintaan pasar, biji kopi mempunyai harga yang cukup baik, sehingga hasil perdagangan kopi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi kecamatan di Kabupaten Lahat.

masyarakat Lahat mayoritas tetap sebagai petani sebagai penopang ekonomi masyarakat. Hal ini senada dengan analisis unsur kegiatan sosial ekonomi tidak pelak lagi sebagai faktor sangat penting didalam memacu proses pertumbuhan kota, karena banyak dari pesatnya pembangunan suatu daerah bertolak dari jumlah dan intensitas kegiatan sosial ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Kegiatan sosial ekonomi secara fisik dapat dikenali melalui struktur penggunaan lahan. Setiap kawasan yang dicirikan oleh kegiatan sosial ekonomi relatif besar akan terlihat dari intensitas guna lahan yang tinggi. Pertumbuhan Kota Lahat yang diawali sekitar pusat kota, tampaknya tidak memiliki struktur yang jelas dari perkembangan kota, akibat kegiatan sosial-ekonomi kota selalu mengacu kepada konsep efisiensi ruang, yaitu memanfaatkan keuntungan dari kondisi ruang yang ada.

Kecenderungan berkonsentrasi (berkelompok) ini menunjukkan gejala yang akan terus berlangsung, hal tersebut

terlihat dari adanya perembetan dan perluasan kegiatan ke daerah-daerah permukiman atau mengikuti jaringan jalan utama, sepanjang masih dapat diperoleh keuntungan aksesibilitas. Sebagai contoh, meluasnya kegiatan komersial di sepanjang jalan Jl. Mayor Ruslan, Jl. K.Komar, Jl. Pasar Bawah, Jl. Inspektur Yazid, Jl. Kaptein Zein Ali, Jl. Amir Hamzah, Jl. RE. Martadinata dan Jl. Prof. Asrul Salim. Apabila kegiatan komersial ini dibiarkan berkembang mengikuti kecenderungan, maka pada masa yang akan datang kondisinya sungguh mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini dikarenakan pada suatu saat akan tercapai batas optimal (optimum size). Brian Goodall (1972) mendefinisikan batas optimal sebagai proses pertumbuhan yang stagnan dan tidak layak untuk kehidupan dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan wilayah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi yang secara kontinu merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi yang dapat diukur dan obyektif, adanya perluasan tenaga kerja, modal, serta volume perdagangan dan konsumsi, perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga. (Jhingan, 1983). Kutnets (dalam Jhingan, 1983: 72-84) menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasari pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebagainya: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita; laju kenaikan perkapita yang tinggi diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk; (2) Peningkatan produktivitas; pertumbuhan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju produk perkapita sebagai akibat adanya perbaikan kualitas; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi; ditandai dengan peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum,

serta perubahan status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan yang ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan; (5) Ekspansi negara maju; pertumbuhan ini ditandai dengan revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi; dan (6) Arus barang, modal, dan orang antarbangsa; pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan migran akibat mudahnya angkutan antarbenua.

Ekonomi Makro dalam Perkembangan Wilayah Ruang lingkup ekonomi makro meliputi tingkat harga secara umum (indeks harga), serta yang berkenaan dengan pendapatan nasional, investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perkembangan pembangunan yang terjadi digerakkan oleh adanya investasi (Syamsudin, Ahmad dan Marzuki, 2007: 1-4). Investasi sebagai pendayagunaan diartikan sumber daya hari ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Pertumbuhan investasi yang terjadi serta keuntungan yang berpengaruh secara luas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

Ekonomi Mikro dalam Perkembangan Wilayah Perkembangan wilayah ekonomi mikro menitikberatkan secara individual pada pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan dan faktor-faktor produksi; tenaga kerja dan modal sampai pada keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan mata rantai perkembangan ekonomi wilayah. Aktivitas perekonomian masyarakat pada sektor riil akan meningkatkan pendapatan keluarga, terutama ekonomi basis (Ricardson dalam Tarigan, 2005: 55-56). Hal ini merupakan aktivitas ekonomi mikro yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

Tabel 5. 9 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

No	Penghasilan perbulan	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	0	1	,2
2.	Tidak Berpenghasilan	23	7,0
3.	<Rp.1.000.000	107	32,5
4.	Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000	89	27,1
5.	Rp.2.000.000 - Rp.3.000.000	30	9,1
6.	> Rp.3.000.000	80	24,3
	Total	330	100

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pendapatan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 27.1% berpenghasilan Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000. sedangkan 9.1% berpenghasilan Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. sebanyak 24.3% berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000. serta sebanyak 32.5% berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000. dan sebanyak 7.2% masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap. Data responden di atas bisa diselaraskan dengan tabel pengeluaran masyarakat di bawah ini.

Tabel 5. 10 perkapita masyarakat di Kabupaten Lahat

Golongan Pengeluaran (Rp)	2023
< 150 000	-
150 000–199 999	-
200 000–299 999	0.4
300 000–499 999	13.0
500 000–749 999	25.4
750 000–999 999	18.5
1 000 000–1 499 999	21.6

> 1 500 000	21.1
Jumlah/Total	100

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka 2023

5.2 Pilar Utama Model Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menciptakan kesejahteraan di daerah. Keunikan ekonomi kreatif yang menjadi ciri bagi hampir seluruh sektor ekonomi kreatif yang terdapat dalam industry kreatif- adalah peran sentral sumber daya insani sebagai modal insani disbanding faktor-faktor produksi lainnya . Dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat lima pilar utama yang harus diperkuat agar industri kreatif dapat terus tumbuh dan berkembang. Kelima pilar utama tersebut antara lain:

1. Industri

Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi dari suatu produk baik itu berupa barang ataupun jasa pada suatu area tertentu. Industri menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi kreatif ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori Michael Porter yang dikenal dengan sebutan five forces model. Porter berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang harus dianalisis jika perusahaan ingin berjalan sukses dan bertahan dalam suatu industri tertentu, yaitu persaingan anta rperusahaan sejenis, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pemasok, dan kekuatan tawar pembeli.

2. Teknologi

Kemajuan teknologi sangat penting peranannya dalam segala bidang misalnya dalam industri kreatif ini yang berbasis

pada kreativitas manusia dan terdapat pengetahuan di dalamnya. Teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu tetapi termasuk di dalamnya adalah kumpulan teknik atau metode-metode, atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Teknologi merupakan tools bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, teknologi dapat digunakan untuk berkreasi, memproduksi, mencari informasi, sarana berkomunikasi dan bersosialisasi yang akan memudahkan proses bisnis.

3. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan adalah input bagi suatu proses penciptaan nilai tambah, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lain. Ide dan kreativitas merupakan sumbangan dari sumber daya manusia sebagai human capital. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, seperti kayu, rotan, kapas, batu-batuan bahkan sampai ke logam mulia. Sinergi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam yang optimal akan menciptakan daya kreasi berupa produk yang bernilai.

4. Institusi

Merujuk pada buku —Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015,II yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI, institusi didefinisikan sebagai tatanan sosial di mana didalamnya termasuk kebiasaan, norma, adat istiadat, aturan serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial dapat bersifat informal dan formal. Adat istiadat, norma dan kebiasaan dapat digolongkan ke dalam tatanan sosial informal. Sedangkan tatanan sosial formal seperti hukum dan peraturan yang berlaku. Industri kreatif yang berbasis pada kreativitas sangat erat dengan HKI (Hak Kekayaan atas Intelektual) sehingga diperlukam dukungan dari pemerintah mengenai perlindungan HKI ini agar

karya-karya yang dihasilkan merupakan karya orisinal dari seorang kreator. Dengan demikian kasus-kasus pembajakan dapat ditekan sampai akhirnya dapat dihilangkan khususnya di Indonesia ini.

5. Lembaga intermediasi keuangan

Pilar terakhir yang sangat penting menopang ekonomi kreatif adalah lembaga intermediasi keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga yang menyalurkan pendanaaan kepada masyarakat terutama para pelaku bisnis di industri kreatif baik berupa pinjaman/kredit maupun dalam bentuk modal/ekuitas. Sudah lazim kita dengar salah satu faktor produksi yang dapat menghambat para pelaku bisnis (entrepreneur) pemula adalah dalam hal modal. Sekarang ini banyak ide-ide kreatif yang berasal dari kaum muda namun usaha mereka non formal dan belum mature, sehingga dibutuhkan dukungan yang kondusif terhadap akses-akses finansial.

5.3 Aktor Utama Model Pengembangan Ekonomi Kreatif

1. Intelektual

Dalam konteks ekonomi kreatif, para intelektual mencakup budayawan, seniman, punakawan, begawan, para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan, para pelopor paguyuban, sanggar budaya dan seni, individu atau kelompok studi dan peneliti, penulis, dan tokoh-tokoh lainnya di bidang seni, budaya (nilai dan filsafat) dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengembangan industry kreatif. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tokoh intelektual baik dari bidang seni maupun bidang lainnya yang mempunyai potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia, misalnya M.H Ainun Nadjib, Sudjiwo Tedjo, Rhenald Khasali, Iwan Fals, (Alm) Rendra, Saung Udjo dan masih banyak lagi. Para intelektual ini memiliki kapasitas yang sangat besar dalam memperkuat basis-basis formal dan informal dari

inovasi, dan memiliki kemampuan untuk mematangkan konsep-konsep inovasi dan juga memiliki kapasitas mendesiminasikan informasi dengan jejaring di dunia internasional.

2. Intelektual

Bisnis merupakan suatu usaha, kegiatan atau sistem yang bertujuan untuk menciptakan atau memberikan nilai/manfaat bagi suatu lingkungan masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Perwujudan bisnis sering diartikan dengan sebuah entitas atau perusahaan di mana terdapat beberapa fungsi operasional di dalamnya, yaitu manajemen pemasaran, operasi dan produksi, keuangan, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Para pelaku bisnis harus memperhatikan keunggulan bersaingnya agar dapat bertahan dalam industrinya. Manajemen perusahaan perlu mempelajari lebih mendalam sumber daya yang dapat diandalkan untuk bersaing di lingkungan bisnis yang kompetitif dan meletakkan pengungkit (*leverage*) pada sumber daya yang mampu menempatkan perusahaan pada posisi daya saing dalam jangka panjang. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menjadi faktor pembeda perusahaan dalam persaingan melalui kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan di setiap pekerjaan mereka

3. Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola suatu negara, sebagai sebuah kesatuan politik serta memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang di wilayah tertentu. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah dibantu oleh para menteri yang terbagi dalam kementerian-kementerian yang membawahi badan-badan negara. Dalam mewujudkan pengembangan

ekonomi kreatif suatu bangsa diperlukan dukungan pemerintah, baik pemerintah daerah dan pusat, akan berjalan dengan kondusif. Hal ini disebabkan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya pada pembangunan industrinya melainkan juga pada pembangunan ideologi, sosial, budaya, dan politik.

Sebagai contoh pemerintah Korea Selatan telah berhasil mengembangkan bahkan memajukan ekonomi kreatifnya pada sektor film, musik, fesyen sampai mendunia yang dikenal dengan gelombang hallyu (hallyu wave). Saat ini juga hallyu diikuti dengan banyak perhatian pada produk buatan Korea Selatan, misalnya masakan, barang elektronik serta mempromosikan bahasa dan budaya Korea Selatan. Hal ini terjadi bukan untuk waktu yang instan. Pemerintah Korea Selatan sendiri mempersiapkan budaya korea menjadi kiblat hiburan di dunia telah dirintis selama dua puluh tahun. Hal ini dimulai dengan pemberian beasiswa kepada para seniman untuk belajar bagaimana dapat membuat film dan musik dengan kualitas yang baik sehingga bisa disejajarkan dengan produk-produk Hollywood. Dampaknya banyak para wisatawan yang berbondong-bondong datang ke Korea Selatan untuk berwisata yang akhirnya sektor pariwisata Korea Selatan dapat menyumbangkan devisa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Korea Selatan menyadari dengan penuh bahwa human capital yang menjadi basis industri kreatif mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan melihat hallyu wave berhasil menembus dunia, pemerintah Indonesia dapat melakukan studi banding mengenai hal ini.

LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH

1. Canangkan program percepatan ekonomi dengan kebijakan EKONOMI/ INDUSTRI KREATIF
2. Perda di industri KREATIF yang diunggulkan dan berikan penugasan pada para Kepala Daerah untuk KOORD pelaks I s/d V
3. Bentuk TIM KHUSUS untuk koordinasi program & pelaksanaannya, termasuk monev KEGIATAN: OUTPUT:



5.4 Potensi dan daya saing usaha kreatif di Lahat

Jumlah koperasi UMKM di Kabupaten Lahat pada tahun 2021-2022 disajikan pada tabel berikut:

No.	Jenis Koperasi	Jumlah	
		2021	2022
1	Koperasi Serba Usaha	69	68
2	Koperasi Simpan Pinjam	8	8
3	Koperasi Pasar	1	1
4	Koperasi Jasa	-	-
5	Koperasi Konsumen	-	-
6	Koperasi Unit Desa	41	41
7	Koperasi Pegawai Republik Indonesia	48	48
8	Koperasi	190	190
9	Primkop	4	4
10	Koperasi Karyawan	20	20
11	Koperasi lainnya	7	7
12	Koperasi Wanita	29	29
13	Koperasi Tani	9	9
Jumlah		426	425

Sumber:

<https://data.lahatkab.go.id/sites/default/files/Jumlah%20Koperasi%20Tahun%202021%20-%202022.pdf>

Sedangkan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Lahat pada tahun 2021-2022 disajikan pada tabel berikut:

No.	Jenis Koperasi	Jumlah (Tahun)	
		2021	2022
1	Koperasi Serba Usaha		387
2	Koperasi Simpan Pinjam		1,339
3	Koperasi Pasar		-
4	Koperasi Jasa		-
5	Koperasi Konsumen		-
6	Koperasi Unit Desa		1,326
7	Koperasi Pegawai Republik Indonesia		2,466
8	Koperasi		3,038
9	Primkop		646
10	Koperasi Karyawan		-
11	Koperasi lainnya		-
12	Koperasi Wanita		-
13	Koperasi Tani		-
	Jumlah	0	9,202

Sumber:

<https://data.lahatkab.go.id/sites/default/files/Jumlah%20Koperasi%20Tahun%202021%20-%202022.pdf>

jumlah tersebut belum mewakili seluruh UMKM, karena masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum terdaftar.

Pada industri ekonomi kreatif sektor fashion, usaha fashion ayu citra dalam mempromosikan produknya adalah menggunakan instagram dengan berbagai bentuk yaitu dapat live instagram, dan juga menampilkan gambar produk yang sudah dikemas atau didesain dengan menarik agar dapat mempengaruhi atau menarik perhatian konsumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan pelaku usaha bahwa kegiatan promosi lebih di tekankan pada media sosial berupa instagram dan tik tok.

Kreativitas pelaku industri ekonomi kreatif di kabupaten Lahat mengalami berbagai kesulitan dan mulai dipaksakan untuk beradaptasi pada teknologi. Dengan kemampuan teknologi, para pengusaha dapat mengalihkan budaya konvensional dalam promosi menjadi budaya teknologi dalam promosi. Banyaknya keuntungan dalam promosi menggunakan teknologi adalah mendapatkan jangkauan pasar yang sangat luas. Kegiatan promosi dilakukan oleh pengusaha atau seseorang untuk memperkenalkan produk dan menjadikan konsumen tertarik pada sebuah produk. Warnadi dan Triyono (2019) mengungkapkan bahwa aktifitas promosi dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menyampaikan informasi terkait

produk barang ataupun jasa kepada konsumen untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan keinginan dalam membeli produk. Pada era pandemi ini para pelaku usaha lebih memanfaatkan digital marketing dalam aktivitas promosi. Digital marketing yang biasa digunakan oleh pelaku usaha adalah bentuk digital marketing yang saat ini sedang tren dikalangan remaja antara lain media sosial berupa instagram, facebook yang memang memiliki fungsi untuk mengurum gambar dan video serta memiliki fasilitas chat.

Pemerintah memiliki program pengembangan ekonomi kreatif melalui badan ekonomi kreatif untuk tataran daerah dan operasionalnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Lahat sudah waktunya menjadi jejaring kota kreatif Indonesia. Dengan adanya Lahat Creative merupakan sebuah upaya membangun ekosistem kreatif yang kondusif. Profil usaha creative di Kabupaten Lahat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 11 Profil Usaha Kreatif di Lahat

No	Pertanyaan	Skor	Konversi
1	Ketersediaan Pasar;	46,0	Cukup
2	Ketersediaan Bahan Baku;	51,3	Besar
3	Sumbangan Terhadap Perkonomian;	42,3	Cukup
4	Sarana Produksi/Usaha;	40,3	Cukup
5	Sosial Budaya (Faktor Endogen);	43,1	Cukup
6	Penyerapan Tenaga Kerja.	35,5	Cukup
7	Kompetitor	51,9	Besar
8	Prospek untuk ke depan	50,9	Besar
9	Kebutuhan Inovasi	50,3	Besar
10	Standarisasi	35,8	Cukup

No	Pertanyaan	Skor	Konversi
11	Pembinaan	36,3	Cukup
12	Akses modal	35,5	Cukup
13	Legalitas dan pajak	45,6	Cukup

Sumber: Hasil lapangan 2023

Berdasar tabel di atas bahwa di Kabupaten Lahat memiliki Ketersediaan Bahan Baku; Kompetitor; Prospek untuk ke depan dan Kebutuhan Inovasi sudah sangat besar. Sedangkan masyarakat dapat terdorong untuk berusaha kreatif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 12 Identifikasi Dorongan Berusaha Kreatif

No	Pertanyaan	persepsi	
1	saya sudah memiliki usaha yang mampu menopang keuangan rumah tangga sekaligus memberdayakan orang lain	43,6	Cukup
2	saya sudah memiliki usaha yang mampu menopang keuangan rumah tangga tapi belu menyerap tenaga kerja	46,9	Cukup
3	saya sudah memiliki usaha tapi belum mampu menopang keuangan rumah tangga	40,7	Cukup
4	saya sudah memiliki usaha tapi hanya sekedar mengisi waktuluang dan musiman	55,4	Besar
5	saya belum memiliki usaha tapi berkeinginan memiliki usaha	67,3	Besar
6	Kecukupan ekonomi rumah tangga	52,0	Besar
7	Kesediaan waktu yang dimiliki	70,8	besar

No	Pertanyaan	persepsi	
8	Pengetahuan untuk berwirausaha yang dimiliki	56,8	Besar
9	Minat yang dimiliki untuk berwirausaha	67,7	Besar
10	Kesediaan tergabung dalam kelompok usaha	67,9	Besar
11	Keterampilan yang dimiliki	55,5	Besar
12	Jejaring yang dimiliki	54,4	Besar
13	Dukungan Modal	39,2	Cukup
14	Dukungan Keluarga	68,5	Besar
15	Ketertarikan aspek calon usaha yang dimiliki	59,4	Besar
16	Saya suka dengan dunia digital dalam menjalankan usaha	49,0	Cukup
17	Saya suka mencoba usaha baru yang belum banyak dikerjakan orang lain	52,5	Besar
18	Saya ingin mengasah keterampilan dan membutuhkan bantuan pelatihan	65,8	besar

Sumber: Hasil lapangan 2023

Berdasar tabel di atas bahwa di Kabupaten Lahat berdasarkan persepsi masyarakat tentang dorongan untuk berusaha adalah telah memiliki usaha tapi hanya sekedar mengisi waktu luang dan musiman; belum memiliki usaha tapi berkeinginan memiliki usaha; Kecukupan ekonomi rumah tangga; Kesiediaan waktu yang dimiliki; Pengetahuan untuk berwirausaha yang dimiliki; Minat yang dimiliki untuk berwirausaha; Kesiediaan tergabung dalam kelompok usaha; Keterampilan yang dimiliki; Jejaring yang dimiliki; Dukungan Keluarga; Ketertarikan aspek calon usaha yang dimiliki; Suka mencoba usaha

baru yang belum banyak dikerjakan orang lain dan ingin mengasah keterampilan dan membutuhkan bantuan pelatihan sangat besar.

Pelaku Creativepreneur memiliki kemampuan untuk menjadi seorang creativepreneur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 13 Efikasi Diri Creativepreneur

No	Pertanyaan	Persepsi	
1	Saya dapat mengatasi situasi sulit saat akan berwirausaha	54,5	besar
2	saya memilih aktivitas berwirausaha yang saya anggap mampu untuk melakukannya	64,8	besar
3	berwirausaha merupakan pilihan tepat untuk menjadi seorang yang sukses	63,5	besar
4	saya akan bertahan dalam situasi yang sulit dalam berwirausaha	57,7	besar
5	saya mampu menhadapi serangkaian aktivitas berwirausaha yang akan saya jalani	65,3	besar
6	saya akan mampu menghadapi perubahan secara cepat apabila berwirausaha	57,3	besar
7	saya akan memiliki kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan wirausaha kreatif	58,8	besar
8	saya mampu untuk melaksanakan tugas wirausaha kreatif	57,5	besar

No	Pertanyaan	Persepsi	
9	Pemberian penghargaan atas tindakan saya merupakan tindakan yang akan mendorong saya	66,5	besar
10	Kebutuhan yang saya miliki terus bertambah dan mengharuskan lebih aktif berwirausaha	66,7	besar
11	untuk mensejahterakan saya dan karyawan saya adalah tujuan jenis usaha ini	51,1	besar
12	keuntungan yang diperoleh akan menjunjung semangat dalam berwirausaha	67,4	besar

Sumber: Hasil lapangan 2023

Kemampuan masyarakat Lahat untuk melakukan creativepreneur sudah sangat besar. Dorongan Lingkungan Keluarga untuk melakukan creativepreneur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 14 Dorongan Lingkungan Keluarga untuk Creativepreneur

No	Pertanyaan	Persepsi	
1	Keluarga saya memberikan gambaran ide usaha	67,5	besar
2	keluarga memberi nasihat baik dalam keputusan saya menjalankan usaha	63,1	besar
3	keluarga mendukung saya berwirausaha	66,6	besar
4	keluarga memberikan fasilitas untuk saya berwirausaha	67,3	besar
5	saya dibesarkan dalam keluarga yang berprofesi sebagai wirausaha	62,7	besar

No	Pertanyaan	Persepsi	
6	keluarga memberi motivasi untuk menjadi wirausaha yang sukses	62,8	besar

Sumber: Hasil lapangan 2023

Berdasar tabel diatas menunjukkan sangat besar Dorongan Lingkungan Keluarga untuk melakukan creativepreneur di Kabupaten Lahat. Adapun semangat creativepreneur masyarakat di Lahat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Semangat Creativepreneur

No	Pertanyaan	Persepsi	
1	Saya selalu berorientasi pada prestasi dalam menjalankan usaha	63,8	besar
2	usaha saya memiliki potensi di masa datang	60,0	besar
3	saya berani mengambil risiko dalam menjalankan usaha	55,8	besar
4	tingkat pendidikan memiliki pengaruh dalam pengembangan usaha	56,6	besar
5	inovasi dapat mempengaruhi proses pengembangan usaha saya	55,0	besar
6	kreativitas mempengaruhi pengembangan usaha saya	61,2	besar
7	pengalaman saya berperan dalam pengembangan usaha	68,2	besar
8	pengetahuan berperan dalam pengembangan usaha saya	62,5	besar

No	Pertanyaan	Persepsi	
9	ketetapan menjalankan prinsip berpengaruh pada pengembangan usaha	64,9	besar
10	saya memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah	57,1	besar
11	saya mampu mengelola SDM pada usaha saya dengan baik	56,4	besar
12	saya memiliki kemampuan manajerial dan administrasi dengan baik	49,4	cukup
13	saya mempunyai keahlian dalam bidang usaha yang saya tekuni	57,5	besar

Sumber: Hasil lapangan 2023

Berdasar tabel diatas menunjukkan kekurangan semangat creativepreneur di Lahat adalah dalam hal kemampuan manajerial dan administrasi yang cukup baik dan perlu adanya pembedaan. Aktivitas media sosial yang mendukung Creativepreneur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 16 Aktivitas Media Sosial yang Mendukung Creativepreneur

No	Pertanyaan	persepsi	
1	Saya berkomunikasi melalui medsos untuk mendapatkan informasi berwirausaha	55,3	besar
2	saya mempunyai teman wirausaha di komunikas medsos	50,9	besar
3	saya akan memperkenalkan usaha di medsos	51,4	besar

No	Pertanyaan	persepsi	
4	medsos tidak membutuhkan biaya banyak	56,4	besar
5	saya memperoleh kemudahan informasi dalam promosi	55,1	besar
6	medsos menyediakan halaman untuk akun usaha	66,7	besar
7	saya mendapatkan kemudahan updata berita terkini dalam berwirausaha melalui medsos	60,2	besar
8	medsos memudahkan menentukan target pasar sesuai rencana usaha	51,2	besar

Sumber: Hasil lapangan 2023

Berdasar tabel diatas menunjukkan media sosial pelaku usaha creatiepreneur telah memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya.

5.5 Analisis strategi penguatan creativepreneur di Lahat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat saat ini begitu pesat, dan salah satunya ditopang oleh industri kreatif. Terlebih lagi, saat ini teknologi sudah semakin canggih. Dunia sudah memasuki era industri 4.0. Dampak dari industri kreatif ini ternyata sangat positif bagi Kabupaten Lahat. Salah satunya dengan berkurangnya kemiskinan di Kabupaten Lahat dan berkurangnya pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat. Karena telah terserap dalam sektor industri kreatif. Dalam menentukan strategi pengembangan model creativepreneur, kita perlu melihat terlebih dahulu terhadap kondisi lingkungan di daerah atau wilayah tersebut, baik dari segi potensi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Permasalahan ini juga menyangkut terkait isu demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yaitu hampir semua pasar baru, termasuk Indonesia, memiliki lebih banyak penduduk usia muda daripada orang dewasa. Mereka sumber

ekonomi kreatif sekaligus pasar. Dinamika ini harus kita pahami. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan terkait peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mana, para pelaku ekonomi kreatif saat ini dituntut harus memiliki ide-ide terbaru yang kompeten dan memiliki daya saing serta memberikan dampak langsung terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya.

Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para penduduk usia muda dengan memberikan dukungan yang tentu sudah disesuaikan dengan selera dan minat para pemuda saat ini agar motivasi mereka terhadap pembuatan ekonomi kreatif ini semakin tinggi.

Pemerintah Kabupaten Lahat khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat sendiri telah memberikan dukungan bagi perkembangan creativepreneur antara lain Penyelenggaraan event tahunan Lahat Creative Week untuk mempromosikan industri kreatif yang ada di kabupaten Lahat.

5.5.1 Tantangan

Dalam melaksanakan setiap program yang telah ditentukan tersebut, pemerintah juga mengalami beberapa kendala diantaranya :

1. Sektor usaha masih konvensional, yakni kuliner dan perdagangan
2. Akselerasi modernitas usaha masih kecil
3. Daya dukung lingkungan dan pasar serta peluang untuk usaha kreatif sangat besar
4. Semangat besar namun keseriusan masih kecil
5. Dorongan dari lingkungan keluarga yang besar
6. Aktivitas medsos intensif namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis

5.5.2 Penerapan Model Triple Helix Pada Pengembangan Creativepreneur di Kabupaten Lahat

Triple helix merupakan suatu pendekatan yang menguraikan tentang bagaimana sebuah inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang, timbal balik, dan terus menerus dilakukan antar akademisi (perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan), pemerintah (government), dan para pelaku/sector bisnis (enterprises). Sinerginitas ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah ABG (Academic, Business, and Government). Pendekatan triple helix diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995), menekankan bahwa interaksi ketiga komponen ABG merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi lahirnya inovasi, ketrampilan, kreativitas, ide dalam pengembangan ekonomi kreatif bagi creativepreneur.

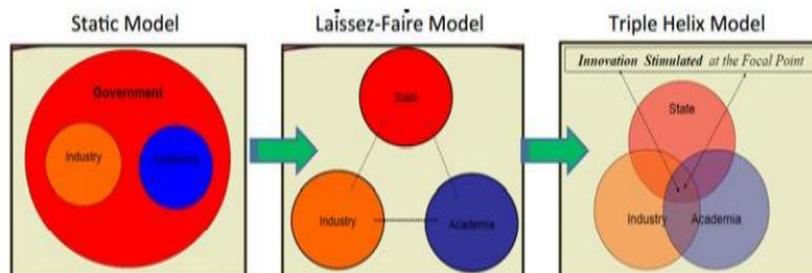
Dari sinergi yang terbangun diharapkan dapat muncul sirkulasi pengetahuan antar aktor yang terlibat untuk melahirkan berbagai inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangan empirisnya di berbagai belahan dunia muncul berbagai aktor-aktor diluar unsur ABG yang disebutkan tadi yang ikut memberi pengaruh signifikan bagi dinamika interaksi ketiganya. Dengan adanya aktor-aktor yang muncul kemudian ini diperlukan suatu model yang merupakan pengembangan dari model Triple Helix, sebagai pisau analisis dalam mengembangkan berbagai model kebijakan kerjasama knowledge-based economy.

Model the Triple Helix telah mengalami perkembangan baik secara konsep maupun dalam praktik. Secara teoretis, model the Triple Helix berakar pada teori sosiologi klasik dan

ekonomi kelembagaan (institutional economics) sebelum berkembang menjadi interdisciplinary seperti saat ini (Cai dan Etzkowitz, 2020). Sebagai modal sosial, hubungan the Triple Helix berdasarkan pada kepercayaan (trust) dan budaya. Trust adalah konstruksi fundamental kehidupan organisasi. Trust merupakan prasyarat untuk berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Dalam membangun keunggulan bersaing, trust memegang peranan penting (Cabrita & Bontis, 2008).

Lucy Yang Lu (2008) dan Etzkowitz (2008) mengemukakan ada tiga tahap munculnya model inovasi Triple Helix yaitu:

1. 1) Transformasi internal masing-masing heliks;
2. Pengaruh satu heliks terhadap yang lain;
3. Penciptaan hamparan baru jaringan trilateral;
4. Organisasi dari interaksi di antara ketiga heliks tersebut.



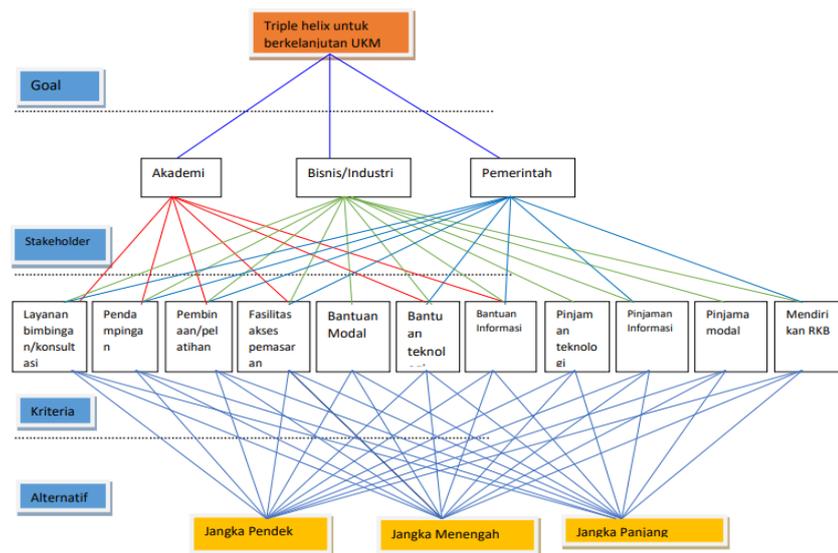
Gambar 1. Model Sinergi Triple Helix
 Sumber: Etzkowitz and Leydesdorff (2008)

Gambar 5. 2 Model Sinergi Triple Helix

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder, baik pihak ABG (academic, business, maupun government) menyebabkan pentingnya penentuan prioritas untuk keberlangsungan creativepreneur. Aspek triple helix perlu dipertimbangkan prioritas karena hal tersebut

berdampak pada keberlangsungan creativepreneur, sehingga perlu disusun hirarki triple helix tersebut.

Adapun penyusunan Hierarki Triple Helix adalah sebagai berikut:



Gambar 5. 3 Penyusun Hierarki Triple Helix

Peran ketiga aktor triple helix dalam industri kreatif:

1) . Universitas atau Intelektual

Intelektual dalam konteks triple helix industri kreatif tidak hanya mencakup kaum cendekiawan dari pendidik di kampus-kampus saja, melainkan juga para budayawan, seniman, penulis, dan tokoh-tokoh lainnya di bidang seni, dan budaya.

Universitas sebagaimana dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri dan ekonomi kreatif dalam lingkup masyarakat.

Adapun pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan industri dan ekonomi kreatif, yaitu:

- Pendidikan disebarluaskan guna untuk mendorong lahirnya generasi kreatif Indonesia sehingga lulusan-lulusan perguruan tinggi dapat tumbuh menjadi insan yang kreatif dan mampu berkarya untuk menciptakan dunia usaha yang kreatif.
- Penelitian yang dilakukan oleh pendidik dapat menghasilkan model kebijakan pengembangan industri kreatif dan instrumen yang dibutuhkannya, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien sehingga tercipta industri kreatif nasional yang kompetitif; dan
- Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan institusi/tatanan sosial yang mendukung tumbuh suburnya industri kreatif nasional.

Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam industri kreatif di Indonesia misalnya ada Ahmad Tohir, Karni Ilyas, Nurcholish Madjid, Emha A. Najib, Iwan Fals, Emil Salim, Sujiwo Tedjo, dan lain sebagainya.

2) Bisnis

Bisnis atau juga bisa disebut sebagai perusahaan adalah suatu entitas organisasi yang didirikan untuk menghasilkan profit atau revenue dengan cara menyediakan produk baik berupa produk barang ataupun jasa kepada konsumen.

Di dalam organisasinya, bisnis yang bergerak dalam industri kreatif juga memerlukan pengelompokan pekerjaan seperti keuangan, manajemen, pemasaran,

penjualan, produksi, dan research and development (RnD).

Dalam menjalankan bisnis kreatif sering kali dibutuhkan modal tambahan, yang mana modal tersebut dapat diperoleh dari pinjaman bank atau dari gelontoran investor. Untuk UMKM yang bergerak dalam industri kreatif bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman modal yang merupakan program dari pemerintah ini telah banyak membantu bisnis rakyat dan menggerakkan perekonomian bangsa.

Selain tambahan modal, bisnis kreatif juga memerlukan proteksi untuk menghindari adanya kompetitor yang menjiplak usaha dan menyaingi bisnis tersebut. Proteksi tersebut bisa dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bisa berupa hak paten, hak cipta, merek dagang ataupun desain. Setiap bisnis kreatif yang hendak kamu dirikan pasti membutuhkan nama, logo dan teknik-teknik pencitraan.

Setiap pelaku bisnis kreatif sebaiknya mengajukan hak paten. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian internasional tentang HKI, dan setiap pelaku usaha yang ikut serta terdaftar tersebut akan terikat dan harus mentaati hukum negara dengan perjanjian internasional ini. Sebagaimana dengan bisnis pada umumnya, dalam dunia industri kreatif pun bisa juga dijual dan dibeli. Owner menyebutnya sebagai exit-plan yang dapat berupa IPO atau merger dan akuisisi.

Dalam mengembangkan industrinya, pelaku bisnis sebagai aktor triple helix harus menjalankan peran sebagai:

- Pencipta, yaitu sebagai *center of excellence* dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu-individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya.
- Pembentuk Komunitas dan Entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis di industri kreatif, business coaching atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha di industri kreatif.

3) Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud dalam triple helix industri kreatif ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan dalam substansi, maupun keterkaitan birokrasi. Pemerintah sebagai salah satu aktor triple helix dalam pengembangan industri kreatif adalah:

a. Katalisator

Yaitu pemerintah berperan sebagai fasilitator dan advokasi yang bertugas untuk memberikan dukungan agar ide-ide bisnis yang dimiliki oleh masyarakat dapat bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi.

Tidak selamanya dukungan atau support tersebut dalam bentuk finansial atau pinjaman modal, insentif ataupun proteksi, tetapi dapat juga berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan birokrasi publik dengan baik;

b. Regulator

Yaitu pemerintah sebagai aktor *triple helix* memiliki tugas untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri kreatif baik terkait dengan sumber daya maupun teknologinya. Setelah kebijakan tersebut dibuat pemerintah harus memastikan bahwa aturan tersebut telah dijalankan dengan baik di lapangan.

c. Konsumen, investor atau bahkan entrepreneur

Pemerintah sebagai konsumen artinya pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan procurement (pengadaan barang/jasa) harus memprioritaskan penggunaan produk-produk kreatif.

Sementara itu pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan asset negara untuk menjadi lebih produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Dan pemerintah sebagai entrepreneur artinya secara tidak langsung memiliki otoritas untuk menjalankan usaha produktif, seperti badan usaha milik negara (BUMN).

d. Urban planner

Yaitu pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan kota kreatif (creative city) sehingga akan terbentuk kota-kota dengan "iklam" yang mendukung. Dengan begitu, kota tersebut akan menjadi magnet yang mampu menarik minat individu/perusahaan untuk membuka usaha di Indonesia.

Dengan adanya potensi suplai SDM yang kreatif dan berpengetahuan tinggi tersebut akan mendorong industri/perusahaan merasa yakin untuk

menginvestasikan modalnya secara serius (jangka panjang) di kota-kota kreatif itu.

Sebagai contoh, di beberapa negara yang sudah membangun kota kreatif adalah Silicon Valley di San Jose Amerika, Mumbai, Bangalore di India, Shanghai di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Banyak kota-kota di Indonesia yang memiliki energi yang cukup untuk dijadikan sebagai kota kreatif seperti kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Semarang, dan lain sebagainya.

Dalam konsep Triple-Helix, hubungan universitas—pemerintah—industri merupakan sumber inovasi atau dalam istilah lain *innovation in innovation* (Etzkowitz, 2003). Sedangkan modal intelektual berhubungan dengan kapabilitas inovasi (Subramaniam & Youndt, 2005). Kapabilitas inovasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan dan ide-ide ke dalam produk baru melalui proses dan sistem untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan (Lawson & Samson, 2001).

Berdasarkan penjelasan konsep kapabilitas tersebut di atas, kapabilitas inovasi mencakup tiga dimensi :

1) Kapabilitas Pembelajaran (Learning Capability)

Kapabilitas pembelajaran organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyerap (*absorptive capability*) dan mentransformasikan (*transformative capability*) pengetahuan eksternal ke dalam aktivitas perusahaan (Cohen & Levinthal, 1990). Kapabilitas pembelajaran organisasi juga merupakan kemampuan menyerap pengetahuan internal dan memilih teknologi untuk diaplikasikan dalam pengembangan produk baru

(Garud Nayyar, 1994). Dengan kata lain, kapabilitas pembelajaran adalah kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan bisnis (Day, 2011).

2) Kapabilitas Produksi (Production Capability)

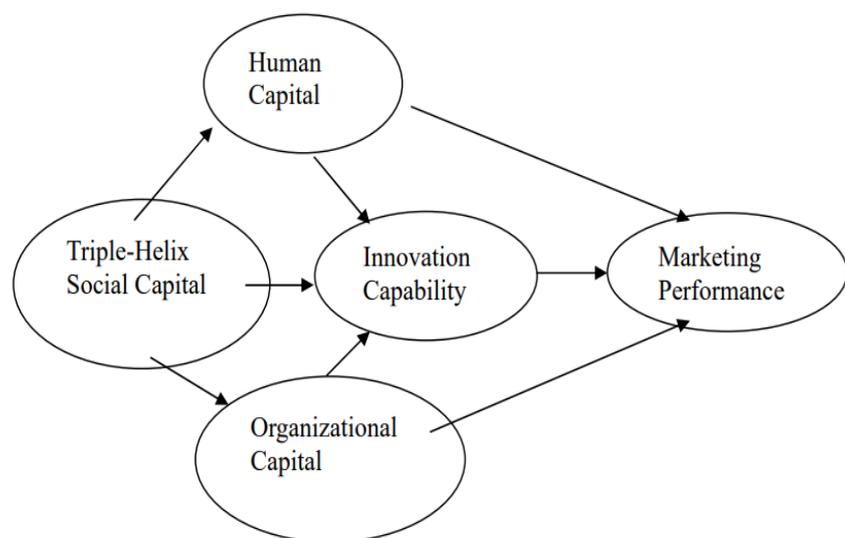
Aktivitas produksi merupakan elemen mendasar bagi pelaku UKM (Nassimbeni, 2001). Dalam literatur disebutkan bahwa kemampuan produksi termasuk kompetensi utama bagi perusahaan dalam menghasilkan inovasi (Prahalad & Hamel, 1990). Inovasi produk baru berhubungan dengan kapabilitas produksi. Kapabilitas tersebut merujuk pada sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan proses. Karena itu diperlukan kecakapan untuk mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber rujukan inovasi tersebut. Jadi kemampuan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber inovasi merupakan kecakapan yang diperlukan dalam menghasilkan inovasi produk baru. Dalam perspektif RBV dan teori pemasaran, komponen orientasi pasar (market orientation) memainkan peran penting ini (Gima, 2005). Dalam strategi bersaing, kapabilitas produksi merupakan kemampuan perusahaan dalam membuat produk yang mencakup biaya rendah, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman (Boyer & Lewis, 2002). Karakteristik produk inovatif adalah produk yang memiliki keunikan, kebaruan, dan bermakna (meaningful) bagi pelanggan (Sethi, et al., 2001).

3) Kapabilitas Pemasaran (Marketing Capability)

Konsep orientasi pasar menyediakan informasi pasar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas pemasaran sehingga perusahaan bertambah dinamis. Pemahaman yang mendalam tentang pasar

diperlukan untuk membangun kapabilitas pemasaran dan melatih kapabilitas individual berhubungan dengan orientasi pasar (Day, 2011; Morgan et al., 2009). Orientasi pasar dengan menggunakan perspektif proses informasi pasar akan menguatkan kapabilitas pemasaran serta memudahkan perusahaan dalam mengerahkan sumber dayanya (Hult et al., 2005; Kohli & Jaworski 1990). Kapabilitas pemasaran berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kinerja pasar dan dukungannya pada kinerja keuangan perusahaan (Vorhies et al., 2009). Kapabilitas pemasaran juga berkaitan dengan dan berpengaruh pada pertumbuhan laba perusahaan. Kapabilitas pemasaran mencakup kemampuan dalam penetapan harga, pengembangan produk, distribusi, komunikasi pemasaran, penjualan, perencanaan pemasaran, dan implementasi pemasaran (Morgan et al., 2009).

Kerangka Konseptual Relasi Triple Helix dan Kinerja Pemasaran



Membina dan mengembangkan creativepreneur memerlukan kerja sama antar-pemangku kepentingan, terutama universitas atau perguruan tinggi (Cockshut et al, 2020; Pangestu, 20014; Comunian, et al., 2013). Semua inovasi dimulai dari sebuah ide kreatif, implementasi program baru, pengenalan produk baru, atau layanan baru bergantung pada person maupun tim yang memiliki ide cemerlang, dan pengembangan ide tersebut dipengaruhi oleh sistem inovasi maupun kepemimpinan organisasi (Day & Shea, 2020).

Konsep the Triple Helix dapat diadopsi dalam membangun creativepreneur melalui pengembangan kreativitas dan inovasi (Comunian, et al., 2013; Rangga & Etzkowitz, 2013; Clifton, 2010). Dalam pengembangan kapabilitas inovasi tersebut, model the Triple Helix diharapkan menjadi modal sosial (social capital) yang akan menggerakkan komponen modal intelektual lainnya, yaitu sumber daya manusia (human capital) dan modal organisasi (organizational capital). Dengan kata lain, sebagai modal sosial, model the Triple Helix akan menjadi sumber kreatif inovasi, manifestasi sistem sosial dalam mengembangkan pengetahuan, inovasi, dan konsensus (Rangga & Etzkowitz, 2013).

Oleh karena itu, dalam merumuskan kerangka konseptual di sini, penulis mengusulkan tiga komponen modal intelektual, yaitu:

- (1) human capital;
- (2) organizational capital; dan
- (3) social capital

Dalam kerangka konseptual yang penulis usulkan ini, istilah the Triple Helix sebagai social capital dimodifikasi menjadi Triple-Helix Social Capital (THSC). Dengan

menjadikannya sebagai modal sosial, model THSC akan memperluas jangkauan dan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan optimalisasi modal organisasi (organizational capital). Keluasan konektivitas dan jangkauan relasional modal sosial dibutuhkan untuk pengembangan pasar creativepreneur ekonomi kreatif. Dalam sistem demokrasi dan kemajuan teknologi informasi, model THSC memungkinkan terbangunnya dukungan masyarakat sipil (civil society) untuk terlibat dalam pengembangan creativepreneur ekonomi kreatif. Dengan demikian, modifikasi THSC akan mampu mendorong terbangunnya ekosistem inovasi pada sektor-sektor creativepreneur ekonomi kreatif, sebagaimana model the Triple Helix (Cai et al, 2020; Etzkowitz & Zhou, 2017).

6.5.1. Quintuple Helix

Namun, tren kini menunjukkan partisipasi aktif dari komunitas kreatif di berbagai daerah terus bergeliat. Dan saat ini kolaborasi *Triple Helix* berkembang menjadi *Quadruple Helix*, dengan penambahan unsur komunitas. Diharapkan ekonomi kreatif dapat bertumbuh cepat, maka kolaborasi hexahelix antara pemerintah, swasta, intelektual, komunitas kreatif, media dan investor perlu untuk diterapkan saat ini hingga membentuk situasi industry kreatif yang sehat sehingga dalam waktu yang relatif singkat ekonomi kreatif menjadi sektor yang berpeluang meningkatkan daya saing ekspor produk.

Sebagian besar usulan pendekatan QH berfokus pada inovasi yang dihasilkan oleh warga negara. Inklusi sosial, sentralitas pengguna, dan kreativitas telah tercakup dalam proses produksi pengetahuan sebagai elemen penting dan masyarakat sipil telah ditambahkan sebagai heliks keempat dari sistem inovasi. Yawson (2009) meresmikan pengguna

sebagai ruang keempat yang didukung oleh gagasan bahwa inovasi didorong oleh kebutuhan pengguna. Inovasi dalam hal produk dan layanan yang disediakan oleh Individu dan Government dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan warga negara (inovasi yang didorong oleh pengguna) menyadari secara de facto pertumbuhan sosio-ekonomi wilayah ini. Proses ini menyiratkan dua elemen: interaksi yang efektif antara setidaknya Universitas dan Individu (yaitu inovasi berbasis teknologi tradisional) dan kontribusi warga terhadap model inovasi. Ini memerlukan pergeseran dari inovasi teknis ke inovasi sosial.

Quintuple Helix menekankan transisi sosioekologis yang diperlukan masyarakat dan ekonomi di abad kedua puluh satu; Oleh karena itu, Quintuple Helix sensitif secara ekologis. Dalam kerangka model inovasi Quintuple Helix, lingkungan alami masyarakat dan ekonomi juga harus dilihat sebagai pendorong untuk produksi pengetahuan dan inovasi, sehingga menentukan peluang bagi ekonomi pengetahuan. Quintuple Helix adalah model inovasi yang dapat mengatasi tantangan pemanasan global yang ada melalui penerapan pengetahuan dan pengetahuan karena berfokus pada pertukaran sosial dan pertukaran pengetahuan di dalam subsistem negara atau negara tertentu. (Barth 2011). Model inovasi 'nonlinier' dari Quintuple Helix, yang menggabungkan pengetahuan, pengetahuan, dan sistem lingkungan alami bersama-sama ke dalam kerangka 'interdisipliner' dan 'transdisipliner', dapat memberikan model langkah demi langkah untuk memahami Manajemen berbasis kualitas pembangunan yang efektif, memulihkan keseimbangan dengan alam, dan membiarkan generasi masa depan memiliki kehidupan pluralitas dan

keragaman di bumi (lihat Carayannis dan Campbell 2010; Barth 2011).

Quintuple Helix, dengan demikian, memvisualisasikan interaksi kolektif dan pertukaran pengetahuan dalam sebuah negara (nation-state) melalui lima sistem subsistem berikut (yaitu, heliks): (1) sistem pendidikan, (2) sistem ekonomi, 3) lingkungan alam, (4) masyarakat berbasis media dan berbasis budaya (juga masyarakat sipil), (5) dan sistem politik (lihat Carayannis dan Campbell 2010). Untuk menganalisis keberlanjutan dalam Quintuple Helix dan untuk membuat penentuan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan, berarti masing-masing dari kelima subsistem yang dijelaskan (heliks) memiliki aset khusus dan perlu, dengan relevansi sosial (sosial) dan akademis (ilmiah) sebagai berikut :

Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan, sebagai subsistem pertama, mendefinisikan dirinya mengacu pada 'akademisi', 'universitas', 'sistem pendidikan tinggi', dan sekolah. Dalam heliks ini, diperlukan 'modal manusia' (misalnya: siswa, guru, ilmuwan / peneliti, pengusaha akademis, dan lain-lain) sebuah negara (nation-state) sedang dibentuk oleh difusi dan penelitian pengetahuan.

Pihak Akademisi merupakan salah satu pilar yang memiliki peran strategis dalam upaya creativepreneur untuk meningkatkan kualitas karena memiliki resources yang sangat dibutuhkan oleh creativepreneur yaitu:

- Konsep dan teori yang relevan dengan bisnis yang dapat membantu UKM menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis.
- Hasil penelitian yang sangat dibutuhkan oleh UKM dalam upaya naik kelas.

- Berbagai informasi yang dibutuhkan oleh UKM dalam menumbuhkembangkan bisnis
- Program pelatihan, pembinaan yang diberikan melalui Pusat Inkubator bisnis
- Program pengabdian masyarakat yang relevan dengan program studi serta berhubungan dengan UKM.

Bbeberapa kampus di Kabupaten Lahat yang memiliki potensi untuk mengambil peran Akademisi dalam pengembangan pelaku creativepreneur di Lahat , antara lain:

- STKIP Sera
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serelo Lahat
- STIT YPI Lahat

Sistem ekonomi

Sistem ekonomi, sebagai subsistem kedua, terdiri dari 'industri / industri', 'perusahaan', jasa dan perbankan. Heliks ini berkonsentrasi dan memfokuskan 'modal ekonomi' (misalnya: kewiraswastaan, mesin, produk, teknologi, uang, dll.) Sebuah negara (negara-bangsa).

Peran perusahaan atau pelaku bisnis dalam tim sinergitas ABCGM ini dapat membantu:

- Memberikan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada para creativepreneur berupa pembiayaan, akses pemasaran, pelatihan.
- Menjadi strategic partner bagi creativepreneur berupa business process yang dimiliki perusahaan dan berhubungan dengan bisnis creativepreneur seperti supplier bagi perusahaan, menjalankan bisnis online bagi creativepreneur.
- Pendanaan dari perbankan

Lingkungan alam

Lingkungan alami sebagai subsistem ketiga sangat menentukan untuk pembangunan berkelanjutan dan memberi orang dengan 'modal alam' (misalnya: sumber daya, tanaman, variasi hewan, dan lain-lain).

Masyarakat berbasis media dan berbasis budaya

Subsistem keempat, publik berbasis media dan berbasis budaya, mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk 'modal'. Di satu sisi, helix ini memiliki, melalui masyarakat berbasis budaya (misalnya: tradisi, nilai, dll.), Sebuah 'modal sosial'. Di sisi lain, helix media berbasis publik (misalnya: televisi, internet, surat kabar, dll) berisi juga 'modal informasi' (misalnya: berita, komunikasi, jejaring sosial).

Peran strategis yang dimiliki oleh media dalam Tim sinergitas ABCGM untuk creativepreneur di Lahat adalah:

- Membantu creativepreneur untuk mengenal creativepreneur lebih dekat sehingga dapat bersahabat dengan media.
- Memberikan edukasi kepada creativepreneur untuk berhubungan baik dengan media dan bahkan mengoptimasi peluang dari media.
- Mempromosikan diri, perusahaan dan produk creativepreneur kepada target market.
- Beberapa media yang sudah bergabung dengan tim sinergitas ABCGM Kabupaten Lahat untuk adalah:
 - TVRI
 - Radio Seganti Setungguan FM
 - Radio Lematang (RL) FM
 - Radio Raha FM Lahat
 - KoraN Lahat Pos

Sistem politik

Sistem politik, sebagai subsistem kelima, juga sangat penting, karena merumuskan 'kehendak', di mana negara (negara-bangsa) menuju ke masa sekarang dan masa depan, dengan demikian juga mendefinisikan, mengatur serta mengelola kondisi umum negara (nation-state). Oleh karena itu, heliks ini memiliki 'modal politik dan hukum' (misalnya: gagasan, undang-undang, rencana, politisi, dll.).

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Quintuple Helix. Dalam menerapkan model pengembangan ekonomi kreatif bagi Creativepreneur di Kabupaten Lahat berbasis Quintuple Helix, ada beberapa faktor yang diperhatikan yaitu meliputi:

- (1) Sumber daya manusia yang memiliki dampak luas bagi kapabilitas UKM untuk dapat maju, bertahan, atau gagal;
- (2) Pemasaran yang masih menjadi kendala bagi kalangan Creativepreneur;
- (3) Ketersediaan kapital dan teknologi bagi usaha-usaha yang ingin meningkatkan baik volume maupun kualitasnya dalam merespon persaingan;
- (4) Manajemen organisasi yang cenderung berbasis keluarga dan lambat untuk mengadopsi manajemen modern;
- (5) Dukungan ketersediaan infrastruktur dimana tempat Creativepreneur berdomisili;
- (6) Upaya untuk melakukan partnership serta legalitas usaha;
- (7) Tingkat kompetisi yang cenderung tinggi, mengingat usaha Creativepreneur pada umumnya memiliki barrier entry yang minimal, sehingga memudahkan bermunculannya kompetitor usaha sejenis.

5.6 Kepentingan Stakeholders

Stake holders	Kepentingan	Aktivitas	Interelasi dengan Pelaku Creativepreneur	Upaya tindak lanjut
Akademisi	Penelitian	Kolaborasi	kolaborasi peneitian	Membangun Mou dalam Hilirisasi Riset
	Pengabdian	Wilayah dan komunitas binaan	kolaborasi PkM, komunitas binaan	Membangun MoA kegiatan PkM
	Pengajaran	Lab dan pengembangan materi ajar	PKL, Magang Riset, Riset Pendidikan	Membangun MoA Kegiatan pendidikan
Pelaku usaha kreatif	Profit	bussines run		Sinergi RPIK dengan pelaku usaha kreatif
	Inovasi Produk	riset bisnis		peran dalam pembangunan
	manajemen	bisnis skill		
	Strategi Pengembangan	innovative skill		
	Komunitas	Collabiartive skill		
Komunitas	Target filantropi	Hummanitarian Action	Complementarian	Fasilitasi komunitas
	Cummunal Progress	Cummyunity growt	Jejaring	Peran serta komunitas dalam pembangunan

Stake holders	Kepentingan	Aktivitas	Interelasi dengan Pelaku Creativepreneur	Upaya tindak lanjut
Pemerintah	Tercapainya Target Pembangunan	Jabaran program	Sinergi kebijakan, program, dan sasaran kegiatan	
	Prestasi	inovasi	Dukungan dalam Pembangunan	
Media	Profit	bussines run	Iklan	Kerjasama iklan
	Content	Innovative skill	Kolaborasi	Branding Media

5.7 Saran dan rekomendasi penguatan creativepreneur

Kondisi existing	Analisis penyebab	Rumusan solusi	Usulan Program	Output	Outcome	Profit	Benefit
1) Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lahat tahun 2023 adalah 211.102 jiwa, terdiri atas 70,73 persen angkatan kerja dan 29,27 persen bukan angkatan kerja.	Semakin banyak penduduk maka membutuhkan lapangan kerja. Lapangan kerja datang dari adanya pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memberikan lapangan kerja yang besar. Ini berkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Jika dilihat data-data kependudukan, termasuk ketenagakerjaan dan kualitas penduduk, maka nampak jelas bahwa Indonesia mengalami banyak permasalahan dalam hal ini. Penduduk yang besar dengan kualitas penduduk yang rendah menyebabkan penduduk tersebut menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi dan bukan pemacu. Dalam skala mikro, tenaga	Perluasan kesempatan kerja hanya dapat diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan kearifan bersama antara pengusaha dan pekerja untuk menyikapi hubungan antara pengusaha dan pekerja, terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.	Regulasi yang baik tentang penumbuhan pelaku ekonomi menengah yang berorientasi padat karya, untuk menampung angkatan kerja, serta adanya jaminan layak hidup	Keputusan Bupati yang mendorong pelaku usaha menengah disertai keharusan mengikuti UMK untuk para pekerjanya	Adanya regulasi pelaku industri kelas menengah yang baik, serta program yang peningkatan ekonomi yang jelas dan aplikatif	Turunnya angka pengangguran	tercapainya visi-misi pemerintahan

Kondisi existing	Analisis penyebab	Rumusan solusi	Usulan Program	Output	Outcome	Profit	Benefit
	<p>kerja dengan tingkat keterampilan yang pas-pasan, atau bahkan rendah, hanya bisa menempati posisi yang sangat rendah. Ditambah dengan banyaknya “supply” tenaga kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak memiliki posisi tawar menawar yang memadai.</p>						

<p>2) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 51.1 persen angkatan kerja adalah laki-laki dan 48.9 persen perempuan.</p>	<p>Lahat menjadi Kabupaten yang terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi resourcis yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>wanita membuktikan memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi keluarganya selain sebagai ibu rumah tangga. Dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja akan mengurangi tingkat pengangguran, dan secara langsung dan tidak langsung akan menambah pendapatan keluarga dalam meningkatkan</p>	<p>Adanya regulasi yang mengatur peran Pemerintah dan Pengusaha dalam peningkatan Kesejahteraan taraf hidup pekerja agar dapat hidup layak, perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yaitu melalui strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan perempuan - Jaminan social serta 	<p>Keputusan Bupati yang memberikan perlindungan bagi perkerja</p>	<p>Adanya regulasi yang jelas tentang upaya pembangunan ekonomi Kabupaten yang jelas dan tegas</p>	<p>Rendahnya angka konflik pekerja dengan pengusaha</p>	<p>tercapainya visi-misi pemerintahan</p>
--	---	---	---	--	--	---	---

		kesejahteraan keluarganya.	- Perlindungan pengupahan				
--	--	----------------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kondisi existing	Analisis penyebab	Rumusan solusi	Usulan Program	Output	Outcome	Profit	Benefit
3) Komposisi angkatan kerja pengangguran terbuka 8845	angka pekerja yang tinggi, merupakan potensi sekaligus ancaman, sehingga perlu pengaturan yang baik oleh Pemkot, baik secara formal maupun non formal. Upaya mendorong pengusaha sekaligus menjamin hak pekerja menjadi prioritas menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kabupaten 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan 4. Meningkatkan 	upaya menjaga konusifitas dan harmonitas iklim ekonomi, pengusaha, pekerja dan pasar, melalui konsep evaluation as a proses, dan continous development program yang dikelola tim khusus.	Adanya Tim khusus yang menjadi jembatan antara DIDU dengan pekerja	Adanya iklim ekonomi yang stabil dan progresif, pengusaha yang penuh profit, serta pekerja yang sejahtera	Tingginya angka serapan kerja untuk penduduk Kabupaten Lahat	tercapainya visi-misi pemerintahan

Kondisi existing	Analisis penyebab	Rumusan solusi	Usulan Program	Output	Outcome	Profit	Benefit
		kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya					
Sektor usaha masih konvensional, yakni kuliner dan perdagangan	Belum adanya lingkungan persaingan yang kompetitif	Adanya komunitas usaha kreatif, dan pendampingan dari pemerintah	Pembukaan klinik usaha kreatif dan pendampingan bisnis	Meningkatnya jumlah masyarakat berusaha yang kreatif	Turunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	tercapainya visi-misi pemerintahan
Akselerasi modernitas usaha masih kecil	Belum adanya keharusan (regulasi) dan persaingan yang masih longgar	Adanya regulasi standarisasi dan pembukaan pusat bisnis/ pasar baru	Pembukaan klinik usaha kreatif dan pendampingan bisnis yang melibatkan swasta	Meningkatnya jumlah masyarakat berusaha yang kreatif	Turunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	tercapainya visi-misi pemerintahan
Daya dukung lingkungan dan pasar serta peluang untuk usaha kreatif sangat besar	Belum adanya lingkungan persaingan yang kompetitif dengan diversifikasi usaha yang inovatif	Akomodasi dalam klinik usaha	Membentuk komunitas bisnis, dan komunitas dampingan	Meningkatnya jumlah masyarakat berusaha yang kreatif	Turunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	tercapainya visi-misi pemerintahan

Kondisi existing	Analisis penyebab	Rumusan solusi	Usulan Program	Output	Outcome	Profit	Benefit
			dengan pihak ketiga				
Semangat besar namun keseriusan masih kecil	Belum adanya pengetahuan, afeksi, dan keterampilan bisnis professional	Pelatihan usaha hingga level manajemen	Pelatihan bisnis	Meningkatnya jumlah masyarakat berusaha yang kreatif	Turunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	tercapainya visi-misi pemerintahan
Dorongan dari lingkungan keluarga yang besar	Belum adanya manajemen potensi dengan baik	Inisiasi bisnis challenge	Kerjasama dengan swasta dalam bentuk bisnis challenge	Meningkatnya jumlah masyarakat berusaha yang kreatif	Turunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	tercapainya visi-misi pemerintahan
Aktivitas medsos intensif namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis	Belum adanya pengetahuan, sikap, dan action, serta materi usaha yang efektif yang sinergis dengan bisnis	Pelatihan pemanfaatan medsos untuk pengembangan usaha	Menjalin Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk penelitian, pendampingan, dan	Meningkatnya jumlah masyarakat berusaha yang kreatif	Turunnya angka pengangguran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	tercapainya visi-misi pemerintahan

Kondisi existing	Analisis penyebab	Rumusan solusi	Usulan Program	Output	Outcome	Profit	Benefit
			pengabdian kepada masyarakat				

BAB VI PENUTUP

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Program penguatan kewirausahaan atau secara teoretik dikenal dengan creativepreneur merupakan program yang ideal untuk diterapkan di Kabupaten Lahat. Creativepreneur memiliki dua arti yaitu creative dan entrepreneur, artinya pelaku usaha yang kreatif. Seseorang yang tertarik dalam dunia bisnis dituntut untuk memiliki ide dan kreatifitas yang tinggi didukung dengan inovasi-inovasi terbaru sehingga penjualan dan hasilnya nyata. Creativepreneur menurut pakar marketing Llise Benun (2011) adalah seseorang yang memulai atau menjual bisnisnya menggunakan ide kreatif. Ada yang menyebutkan, creativepreneur sebagai bisnis berbasis kreativitas. Creativepreneur basisnya adalah kreatif. Sehingga di era Milenial, creativepreneur berkembang dengan amat pesat tanpa batas karena tidak lagi berbabis pada aturan ekonomi bisnis masa lalu. Persaingan saat ini memiliki dua pilihan yaitu kreatif untuk bertahan atau tidak berkreasi. Untuk itulah diperlukan ide dan inovasi untuk terus dapat mengembangkan usaha dan membangun jaringan bisnis.

Dengan era disrupsi Revolusi Industri 4.0 sekarang ini terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi Creativepreneur tidaklah mudah. Ruang gerak menjadi terbatas, perubahan perilaku konsumen yang drastis hingga tekanan ekonomi. Namun, selain sebagai sebuah ancaman ternyata juga menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang kreatif. Kita pun seolah menjadi lebih mengenal lebih mendalam tentang orang-orang kreatif dan adanya aneka ragam peluang dari ekonomi kreatif. Giat inilah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mengembangkan konsep yang terarah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing komunitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1988). *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Indonesia, K. P. R. (2014). *Indeks Desa Membangun*, 6–8.
- Komansilan, N. A. (2014). *Analisa Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakarta (Studi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Bantaran Rel Kereta Api Senen Jakarta)*. *Jurnal JI@P Unisri*, 01(01). Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/search/authors/view?firstName=Nouke&middleName=A&lastName=Komansilan&affiliation=&country=ID>
- Kushandajani. (2015). *Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa*. *JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 76–94. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). *The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City*. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412–417. Retrieved from https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16-131_412-417.pdf
- Novitasari, D. (2014). *Analisa Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Wonosalam Lahat*. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga*, 01(01), 1–8. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/KMP@analisis-kebijakan-terhadap-pengembangan-pariwisata-di-kecamatan-wonosalam-kabupaten-Lahat-article-6535-media-138-category-8.html>

- Satari, F. C., & Asad, N. (2016). Model Strategi Pengembangan Wirausaha & Ekonomi Kreatif di Tingkat Kota (Pemetaan Per-Kecamatan) di Bandung, dengan Pendekatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, SWOT, Identifikasi Peran (Pentahelix) Stakeholders dan Rencana Aksi Implementasinya. Bandung. Retrieved from http://www.feb.unpad.ac.id/dokumen/files/01-Laporan-kemajuan_RFU_FINAL.pdf
- Shohibuddin, M. (2017). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 1–33. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30606/js.v5i1.1181>
- Solikatun, Supono, & Yulia Masrurroh. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 14–15. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Ucu Martanto. (2014). Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa. Surabaya: Airlangga University Press. Retrieved from <http://csws.fisip.unair.ac.id/publikasi/>
- Yunas, N. S., & Huda, M. (2018). Pengembangan Potensi Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Lahat, Dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat. *Mitra Pengabdian Masyarakat Unika Atmajaya*, 02(02), 104–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/mitra.v2i2.104>
- Yunas, N. S., & Isbahi, B. (2018). Lumbung Potensi Desa: Model Inovatif Pengembangan Potensi Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatra Selatan (01 No. 01).

Sumatra Selatan. Retrieved from <https://jakadpublisher.org/wp-content/uploads/2019/02/NOVY-SETIA-YUNAS.pdf>

Zamroni, S., Anwar, Z., & Yulianto, S. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit IRE.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Survey Pengembangan Model Crativepreneur di Kabupaten Lahat Tahun 2023









